BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

Jakarta
2025

BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

Jakarta
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan . Laporan Kinerja ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024 dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksaan amanat yang diberikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan Laporan Kinerja ini menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja rencana strategis 2020-2024.

Semoga Laporan Kinerja tahun 2024 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, 28 Februari 2025

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Muhammad Kashuri

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 104,17 masuk dalam predikat Istimewa. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 100,43 dengan predikat istimewa baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,45 dengan predikat istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 111,64 dengan predikat sangat baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM, terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja yang capaiannya melampui target yang ditetapkan, masuk dalam kategori sangat baik, 2 (dua) indikator kinerja yang memenuhi target, masuk kategori baik, dan 5 (lima) indikator kinerja yang belum mencapai target masuk dalam kategori cukup,.sementara 2 (dua) indikator kinerja capaiannya jauh melampui target yang ditetapkan (>120%), masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Dari sisi anggaran, Deputi II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Namun, terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 3.406.578.000 (tiga miliar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) akibat kebijakan efisiensi dan pembatasan perjalanan dinas yang diterapkan oleh Pemerintah. Dengan adanya blokir tersebut, maka pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 50.194.505.000,- (Lima puluh miliar seratus sembiln puluhh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Meskipun demikian, Deputi II BPOM tetap berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 50.194.290.590 (lima puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang setara dengan 93,64% dari total anggaran yang tersedia atau 100,00% dari total anggaran yang dapat digunakan.

Deputi II BPOM menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengelola efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan capaian kinerja (output) sebesar 104,17 dan realisasi anggaran (input) sebesar 100,00%, Deputi II BPOM mencapai indeks efisiensi sebesar 1,04, yang termasuk dalam kategori "efisien". Indeks ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputi II BPOM pada tahun 2024 mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Organisasi 1
1.3. Struktur Organisasi 6
1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
2.1. Rencana Strategis 12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 18
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 22
2.5. Metode Pengukuran 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 48
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 48
3.2 Evaluasi Tahun Ke-5 165
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 166
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Evaluasi 176
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja 192
3.6 Realisasi Anggaran 193
BAB IV HASIL EVALUASI 209
4.1 Target Kinerja Jangka Menengah 209
4.2 Analisis Capaian Kinerja 217
BAB V PENUTUP 246

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Komposisi SDM Berdasarkan Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan..... 6
Gambar 2 : Perbandingan Jumlah Pegawai Existing dan Gap Kebutuhan Pegawai..... 6
Gambar 3 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 7
Gambar 4 : Peta Stategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 15
Gambar 5 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 1 tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 55
Gambar 6 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 2 tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 59
Gambar 7 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 3 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 66
Gambar 8 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 4 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 71
Gambar 9 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 5 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 76
Gambar 10 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 6 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 81
Gambar 11 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 7 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 85
Gambar 12 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 8 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 89
Gambar 13 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 9 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 93
Gambar 14 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 10 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 99
Gambar 15 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 11 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 104
Gambar 16 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 12 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 109
Gambar 17 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 13 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 114
Gambar 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 14 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 120
Gambar 19 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 15 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 125
Gambar 20 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 18 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 137
Gambar 21 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 19 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 141
Gambar 22 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 20 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 145
Gambar 23 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 21 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 149
Gambar 24 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 22 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 153
Gambar 25 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 23 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 157
Gambar 26 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 24 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 159
Gambar 27 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 2522 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 161

Gambar 28 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 26 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding..... 164

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sebaran Pegawai di Deputi II BPOM 4
Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 16
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 19
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 23
Tabel 5 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 30
Tabel 6 Kriteria Capaian Indikator Kinerja 44
Tabel 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran 45
Tabel 8 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran 46
Tabel 9 : Nilai Pencapaian Strategis Perspektif tahun 2024 48
Tabel 10 Capaian Kinerja tahun 2024 48
Tabel 11 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2024 53
Tabel 12 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 54
Tabel 13 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 58
Tabel 14 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2024 58
Tabel 15 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha Tahun 2024 64
Tabel 16 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 65
Tabel 17 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2024 69
Tabel 18 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 70
Tabel 19 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Tahun 2024 74
Tabel 20 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Tahun 2020 - 2024 75
Tabel 21 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Tahun 2024 79
Tabel 22 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 80
Tabel 23 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024 83
Tabel 24 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 84
Tabel 25 : Capaian Kinerja Unit Kerja di Deputi II BPOM tahun 2024 86
Tabel 26 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas kebijakan Tahun 2024 88
Tabel 27 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 88
Tabel 28 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024 91
Tabel 29 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 - 2024 92

Tabel 30 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor tahun 2024 97
Tabel 31 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020 - 2024 98
Tabel 32 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas Dalam Rangka Pendampingan UMKM Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024..... 102
Tabel 33 : Perbandingan Capaian Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas Dalam Rangka Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 - 2024 103
Tabel 34 : Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Efektivitas KIE tahun 2024..... 108
Tabel 35 : Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Tahun 2020 - 2024..... 108
Tabel 36 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks pelayanan publik tahun 2024 113
Tabel 37 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024 113
Tabel 38 : Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi II BPOM dalam Pelayanan Publik tahun 2024 115
Tabel 39 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelayanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024 118
Tabel 40 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024 119
Tabel 41 : Target dan Realisasi Kinerja Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar tahun 2024 124
Tabel 42 : Perbandingan Capaian Kinerja Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar Tahun 2020 - 2024 124
Tabel 43 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap tahun 2024 128
Tabel 44 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap Tahun 2020 - 2024 128
Tabel 45 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB tahun 2024 131
Tabel 46 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB Tahun 2020 - 2024 132
Tabel 47 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024..... 135
Tabel 48 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024136
Tabel 49 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai AKIP tahun 2024 139
Tabel 50 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2020 - 2024 140
Tabel 51 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024..... 144
Tabel 52 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020 - 2024 145
Tabel 53 : Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip di Unit Kerja Deputi II BPOM tahun 2024.. 146
Tabel 54 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 148
Tabel 55 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 - 2024 148
Tabel 56 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2024 152
Tabel 57 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020 - 2024..... 152
Tabel 58 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2024 155
Tabel 59 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 - 2024..... 156
Tabel 60 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024..... 158
Tabel 61 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2020 - 2024..... 159
Tabel 62 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024

..... 160
Tabel 63 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020 - 2024..... 161
Tabel 64 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2024 162
Tabel 65 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 163
Tabel 66 : Realisasi Anggaran Per Sasaran Program 195
Tabel 67 : Realisasi Anggaran Per kegiatan 196
Tabel 68 : Indeks Efisiensi Perbandingan antara capaian Kinerja (Output) yang dihasilkan dengan anggaran (input) yang digunakan..... 207

BADAN POM

BAB I
PENDAHULUAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat perubahan mendasar dalam pola penganggaran, yang mencakup penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum dalam keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yang berorientasi pada hasil. Ini berarti bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, termasuk barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa hasil (*outcome/output*) yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan yang ditargetkan atau direncanakan, perlu adanya pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II BPOM), yang mencerminkan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberikan amanah atau mandat. Penyusunan laporan ini telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan teknologi di masyarakat Indonesia telah mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat dan tepat sasaran. Sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan komprehensif dan efektif telah menjadi dasar bagi perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan ini merupakan upaya BPOM untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang selaras dengan rencana strategis pembangunan nasional periode 2020-2024. Selain itu, perubahan ini juga memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit, termasuk Deputi II BPOM. Dalam menunjang pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan sistem pengawasan di BPOM serta mewujudkan *good governance*, Deputi II BPOM menjalankan beberapa tugas utama, yaitu:

1. Pengawasan *Premarket dan Postmarket*: Pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan, dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM): Penguatan pengelolaan SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengawasan.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha: Intensifikasi pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan riset serta inovasi untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi: Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
5. Kemitraan Lintas Sektor: Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan.
6. Implementasi Reformasi Birokrasi: Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Keenam aspek tersebut merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas kelembagaan Deputi II BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Hal ini memungkinkan Deputi II BPOM untuk menjawab tantangan dan kendala dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sangat dinamis.

Tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM termasuk sifat komoditas produk yang diawasi, yang dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Variasi pelaku usaha, dari industri besar hingga industri mikro dan rumah tangga, juga menambah kompleksitas pengawasan. Deputi II BPOM dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu asas *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui Laporan Kinerja, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi II BPOM atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan Kinerja ini

disusun sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II BPOM mennyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai. Namun, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, Deputi II BPOM masih mengalami kekurangan SDM yang cukup signifikan. Saat ini, jumlah pegawai di Deputi II BPOM sebanyak 279 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 476 pegawai, yang berarti terdapat gap kebutuhan SDM sebesar 198 pegawai. Dengan kondisi ini, tingkat pemenuhan pegawai baru mencapai 58,40%, sehingga optimalisasi sumber daya yang ada menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Sebaran pegawai di lima direktorat teknis di bawah Deputi II BPOM menunjukkan bahwa seluruh unit kerja mengalami kekurangan SDM, dengan persentase pemenuhan berkisar antara 52,38% hingga 70,08%. Berikut adalah rincian distribusi pegawai di Deputi II BPOM berdasarkan ABK dan realisasi pemenuhan pegawai:

Tabel 1 : Sebaran Pegawai di Deputi II BPOM

No.	Unit Kerja	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	% Pemenuhan
1	Dit. Standardisasi OTSKK	73	39	34	53,42
2	Dit. Pengawasan OTSK	96	54	42	56,25
3	Dit. Pengawasan Kosmetik	96	52	44	54,17
4	Dit. Registrasi OTSKK	127	89	37	70,08
5	Dit. PMPU OTSKK	84	44	40	52,38
	Deputi II BPOM	**476**	**279**	**198**	**58,40**

Tantangan dan Implikasi Kekurangan SDM

Defisit pegawai ini berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan, terutama dalam hal:

1. Beban kerja yang tinggi bagi pegawai yang ada, yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas pengawasan.
2. Keterbatasan dalam cakupan pengawasan *pre-market* dan *post-market*, karena jumlah petugas yang terbatas dalam melakukan evaluasi, inspeksi, dan pengawasan.
3. Potensi keterlambatan dalam pelayanan publik, terutama dalam registrasi produk, sertifikasi pelaku usaha, serta konsultasi dan edukasi kepada masyarakat.

4. Terbatasnya kapasitas pembinaan kepada UMKM, yang seharusnya diperkuat untuk meningkatkan daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Strategi dan Upaya Pemenuhan SDM

Untuk mengatasi tantangan ini, Deputi II BPOM telah dan akan terus melakukan berbagai strategi, antara lain:

- Advokasi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengusulkan penambahan formasi pegawai baru secara bertahap.
- Optimalisasi tenaga yang tersedia dengan menerapkan redistribusi pegawai berdasarkan kebutuhan prioritas, memastikan bahwa unit dengan kekurangan SDM paling besar mendapatkan tambahan pegawai dari unit lain yang lebih stabil.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, seperti penerapan sistem otomasi dalam proses registrasi dan pengawasan, sehingga dapat mengurangi beban kerja manual.
- Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi, guna meningkatkan kompetensi pegawai yang ada agar dapat bekerja lebih efektif dan mampu mengemban tugas tambahan.
- Kolaborasi dengan sektor eksternal, termasuk akademisi dan industri, dalam bentuk magang, tenaga ahli, atau konsultasi profesional guna mendukung tugas pengawasan dan evaluasi.

Dengan berbagai upaya ini, Deputi II BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan pelayanan publik, guna memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Selain dari sisi kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM juga perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai adalah sebagai berikut: S3 sebanyak 2 orang; S2 sebanyak 59 orang; Profesi sebanyak 87 orang; S1 sebanyak 94 orang; D3 sebanyak 34 orang; D1 sebanyak 1 orang; dan SLTA sebanyak 1 orang.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi yang memadai, peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas tetap menjadi prioritas utama. Langkah-langkah strategis untuk peningkatan kompetensi SDM, termasuk pelatihan

dan pendidikan lanjutan, harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Deputi II BPOM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.

Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

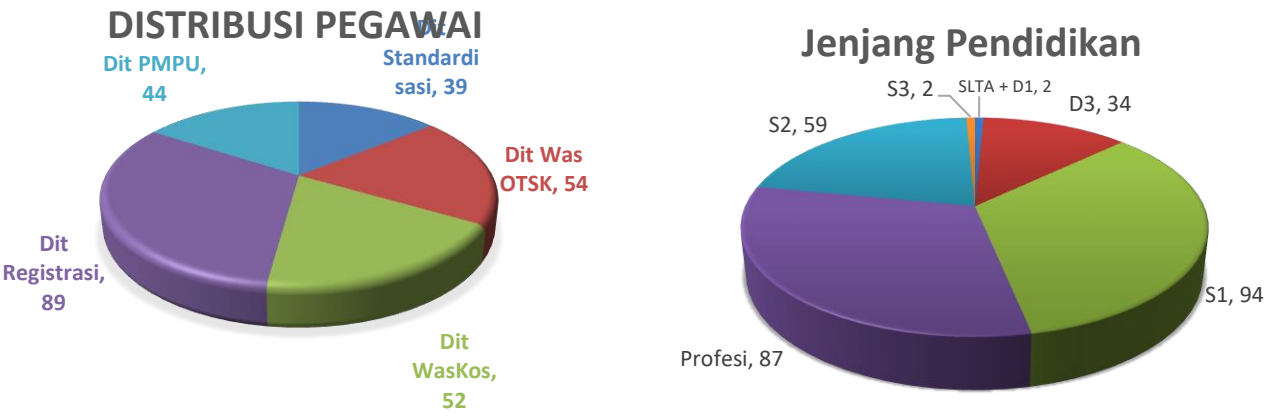

Gambar 1 : Komposisi SDM Berdasarkan Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan

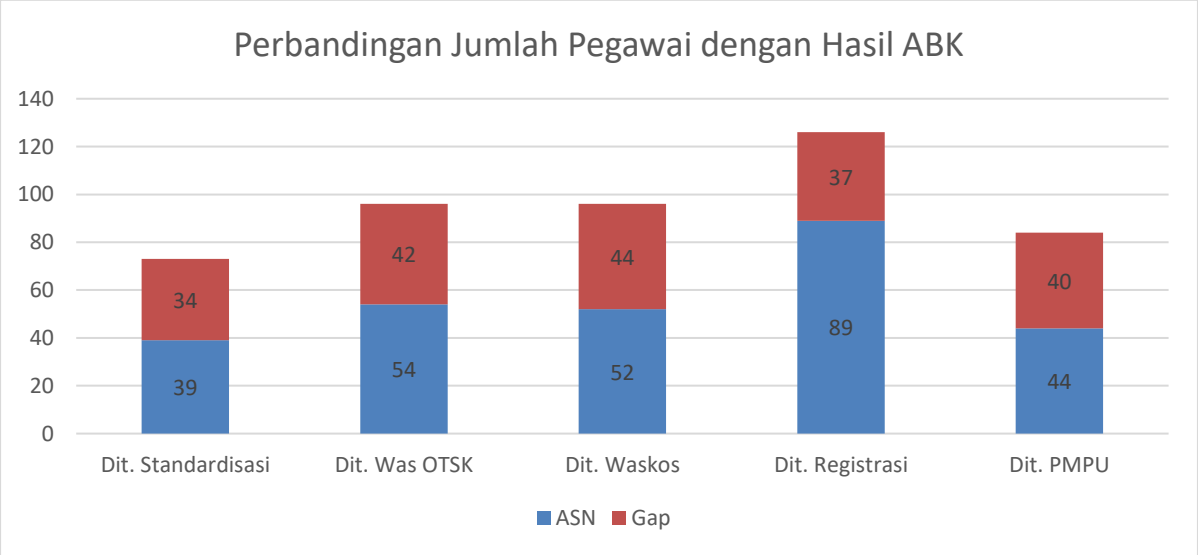

Gambar 2 : Perbandingan Jumlah Pegawai Existing dan Gap Kebutuhan Pegawai

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai

unit kerja teknis yang memiiki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 3 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta ≤ x ≤ 15 juta*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program

pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Isu Strategis

Deputi II BPOM memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam upaya memenuhi misi ini, terdapat tujuh isu strategis utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik.

1. Pelayanan Publik dan Pengawasan Proaktif Berbasis Digital

   Transformasi digital menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Deputi II BPOM berfokus pada pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik juga akan mempermudah akses informasi dan mempercepat proses perizinan, menjadikan pelayanan lebih transparan dan responsif.

2. Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

   Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Deputi II BPOM mendorong inovasi dan peningkatan kualitas melalui regulasi yang mendukung. Dukungan terhadap riset dan pengembangan produk, serta fasilitasi sertifikasi internasional, akan membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk yang kompetitif di pasar global.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

   Sebagai warisan budaya, jamu memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Deputi II BPOM berkomitmen untuk mendorong penelitian dan pengembangan jamu sebagai produk kesehatan yang aman dan efektif. Kolaborasi dengan lembaga riset dan industri diperlukan untuk memastikan jamu dapat diterima baik di pasar lokal maupun internasional.

4. Peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce*

   Perkembangan e-commerce membawa tantangan baru dalam pengawasan peredaran produk. Deputi II BPOM harus memperkuat pengawasan produk yang dijual secara online untuk mencegah peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar. Kerjasama dengan platform e-commerce dan penerapan teknologi pengawasan digital menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

5. Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

   Penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam obat tradisional dan bahan berbahaya dalam kosmetik menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Deputi II BPOM berfokus pada peningkatan pengawasan terhadap produk yang mengandung bahan berbahaya. Edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai bahaya BKO dan bahan berbahaya juga perlu ditingkatkan.

6. Keragaman Tingkat Kapasitas Pelaku Usaha

   Variasi kapasitas pelaku usaha, dari industri besar hingga mikro, memerlukan pendekatan pengawasan yang disesuaikan. Deputi II BPOM memberikan pembinaan dan fasilitasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Pendampingan intensif dan program pelatihan menjadi alat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kepatuhan industri.

7. Rendahnya Literasi Masyarakat

   Literasi masyarakat yang rendah mengenai keamanan dan kualitas produk kesehatan menjadi tantangan dalam pengawasan. Deputi II BPOM harus meningkatkan program komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Kolaborasi dengan media massa dan penggunaan platform digital dapat membantu mencapai tujuan ini.

Aspek Strategis Organisasi

Deputi II BPOM memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman, bermutu, dan efektif. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai aspek strategis yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek strategis dalam pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM:

1. **Perencanaan Pengawasan yang Komprehensif**

   Deputi II BPOM menyusun rencana pengawasan tahunan yang didasarkan pada analisis risiko dan prioritas nasional. Rencana ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk pengawasan pre dan post market, penetapan prioritas sampling, dan pemantauan iklan. Dengan perencanaan yang matang, BPOM dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih.

2. **Implementasi Teknologi Digital dalam Pengawasan**

   Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, Deputi II BPOM menerapkan teknologi digital seperti aplikasi sistem registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, sistem notifikasi kosmetik, sistem informasi registrasi iklan, e-SKI, dan e-sertifikasi CPKB/CPOTB. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

3. **Penguatan Regulasi dan Kebijakan**

   Regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas menjadi dasar dalam semua aktivitas pengawasan. Deputi II BPOM secara berkala meninjau dan memperbarui regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat.

4. **Kolaborasi dengan Stakeholder**

   Deputi II BPOM menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga penelitian, industri, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan penyusunan kebijakan bersama.

5. **Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat**

   Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk obat tradisional, suplemen

kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM secara aktif melakukan edukasi dan penyuluhan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, seminar, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

6. Pendampingan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, Deputi II BPOM melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan standar keamanan dan kualitas dalam produksi dan distribusi produk mereka.

BADAN POM

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor Hk.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah mencantumkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata "Aman", " Bermutu"dan "Berdaya Saing" adalah sebagai berikut:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik maka tujuan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategis Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penetapan sasaran strategis ini penting untuk menyusun kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kurun waktu lima tahun sesuai Rencana Strategis.

Berdasarkan pertimbangan dari empat perspektif dalam pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer*, dan *Stakeholders*, sasaran strategis dalam peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun. Sasaran ini mengacu pada Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024.

Penetapan sasaran strategis ini memungkinkan Deputi II BPOM untuk fokus pada pengembangan kapasitas internal, peningkatan proses pengawasan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjalin kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Semua ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat dalam penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Peta strategis Deputi II BPOM adalah sebagaimana bagan berikut :

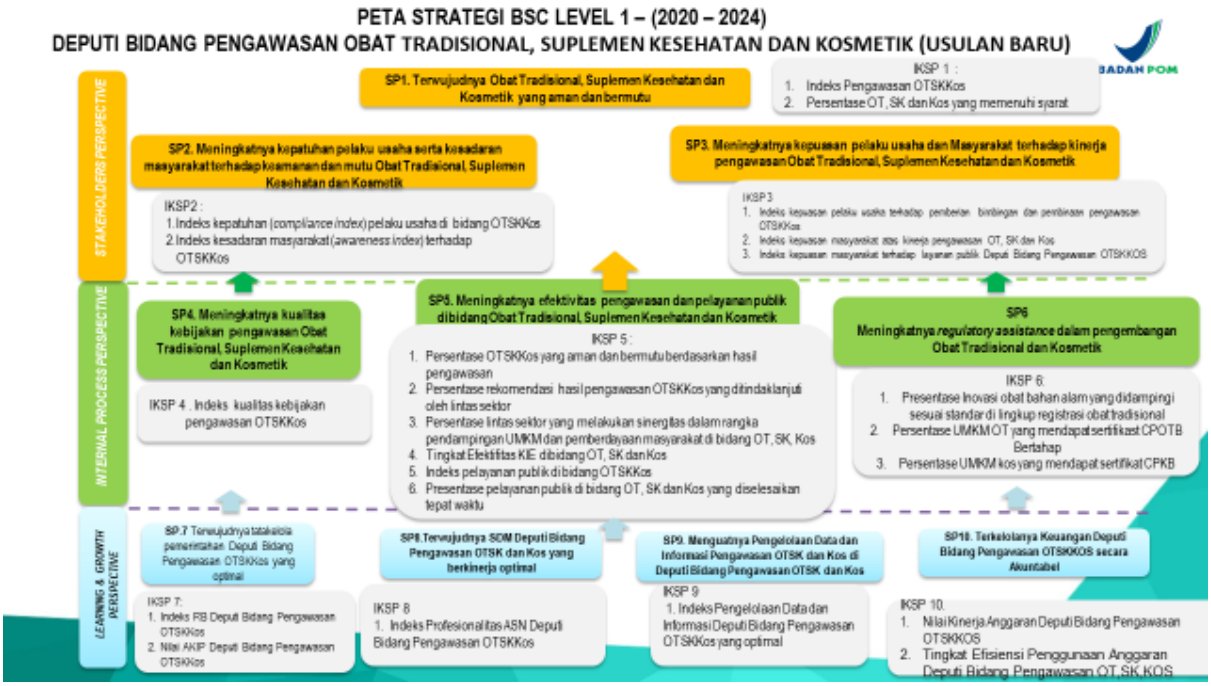

Gambar 4 : Peta Stategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menetapkan 10 sasaran strategis dengan 26 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Deputi tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 untuk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2021.

Reviu Renstra ini tidak mengubah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, namun terdapat beberapa penyesuaian pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur dan jumlah indikator. Penyesuaian ini untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Perubahan yang dilakukan pada nomenklatur dan jumlah indikator bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan tujuan strategis yang lebih spesifik dan terukur.

Dengan menggunakan 10 sasaran strategis dan 26 indikator, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat memantau dan mengevaluasi kinerja secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024 Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
	Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.0
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Deputi II BPOM telah menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi II untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 53.601.083.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen resmi yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, lengkap dengan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian Kinerja yang disusun mencakup tiga perspektif, dengan 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Stakeholder Perspective	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
Internal Process	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	100%

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
		IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
		IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02
	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,0
	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
		IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
		IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
		IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan, dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penetapan target untuk periode berikutnya (n+1) serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Deputi II dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-performance, yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berikutnya.

Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pemantauan yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat melacak kemajuan mereka terhadap sasaran yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan melaporkan hasilnya secara transparan. Dengan demikian, Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. RAPK Deputi II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Stakeholder *Perspective*															
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	2.976.899.000
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	0	0	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3.624.613.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												88	1.203.308.000
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas												84	3.125.973.000

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												94.8	1.252.096.000
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												80	1.144.190.000
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90.45	2.416.384.500
Internal Process															
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85.37	4.227.933.000

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	4.872.445.000
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	1.924.725.500
	IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	0	10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	92	1.696.563.000
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.2	4.006.320.000

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik									4.71	4.71	4.71	4.71	3.174.768.400
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3.481.950.200
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424.303.000
	IKSP 16	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB bertahap	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.238.090.000
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.000.000.000
Learning and Growth Perspective															

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												92.04	2.070.109.600
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80.05	128.424.000
	IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan												96.02	458.805.000
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												91.04	2.591.238.000

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.089.766.200
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												96.34	661.993.600
	IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												76.21	1.303.734.000
	IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												81	1.096.101.500
	IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri												60	384.251.500

2.5. Metode Pengukuran

SP 1	*Terwujudnya Obat Tadisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu*

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputi II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Melalui standardisasi yang terpusat, Deputi II BPOM memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas dan keamanan produk, serta untuk mencegah adanya standar yang berbeda-beda di setiap daerah.

Pengawasan pre-market yang dilaksanakan melalui evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dapat memasuki pasar. Dengan melakukan penilaian secara terpusat, BPOM dapat memberikan jaminan bahwa produk yang beredar di seluruh Indonesia telah melewati proses evaluasi yang ketat dan seragam.

Pengawasan post-market dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang sudah beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM di berbagai daerah, pengawasan ini dapat dilakukan secara konsisten dan terstandar di seluruh Indonesia, memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

   Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan

kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 5 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%
3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

   Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah produk yang diambil sampelnya. Proses sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n), berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan secara acak terhadap produk yang beredar selama tahun berjalan.

   Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

SP 2 ***Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

   Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengukurannya dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggunakan metode Desk Research, yaitu analisis data hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2024 melalui pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis meliputi:

   1. Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
   2. Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
   3. Data hasil pengawasan iklan dan penandaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

   Indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai, di mana semakin tinggi nilai yang diraih, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas program pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, serta komitmen pelaku usaha dalam mematuhi kebijakan yang berlaku

2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

dengan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat memilih produk-produk tersebut.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Aspek-aspek yang diukur meliputi:

- Pengetahuan: Menyangkut pemahaman masyarakat tentang manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, serta pengenalan logo pada kemasan.
- Sikap: Mencakup pandangan masyarakat mengenai produk yang kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya, produk palsu, serta cara penyimpanan produk yang benar.
- Perilaku: Melibatkan tindakan masyarakat dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, serta memilih produk yang aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai. Semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan program-program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

SP 3 *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputi II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

a. *Reliability,* kemampuan pengawasan;
b. *Assurance,* kemampuan memberikan perlindungan;
c. *Tangible,* layanan informasi tentang keamanan produk,
d. *Empathy,* kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
e. *Responsiveness,* tindakan atas produk berbahaya.

SP 4 *Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).
Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputi II BPOM.

SP 5 ***Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

   Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan

kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling targeted di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputi II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

   Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

   Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangkan pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

4. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

   Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputi II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

   a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
   b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
   c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
   d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
   e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
   f. Inovasi, dengan bobot 7%.

   Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

5. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputi II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

   Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

6. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

   Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektifitas KIE Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media pada tahun berjalan.

   Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

SP 6 *Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik*

Dalam pengembangan obat tradisional Deputi II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputi II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: 1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikar CPKB

1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

   Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

   Pengawalan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

   Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

   a. Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)
   b. Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)
   c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)
   d. Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)

   Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

2. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.

2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.

3. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

   Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).

   UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M). Perhitungan dilakukan dengan Perbandingan Jumlah UMKM Kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan.

SP 7 ***Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal***

Dalam menjalankan tugasnya, Deputi II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputi II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan
b. Penataan peraturan perundang-undangan
c. Penguatan pengawasan
d. Penguatan dan penataan organisasi
e. Penataan tata laksana
f. Penataan sistem management sumber daya manusia
g. Penguatan akuntabilitas kinerja
h. Penguatan kualitas pelayanan publik

Sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 3 (tiga) unit di Deputi II BPOM yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 2 (dua) unit lain masih terus berproses untuk mendapatkan predikat tersebut.

2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputi II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan ukuran kualitas tata kelola arsip yang diterapkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan tingkat kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan pelaksanaan pengelolaan arsip. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan kearsipan pada setiap K/L memenuhi kebijakan dan pedoman yang ditetapkan, sekaligus mendukung efektivitas pengelolaan informasi yang berkelanjutan.

Penilaian kearsipan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

a. Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan, yang meliputi penerapan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem pengelolaan, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
b. Pembinaan Kearsipan yang dilakukan oleh organisasi
c. Penyelenggaraan Kearsipan dalam bentuk pengelolaan arsip dinamis
d. Penyelamatan Arsip Bernilai Guna Permanen, dan
e. Sumber Daya Kearsipan, Sumber Daya Manusia kearsipan, organisasi, sarana, prasarana, serta anggaran kearsipan.

Setiap aspek ini dinilai untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas kearsipan yang dijalankan oleh instansi terkait.

Kategori nilai pengawasan kearsipan dibagi menjadi beberapa tingkat untuk mencerminkan kualitas pengelolaan, dengan pembagian sebagai berikut:

a. Nilai > 90 – 100, kategori AA (sangat memuaskan)
b. Nilai > 80 – 90, kategori A (memuaskan)
c. Nilai >70 – 80, kategori BB (sangat baik)
d. Nilai > 60 – 70, kategori B (baik)
e. Nilai > 50 – 60, kategori CC (cukup)
f. Kategori > 30 – 50, kategori C (kurang)
g. Nilai 0 – 30, kategori D (sangat kurang)

Nilai pengawasan kearsipan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu instansi telah menjalankan pengelolaan arsip yang efektif, sesuai standar, dan mampu menjaga kelestarian informasi secara baik dan berkelanjutan.

SP 8 ***Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal***

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.

b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.

c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%

d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.

b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.

c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputi II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

SP 9 *Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2020 - 2024, Deputi II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

a. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)

   Penetapan indikator ini berfungi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

   Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate dan dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

SP 10 *Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputi II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

   Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nika EKA.

   Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 7 (tujuh) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran. 7 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   a. Revisi DIPA
   b. Deviasi Halaman III DIPA
   c. Penyerapan Anggaran
   d. Belanja Kontraktual
   e. Penyelesaian Tagihan
   f. Pengelolaan UP dan TUP
   g. Capaian Output

   Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Deputi II adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggung jawab data di Lingkup deputi dan 1 (satu) orang petugas pada masing-masing unit kerja di kedeputian II.
2. Penanggung jawab data di unit kerja melakukan input data kinerja pada data base online
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan monitoring setiap bulan.
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Kesimpulan dari efektivitas capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kriteria berikut:

Tabel 6 Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	CAPAIAN IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% ≤ x ≤ 120%	
Baik	100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	< 70%	

Selanjutnya setelah melakukan perhitungan capaian indikator maka dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

NPSS = ∑ Nilai Perspektif (NP) / ∑ Perspektif (P)

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maksimal 120%.
4. Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini

Perspektif / SS	Nilai Perspektif / NSS
Stakeholder	**90**
SP 1	90
Internal Process	**(100+90+85+90)/4 = 91,25**
SP 2	100
SP 3	90
SP 4	85
SP 5	90
Learn & Growth	**(75+80+60)/3=71,67**
SP 6	75
SP 7	80
SP 8	60
NPSS	**(90+91,25+71,67) = 84,30**

Kinerja yang telah dicapai diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
Predikat kinerja organisasi baik periodic mauoun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	< 50	

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

1. NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
2. NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggan efisien, apabila IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 8 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0.21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)

0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BADAN POM

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2024, yang capaian kinerjanya diukur dengan menggunakan 3 perspektif, 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 104,17 masuk dalam predikat Baik. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 100,43 dengan predikat istimewa baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,45 dengan predikat istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 111,64 dengan predikat sangat baik. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 9 : Nilai Pencapaian Strategis Perspektif tahun 2024

No.	Perspektif	NPS	Predikat
1	Stakeholder perspective	100,43	Istimewa
2	Internal Process Perspective	100,45	Istimewa
3	Learn & Growth Perspective	111,64	Istimewa
	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	104,17	Istimewa

Tabel 10 Capaian Kinerja tahun 2024

No.	**Sasaran Program / Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Kategori**
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis				104,17	Istimewa
A.	Stakeholder perspective			100,43	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu			98,06	cukup
1.1	IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,00	89,20	100,22	Sangat Baik
1.2	IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97,00	93,01	95,89	cukup
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			101.71	Sangat Baik
2.1	IKSP 3: Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88,00	87,83	99,81	cukup
2.2	IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,00	86,71	103,23	Sangat Baik

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			101,52	Sangat Baik
3.1	IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94,80	95,28	100,51	Sangat Baik
3.2	IKSP 6: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,00	83,18	103,98	Sangat Baik
3.3	IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,45	91,03	100.64	Sangat Baik
B.	Internal Process Perspective			100,45	Sangat Baik
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			100,01	Sangat Baik
4.1	IKSP 8 Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,37	85,38	100,01	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			101,32	Sangat Baik
5.1	IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,50	90,68	98,03	cukup
5.2	IKSP 10: Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82,50	83,94	101,75	Sangat Baik
5.3	IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,00	94,12	102,30	Sangat Baik
5.4	IKSP 12: Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,20	99,27	100,07	Sangat Baik
5.5	IKSP 13: Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,71	4,89	103,82	Sangat Baik
5.6	IKSP 14:Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93,50	95,32	101,95	Sangat Baik
6	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik			100,03	Sangat Baik
6.1	IKSP 15: Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90,00	90,07	100,08	Sangat Baik
6.2	IKSP 16: Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100,00	100,00	100,00	Baik
6.3	IKSP 17: Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100,00	100,00	100,00	Baik
C.	Learn & Growth Perspective			111,64	Sangat Baik
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal			100,10	Sangat Baik
7.1	IKSP 18: Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan	92,04	89,54	97,28	cukup

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
7.2	IKSP 19: Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,05	80,66	100,76	Sangat Baik
7.3	IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,02	98,19	102,26	Sangat Baik
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal			96,46	cukup
8.1	IKSP 21: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,04	87,82	96,46	cukup
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			120,00	Sangat Baik
9.1	IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,00	3,60	120.00	Sangat Baik
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel			114,82	Sangat Baik
10.1	IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34	98,80	102,55	Sangat Baik
10.2	IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76,21	95,00	124,66	Tidak Dapat Disimpulkan
10.3	IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81,00	94,56	116,74	Sangat Baik
10.4	IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	78,61	131,02	Tidak Dapat Disimpulkan

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	
Memenuhi Ekspektasi	100% < x ≤ 120%	
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	
Tidak Memenuhi Ekspektasi	x < 80%	

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan sebagai berikut:

- Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun bersangkutan
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan

dengan tahun-tahun sebelumnya

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (*Benchmark* Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.
- Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menggunakan 26 indikator kinerja, terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja yang capaiannya melampui target yang ditetapkan, masuk dalam kategori sangat baik, 2 (dua) indikator kinerja yang memenuhi target, masuk kategori baik, dan 5 (lima) indikator kinerja yang belum mencapai target masuk dalam kategori cukup,.sementara 2 (dua) indikator kinerja capaiannya jauh melampui target yang ditetapkan (>120%), masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Ringkasan capaian kinerja dari ke 26 Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja yang capaiannya melampui target yang ditetapkan, masuk dalam kategori sangat baik:
    1. IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,22%
    2. IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 103,23%
    3. IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,51%
    4. IKSP 6: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 103,98%

5. IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100.64%
6. IKSP 8 Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,01%
7. IKSP 10: Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, dengan nilai capaian kinerja 101,75%
8. IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 102,30%
9. IKSP 12: Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,07%
10. IKSP 13: Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 103,92%
11. IKSP 14:Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, dengan nilai capaian kinerja 101,95%
12. IKSP 15: Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar, dengan nilai capaian kinerja 100,08%
13. IKSP 19: Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,76%
14. IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan, dengan nilai capaian kinerja 102,26%
15. IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 120.00%
16. IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 102,55%
17. IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan nilai capaian kinerja 116,74%

b. 2 (dua) indikator kinerja yang memenuhi target, masuk kategori baik:
   1. IKSP 16: Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap, dengan nilai capaian kinerja 100,00%

2. IKSP 17: Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB, dengan nilai capaian kinerja 100,00%

c. 5 (lima) indikator kinerja yang belum mencapai target masuk dalam kategori cukup:
   1. IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan nilai capaian kinerja 95,89%
   2. IKSP 3: Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 99,81%
   3. IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan nilai capaian kinerja 98,03%
   4. IKSP 18: Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 97,28%
   5. IKSP 21: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 96,46%

d. 2 (dua) indikator kinerja capaiannya jauh melampui target yang ditetapkan (>120%), masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan:
   1. IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dengan nilai capaian kinerja 124,66%
   2. IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan nilai capaian kinerja 131,02%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024 dari tiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

   Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik merupakan indikator untuk menilai tingkat efektifitas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang bertujuan untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektifias kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Berdasarkan pengukuran terhadap 5 (lima) komponen pembentuknya, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, didapatkan hasil pengukuran sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 11 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89,00	89,20	100,22%	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2024 adalah sebesar 89,20, dengan target yang ditetapkan sebesar 89,00 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,22%, masuk dalam kategori sangat baik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 12 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	83,00	83,51	100,61	Sangat Baik
2021	84,00	85,17	101,39	Sangat Baik
2022	86,00	86,10	100,17	Sangat Baik
2023	88,00	88,68	100,77	Sangat Baik
2024	89,00	89,20	100,22	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja Deputi II BPOM selama kurun waktu 2020 – 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi kinerja yang meningkat tiap tahunnya. Realisasi kinerja tersebut juga telah mencapai target kinerja di akhir periode Renstra.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

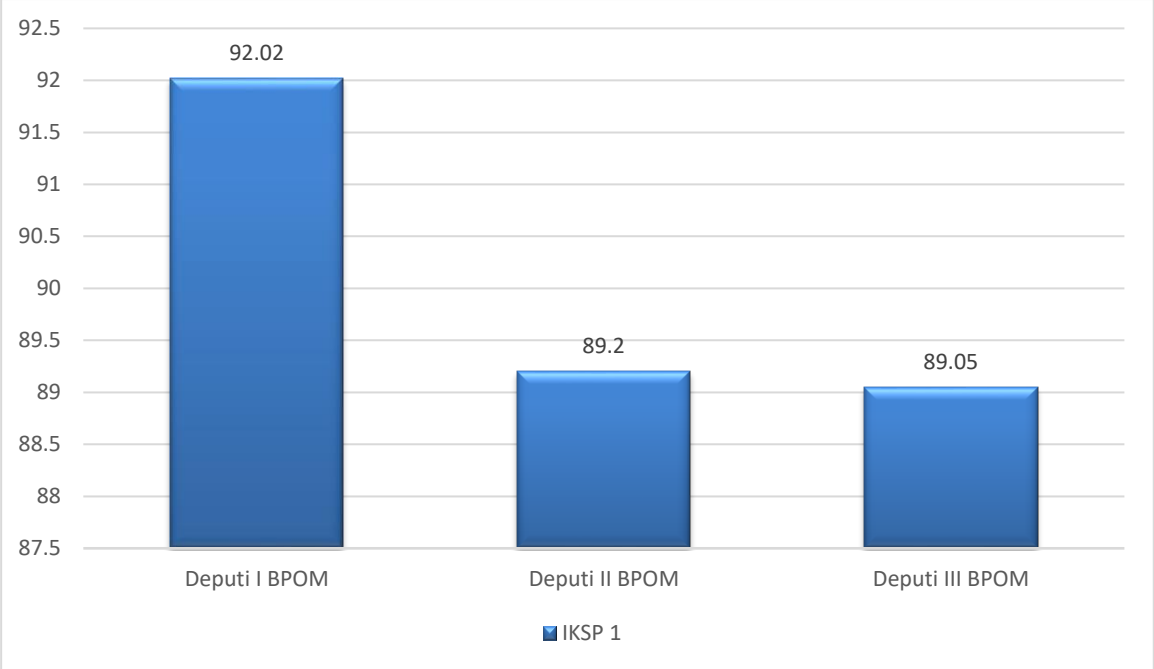

Gambar 5 : Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 1 tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dari grafik di atas terlihat bahwa Realisasi Kinerja Deputi II BPOM pada IKSP 1 (89,20), lebih rendah daripada kinerja Deputi I BPOM (92,02), namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Deputi III BPOM (89,05).

Analisis terhadap keberhasilan

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,050,024,000	3,050,009,357	100.00	100.22	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 100,22% sehingga kegiatan ini bisa dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan Deputi II BPOM dalam mencapai berbagai indikator kinerja, khususnya di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah Forum Komunikasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kosmetik, yang menjadi wadah diskusi antara pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan regulator, guna menyamakan persepsi serta memastikan implementasi regulasi berjalan efektif. Selain itu, Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi turut berperan dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait persyaratan dan standar produksi kosmetik yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

Dalam aspek pengawasan pre-market dan post-market, Deputi II BPOM menerapkan Implementasi Post Border Patrol sebagai langkah proaktif dalam memperkuat pengawasan kosmetik impor ilegal, yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan ini diperkuat dengan Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi, dan Importir yang diduga melakukan produksi atau peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Pendekatan berbasis risiko ini menjadi strategi penting dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren digital, Deputi II BPOM juga menginisiasi Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital, guna mengatasi maraknya promosi produk ilegal atau klaim berlebihan yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0, yang mendorong kolaborasi lebih erat antara BPOM dengan kementerian/lembaga terkait, platform e-commerce, serta asosiasi industri.

Dari aspek pengembangan kebijakan dan tata kelola pengawasan, Deputi II BPOM juga melaksanakan Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam

rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kapasitas usaha kontrak dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK juga digelar untuk memaksimalkan kinerja pengawasan, memastikan bahwa seluruh proses inspeksi dan evaluasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Keberhasilan program-program tersebut juga ditunjang oleh Upaya Kolaboratif dalam Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik, yang melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan daya saing industri serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman, bermutu, dan sesuai regulasi.

Upaya Peningkatan Kinerja

Meskipun berbagai program ini telah berkontribusi dalam mencapai sebagian besar target kinerja, masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target. Faktor utama yang menjadi tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, peningkatan jumlah produk yang diawasi, serta kompleksitas dalam pengawasan produk yang dijual secara digital. Oleh karena itu, ke depan, Deputi II BPOM perlu mengoptimalkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kemitraan strategis dengan industri dan akademisi, serta meningkatkan efektivitas sanksi terhadap pelanggaran.

Dengan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan efektivitas program-program pengawasan, Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar, serta mendorong pertumbuhan industri yang lebih patuh terhadap regulasi.

2. IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pengukuran ini mencerminkan efektivitas pengawasan Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah melalui proses evaluasi yang ketat sesuai dengan standar yang berlaku. Produk yang memenuhi syarat adalah

produk yang telah diuji dan disertifikasi aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar. Dengan mencapai persentase yang tinggi, Deputi II BPOM menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif dan bahwa produk yang tidak memenuhi syarat dapat diidentifikasi dan ditarik dari peredaran sebelum mencapai konsumen. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, didapatkan hasil pengukuran sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 13 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97,00	93,01	95,89%	cukup

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 adalah sebesar 93,01, dengan target yang ditetapkan sebesar 97,00 sehingga capaian kinerjanya adalah 95,88%, masuk dalam kategori cukup.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 14 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	93.00	89.88	96.65	Cukup
2021	94.00	94.63	100.67	Sangat Baik
2022	95.00	85.87	90.39	Cukup
2023	96.00	90.91	94.70	Cukup
2024	97.00	93.01	95,89	Cukup

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja Deputi II BPOM selama kurun waktu 2020 – 2024 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Realisasi kinerja tertinggi terjadi di tahun 2021, yaitu 94,63% dan terendah di tahun 2020 (89,88%).

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

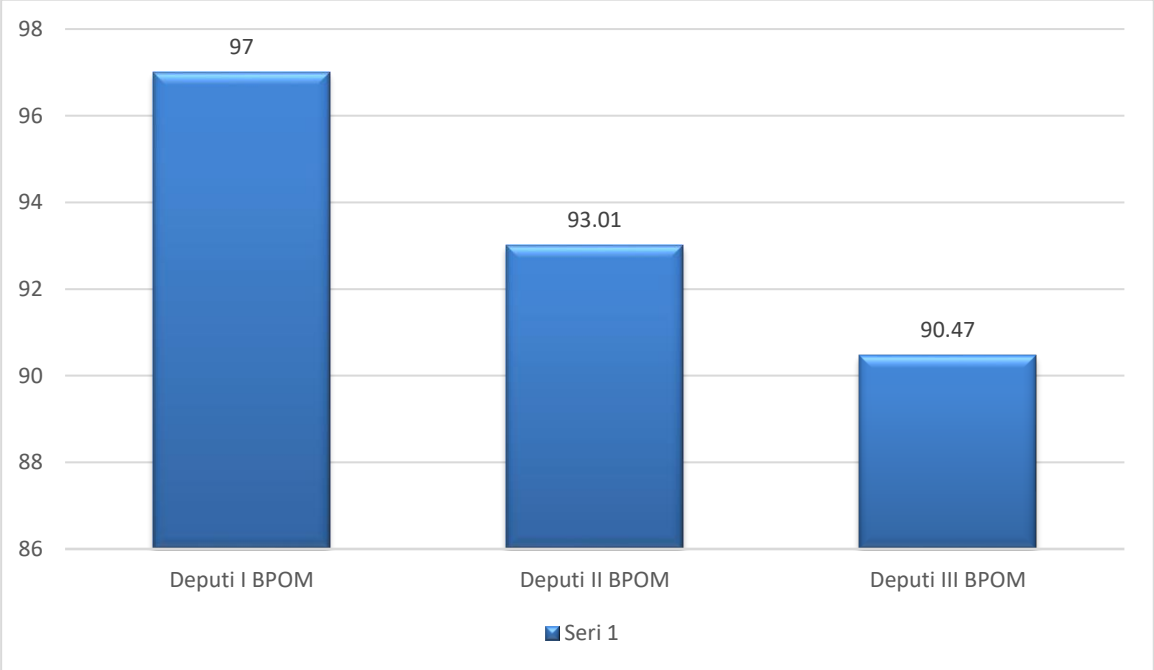

Gambar 6 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 2 tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dari grafik di atas terlihat bahwa Realisasi Kinerja Deputi II BPOM pada IKSP 2 (93,01), lebih rendah daripada kinerja Deputi I BPOM (97,00), namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Deputi III BPOM (90,47).

Analisis terhadap kegagalan pencapaian kinerja

Deputi II BPOM telah melaksanakan pengawasan intensif terhadap 28.984 sampel yang terdiri dari 11.745 sampel obat bahan alam dan suplemen kesehatan serta 17.239 sampel kosmetik sepanjang tahun 2024. Dari hasil pengujian, 26.957 produk dinyatakan memenuhi syarat, yang terdiri dari 10.732 sampel obat bahan alam dan suplemen kesehatan serta 16.225 sampel kosmetik, sehingga persentase produk yang memenuhi syarat mencapai 93,01%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk

yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan pengawasan strategis yang telah dilakukan, di antaranya intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, pemantauan ketat terhadap produk berisiko tinggi, serta penerapan metode pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan penindakan lebih efektif terhadap produk yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, termasuk penggunaan metode analisis yang lebih presisi, turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas deteksi terhadap kandungan bahan aktif serta memastikan bahwa produk yang diuji memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	3,388,503,000	3,388,483,755	100.00	95.88	Tidak Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 95,88% sehingga kegiatan ini bisa dianggap tidak efisien.

Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat menunjukkan bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar 100,00%, capaian kinerja yang diperoleh adalah 95,88%, sehingga dinilai tidak efisien. Ketidakefisienan ini mengindikasikan bahwa meskipun seluruh alokasi anggaran telah digunakan, target yang ditetapkan masih belum tercapai, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian, keterbatasan dalam sumber daya laboratorium, serta masih adanya produk yang tidak memenuhi syarat yang beredar di pasaran. Selain itu, tantangan dalam pengawasan produk di e-commerce serta kepatuhan pelaku usaha yang belum optimal turut berkontribusi terhadap hasil ini. Ke depan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut

terhadap alokasi anggaran dan efektivitas program yang dijalankan, termasuk penguatan strategi pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas pembinaan kepada pelaku usaha, serta optimalisasi sistem pemantauan berbasis digital, agar pencapaian kinerja lebih sejalan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dan efisiensi dapat lebih ditingkatkan

Analisis program kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja

Realisasi kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 mencapai 93,01% dari target 97,00%, dengan capaian kinerja 95,88%, yang masuk dalam kategori Cukup. Meskipun hasil ini menunjukkan efektivitas pengawasan yang baik, namun masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai program strategis guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi serta memastikan produk yang beredar aman dan bermutu.

Beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian ini antara lain Bimbingan Teknis kepada UMKM OBA dalam Pelaksanaan Penarikan Kembali Produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan dan mutu. Selain itu, Peningkatan Dukungan Kosmetik Aman dan Berkualitas, serta Intensifikasi Pengawasan melalui Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik di Peredaran telah berkontribusi dalam mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi syarat dan mencegahnya beredar luas di masyarakat. Deputi II BPOM juga mengadakan Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas, yang memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mengawasi produk sesuai standar yang berlaku.

Upaya edukasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui pembuatan video edukasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pemilihan produk yang aman. Dalam aspek regulasi, Deputi II BPOM telah mengimplementasikan Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk yang ternotifikasi, serta melakukan intensifikasi penelusuran bahan berbahaya atau dilarang dalam kosmetik guna mencegah peredaran produk dengan kandungan yang tidak sesuai standar. Langkah pengawasan lebih lanjut dilakukan dengan intensifikasi pengawasan keamanan dan mutu produk OT dan SK melalui pendekatan desain baru pengawasan, yang memastikan bahwa produk yang beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, Deputi II BPOM juga melakukan Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah, yang bertujuan meningkatkan akurasi dalam pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium. Kegiatan lain yang menunjang efektivitas pengawasan adalah Pembahasan dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika, serta Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder, yang memastikan bahwa kosmetika yang didaftarkan telah memenuhi standar keamanan yang ketat. Pendampingan dan Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam Pengawalan Keamanan dan Mutu Produk, serta Peningkatan Kompetensi Petugas dalam Koordinasi Pengawasan OBA, OK, dan SK, turut membantu dalam meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku.

Meski berbagai program tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target belum tercapai. Beberapa penyebab utama dari kesenjangan kinerja ini antara lain:

1. Masih adanya produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran karena ketidaktahuan atau kelalaian pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.
2. Tingginya jumlah produk yang diawasi, baik dari industri besar maupun UMKM, yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan berkelanjutan.
3. Kurangnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam melaksanakan regulasi yang berlaku, terutama dalam penerapan CPOTB dan CPKB.
4. Tantangan dalam pengawasan produk di platform digital dan e-commerce, di mana banyak produk ilegal dan tidak memenuhi standar masih beredar secara luas.
5. Terbatasnya sumber daya dalam melakukan inspeksi dan pengawasan secara menyeluruh, baik dalam aspek SDM maupun infrastruktur laboratorium.

Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Deputi II BPOM perlu melakukan strategi perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pengawasan berbasis digital dengan mengoptimalkan sistem pemantauan produk yang dijual secara daring serta memperkuat koordinasi dengan platform e-commerce untuk mencegah peredaran produk ilegal.

2. Memperkuat sinergi dengan lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga, dan asosiasi industri, guna meningkatkan pengawasan bersama dan mengoptimalkan implementasi regulasi.
3. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui bimbingan teknis yang lebih intensif, dengan fokus pada penerapan CPOTB dan CPKB, serta memperluas cakupan pendampingan bagi UMKM.
4. Mempercepat proses evaluasi dan sertifikasi produk melalui percepatan maturitas IOT untuk implementasi CPOTB, guna memastikan produk yang memenuhi standar dapat segera mendapatkan izin edar.
5. Melakukan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan pengawasan pada produk yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga pengelolaan sumber daya pengawasan lebih efektif.
6. Meningkatkan efektivitas KIE kepada masyarakat dengan memperluas jangkauan edukasi terkait cara memilih produk yang aman serta pentingnya membaca label dan izin edar sebelum membeli produk.
7. Memperkuat analisis data risiko kosmetik dan produk OT & SK melalui Risk Analisis Data Produk Kosmetik, guna mengidentifikasi pola pelanggaran dan mengantisipasi potensi masalah sebelum produk beredar luas.

Dengan implementasi upaya perbaikan ini, diharapkan persentase produk yang memenuhi syarat dapat meningkat pada tahun mendatang, serta kinerja pengawasan Deputi II BPOM semakin optimal dalam memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

3. IKSP 3: Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam aspek produksi, distribusi, iklan, dan penandaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam regulasi BPOM, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan pembinaan lebih lanjut. Melalui pemantauan ini, Deputi II BPOM dapat memastikan bahwa setiap sarana produksi dan distribusi yang

beroperasi memiliki sistem pengawasan yang memadai guna meminimalisir risiko terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Selain sebagai alat evaluasi, pengukuran Compliance Index juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mendorong pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya indeks ini, pelaku usaha di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik diharapkan lebih proaktif dalam menjaga standar keamanan, khasiat, dan mutu produk mereka. Deputi II BPOM terus berupaya meningkatkan kepatuhan industri melalui berbagai program edukasi, sosialisasi regulasi, serta bimbingan teknis yang bertujuan untuk membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, maka perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen juga semakin terjamin, sehingga produk yang beredar di pasar lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Target dan Realisasi Kinerja Deputi II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88,00	87,83	99,81	cukup

Pada tahun 2024, Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan realisasi kinerja sebesar 87,83 dari target 88,00, dengan capaian kinerja 99,81%, yang masuk dalam kategori cukup. Hasil ini mencerminkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah mematuhi regulasi yang ditetapkan, meskipun masih terdapat tantangan dalam kepatuhan terhadap standar produksi, distribusi, serta iklan dan penandaan produk. Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan industri, termasuk melalui bimbingan teknis, evaluasi berkala, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meskipun target hampir tercapai, masih diperlukan strategi lebih lanjut dalam memperkuat pengawasan serta peningkatan kesadaran pelaku usaha agar kepatuhan dapat meningkat lebih optimal di tahun mendatang.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 16 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	82.00	81.38	99.24%	Cukup
2021	85.00	84.53	99.45%	Cukup
2022	86.00	86.79	100.92%	Sangat Baik
2023	87.00	85.72	98.53%	Cukup
2024	88.00	87,83	99,81%	Cukup

Selama kurun waktu 2020-2024, Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengalami tren peningkatan yang cukup stabil, dengan realisasi yang semakin mendekati target Renstra. Pada 2020 dan 2021, capaian kinerja berada dalam kategori cukup, dengan nilai masing-masing 81,38 (99,24%) dan 84,53 (99,45%). Pada 2022, indeks kepatuhan mencapai 86,79 (100,92%), yang masuk dalam kategori sangat baik, mencerminkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha yang meningkat signifikan. Namun, pada 2023, realisasi sedikit menurun ke 85,72 (98,53%), kembali masuk dalam kategori cukup. Pada 2024, indeks kepatuhan kembali meningkat ke 87,83 (99,81%), meskipun masih berada dalam kategori cukup dan sedikit di bawah target 88,00. Data ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan, pembinaan, dan regulasi yang diterapkan Deputi II BPOM telah memberikan hasil positif, namun masih perlu strategi penguatan pengawasan dan peningkatan kesadaran pelaku usaha agar capaian di masa mendatang dapat mencapai kategori sangat baik secara konsisten.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

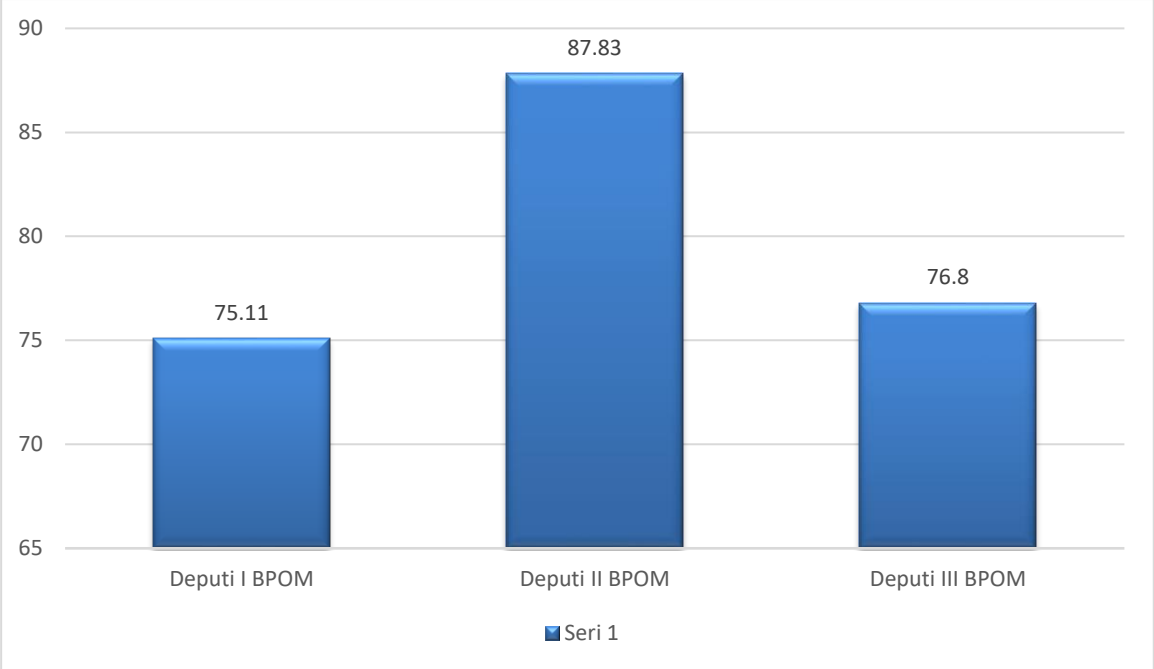

Gambar 7 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 3 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Perbandingan Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan satuan kerja sebanding menunjukkan bahwa Deputi II BPOM mencatat realisasi tertinggi dengan nilai 87,83, dibandingkan dengan Deputi I BPOM (75,11) dan Deputi III BPOM (76,8). Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik lebih baik dibandingkan sektor yang diawasi oleh Deputi I dan Deputi III. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi pengawasan yang lebih intensif, program pembinaan yang sistematis, serta peningkatan literasi kepatuhan di kalangan pelaku usaha. Meskipun demikian, Deputi II BPOM tetap perlu mengoptimalkan strategi pengawasan dan edukasi untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan.

Analisis kegagalan Pencapaian Kinerja

Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) dilakukan terhadap 3980 sampel obat tradisional, 1470 sampel suplemen kesehatan, dan 6712 sampel kosmetik yang mencakup sarana produksi, sarana distribusi, iklan, dan penandaan. Dari hasil pengukuran, indeks kepatuhan pelaku usaha obat tradisional mencapai 85,26, pelaku usaha suplemen kesehatan mencapai 94,43, dan pelaku usaha kosmetik sebesar 83,79, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 87,83. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan

kosmetik masih berada dalam kategori cukup, dengan capaian kinerja 99,80% dari target yang ditetapkan sebesar 88,00.

Meskipun secara keseluruhan indeks kepatuhan mendekati target, masih terdapat disparitas di antara ketiga sektor yang perlu menjadi perhatian. Pelaku usaha suplemen kesehatan menunjukkan kepatuhan tertinggi (94,43), menandakan efektivitas pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan. Namun, kepatuhan pelaku usaha kosmetik (83,79) dan obat tradisional (85,26) masih di bawah standar optimal, mengindikasikan adanya tantangan dalam kepatuhan regulasi di dua sektor ini, terutama terkait sarana produksi dan distribusi. Upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penguatan pengawasan di sektor kosmetik dan obat tradisional, khususnya dalam hal peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait standar keamanan dan mutu, serta optimalisasi program pembinaan dan sosialisasi regulasi. Deputi II BPOM akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memberikan asistensi teknis kepada pelaku usaha, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	738,287,000	738,285,616	100.00	99.81	Tidak Efisien

Meskipun capaian kinerja Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 hampir mencapai target dengan realisasi 99,81%, penggunaan anggaran yang mencapai 100,00% menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Ketidakseimbangan antara output dan input ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya yang digunakan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan yang maksimal dalam kepatuhan pelaku usaha. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakefisienan ini antara lain belum optimalnya strategi edukasi dan sosialisasi yang dilakukan, sehingga meskipun anggaran telah terserap penuh, dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha belum sepenuhnya efektif. Untuk

meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan, serta penerapan metode pengawasan berbasis risiko yang lebih tepat sasaran guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Analisis program kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi II BPOM telah menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 88,00, dengan realisasi capaian sebesar 87,83 atau 99,81%, yang masuk dalam kategori cukup. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini antara lain Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, yang berperan dalam meningkatkan pengawasan langsung di lapangan serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, terutama UMKM, agar lebih memahami standar kepatuhan. Selain itu, Peningkatan Kepatuhan UMKM dalam Memenuhi Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten dilakukan untuk mengurangi pelanggaran terkait promosi dan informasi produk, sehingga transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar dapat ditingkatkan. Deputi II BPOM juga memperkuat Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, yang berfokus pada pemantauan media digital serta penguatan literasi bagi pelaku usaha agar lebih memahami peraturan promosi yang diperbolehkan.

Meskipun berbagai program telah dijalankan secara optimal, beberapa tantangan masih perlu diatasi agar target kepatuhan dapat tercapai sepenuhnya. Salah satunya adalah implementasi E-Rapor Industri Kosmetik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan serta pelaporan industri kosmetik. Program ini masih membutuhkan optimalisasi dalam penerapan di lapangan, terutama dalam hal pemanfaatan sistem digital secara menyeluruh oleh pelaku usaha. Untuk meningkatkan capaian kepatuhan di masa mendatang, Deputi II BPOM perlu melakukan upaya perbaikan, antara lain dengan memperluas cakupan edukasi bagi pelaku usaha melalui platform digital, meningkatkan sistem pemantauan berbasis data secara real-time, serta memperkuat mekanisme sanksi dan insentif guna mendorong kepatuhan lebih lanjut. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas sektor juga menjadi

langkah strategis agar regulasi dapat diterapkan dengan lebih efektif dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dapat mencapai hasil yang lebih optimal di periode mendatang.

4. IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

   Deputi II BPOM terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya dari produk ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan. Dengan meningkatnya akses informasi dan edukasi, diharapkan masyarakat semakin mampu melindungi diri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan produk yang tidak sesuai regulasi.

   Keberhasilan program yang telah dijalankan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terlibat, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Indeks Kesadaran Masyarakat menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif Deputi II BPOM dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait produk yang mereka konsumsi. Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Evaluasi yang berkelanjutan akan memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perbaikan dan penguatan program pemberdayaan dan edukasi, sehingga Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk yang aman dan berkualitas. Target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,00	86,71	103,23%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencapai 86,71, melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,00 dengan capaian kinerja 103,23%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan dan mutu produk yang mereka konsumsi. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang telah diterapkan efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat, sehingga mereka semakin mampu memilih produk yang aman dan bermutu serta menghindari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 18 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	82.00	71.02	86.61	Cukup
2021	74.00	76.23	103.01	Sangat Baik
2022	78.00	79.75	102.24	Sangat Baik
2023	81.00	83.08	102.57	Sangat Baik
2024	84.00	86.71	103.23	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan efektivitas program edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Deputi II BPOM. Pada tahun 2020, realisasi indeks masih berada di angka 71,02, dengan capaian 86,61% (kategori cukup). Namun, sejak 2021, capaian indeks mulai melampaui target, dengan realisasi 76,23 (103,01%), menandai perbaikan yang signifikan dan masuk kategori sangat baik. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana realisasi mencapai 86,71 dari target 84,00, dengan capaian 103,23%, tetap berada dalam kategori sangat baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang diterapkan BPOM berhasil meningkatkan literasi masyarakat, membuat mereka semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

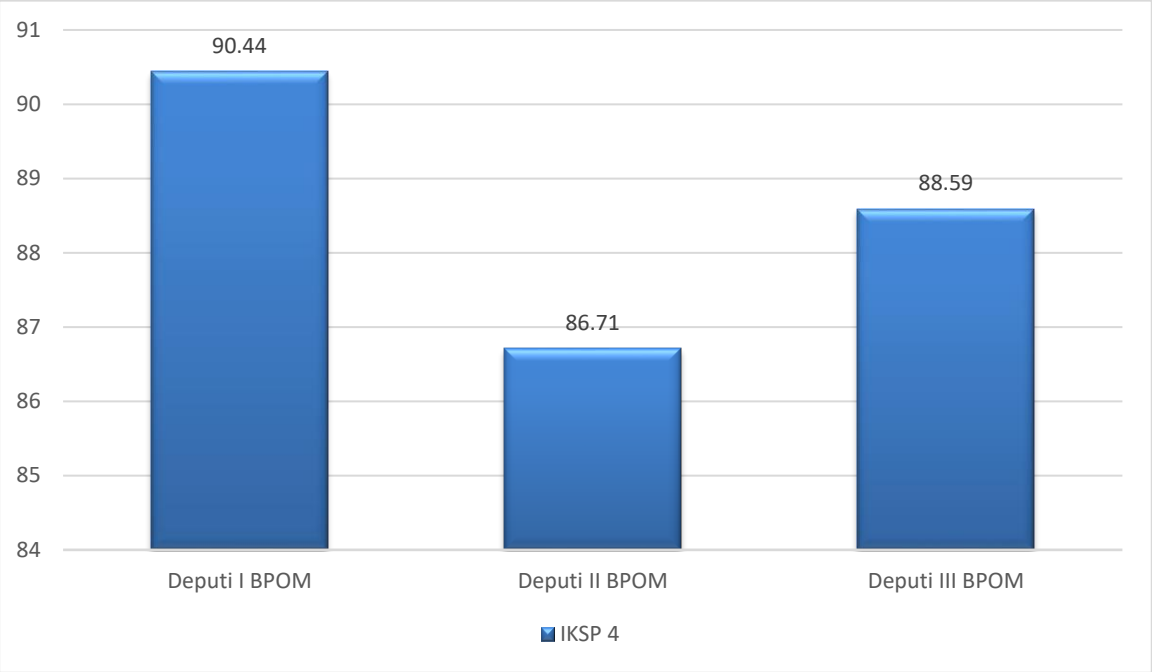

Gambar 8 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 4 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi sebesar 86,71, berada di bawah Deputi I BPOM yang mencapai 90,44, serta Deputi III BPOM yang memperoleh 88,59. Meskipun capaian Deputi II BPOM masih berada dalam kategori sangat baik, hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Perbedaan ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif agar dapat menyamai atau bahkan melampaui kinerja satuan kerja lainnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan dan mutu produk.

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 86,71, melampaui target yang ditetapkan sebesar

84,00, dengan capaian kinerja 103,23%. Pengukuran yang dilakukan terhadap 20.610 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat cukup merata di semua kategori produk, dengan Indeks Kesadaran terhadap obat tradisional sebesar 86,80, suplemen kesehatan sebesar 86,04, dan kosmetik sebesar 87,29. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, termasuk kampanye komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), optimalisasi media sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Peningkatan kesadaran ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu, serta lebih cermat dalam membaca label dan informasi produk sebelum digunakan. Ke depan, upaya peningkatan dapat difokuskan pada perluasan jangkauan edukasi ke daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kesadaran lebih rendah, serta optimalisasi strategi digital untuk memperkuat literasi masyarakat dalam memilih produk kesehatan yang aman dan berkualitas.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,042,839,000	2,042,828,555	100.00	103.23	Efisien

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan efisiensi yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar 103,23% dan penggunaan anggaran 100,00%. Efisiensi ini mencerminkan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, edukasi, dan komunikasi informasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan, seperti kampanye edukasi, peningkatan literasi masyarakat, serta pemanfaatan media digital dan sosial, telah memberikan dampak yang signifikan. Dengan capaian yang melampaui target, Deputi II BPOM telah membuktikan bahwa pendekatan yang sistematis dan berbasis data dalam sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara efisien, memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki dampak maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 86,71 dari target 84,00, sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,23%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait pemilihan dan penggunaan produk yang aman dan bermutu.

Beberapa kegiatan yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini antara lain Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, yang memberikan edukasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai regulasi, standar keamanan, serta pemahaman terkait produk yang layak konsumsi. Selain itu, Koordinasi Pemberdayaan OT, SK, dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor juga berperan dalam memperkuat sinergi antara BPOM dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan program edukasi lebih luas dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pembentukan dan Pemberdayaan Penyuluh/Kader dalam rangka BPOM Goes to Community telah menjadi salah satu strategi dalam memperluas jangkauan edukasi hingga ke masyarakat di tingkat akar rumput, memastikan bahwa pesan terkait keamanan produk tersampaikan secara efektif. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK juga menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar. Selain itu, Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi OT dan SK melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial telah berhasil memperluas akses informasi bagi masyarakat di era digital, sehingga edukasi dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih mudah diakses.

Meskipun hasil yang dicapai sangat baik, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan kesinambungan keberhasilan ini. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan mencakup peningkatan cakupan sosialisasi dan edukasi ke wilayah dengan akses informasi terbatas, penguatan kolaborasi dengan komunitas lokal dan influencer kesehatan, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital dan interaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Deputi II BPOM dapat semakin meningkatkan efektivitas program edukasi dan pemberdayaan

masyarakat guna mempertahankan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu.

5. **IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencerminkan efektivitas layanan yang diberikan oleh Deputi II BPOM dalam membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi regulasi yang berlaku. Bimbingan dan Pembinaan (KBP) merupakan bagian dari regulatory assistance, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha—mulai dari produsen, distributor, importir, eksportir, hingga penyedia layanan seperti apotek dan rumah sakit—dapat menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan manfaat produk. KBP ini dikategorikan menjadi empat jenis layanan, yaitu Pendampingan, Desk Konsultasi, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi, yang semuanya dirancang untuk memberikan solusi komprehensif bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan regulasi.

Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha, Deputi II BPOM terus berupaya mengembangkan metode layanan yang lebih efektif dan adaptif, termasuk melalui digitalisasi proses konsultasi, penyelenggaraan webinar, serta optimalisasi sistem informasi berbasis teknologi. Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan responsif, diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses terhadap informasi dan regulasi yang dibutuhkan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program bimbingan dan pembinaan dilakukan untuk mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih optimal dalam mendukung pelaku usaha dalam mematuhi peraturan dan memastikan produk yang beredar tetap aman dan berkualitas bagi masyarakat. Target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94,80	95,28	100,51	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 95,28 dari target 94,80, menghasilkan capaian 100,50%. Hasil ini mencerminkan efektivitas layanan bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Deputi II BPOM, baik dalam bentuk pendampingan, desk konsultasi, bimbingan teknis, maupun sosialisasi, sehingga pelaku usaha merasa terbantu dalam memahami dan memenuhi regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sekaligus memperkuat komitmen BPOM dalam meningkatkan kualitas layanan pengawasan terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 20 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	83.00	87.13	104.98	Sangat Baik
2021	88.20	85.80	97.28	Cukup
2022	89.30	94.50	105.82	Sangat Baik
2023	90.40	94.74	104.80	Sangat Baik
2024	94.80	95.28	100.51	Sangat Baik

Selama kurun waktu 2020-2024, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren positif dengan capaian yang konsisten berada dalam kategori sangat baik, kecuali pada tahun 2021, di mana capaian sedikit di bawah target dengan kategori cukup (97,28%). Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2022, dengan capaian 105,82%, diikuti oleh tahun 2020 (104,98%) dan 2023 (104,80%). Pada tahun 2024, meskipun capaian kinerja 100,50% sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tetap memenuhi target dan menunjukkan bahwa bimbingan

serta pembinaan kepada pelaku usaha semakin optimal. Konsistensi pencapaian ini menegaskan efektivitas pendekatan Deputi II BPOM dalam memberikan layanan yang mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

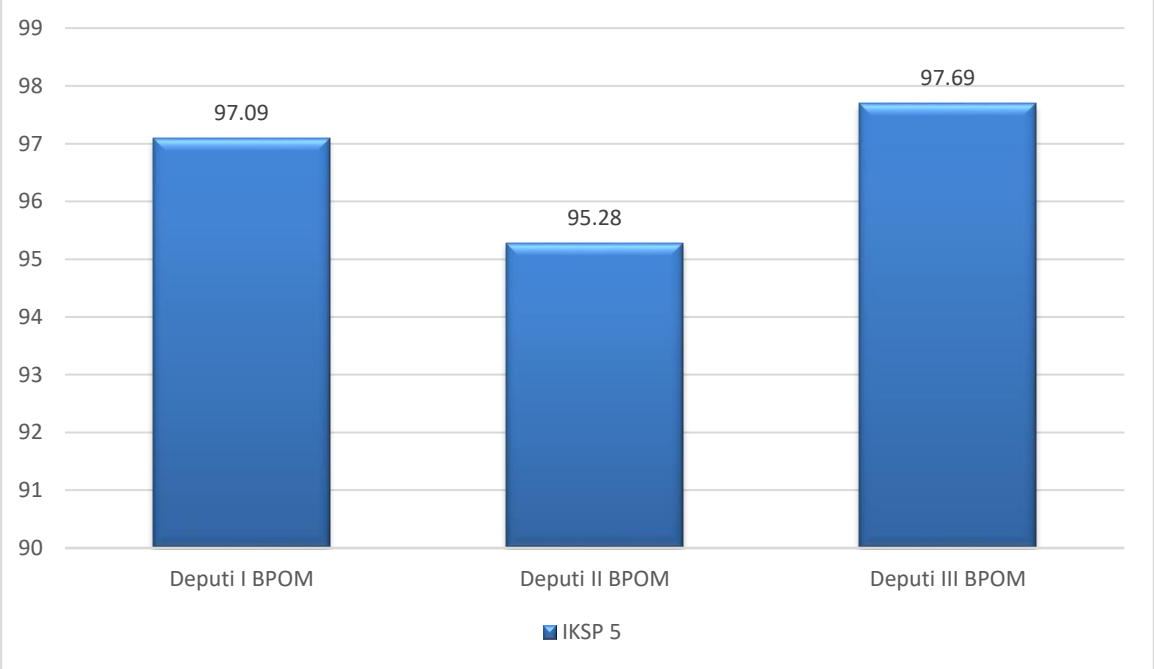

Gambar 9 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 5 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik antara Deputi II BPOM dan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi sebesar 95,28, sementara Deputi I BPOM mencapai 97,09, dan Deputi III BPOM memperoleh capaian tertinggi sebesar 97,69. Meskipun capaian Deputi II BPOM masih dalam kategori sangat baik, terdapat ruang untuk peningkatan agar setara atau melampaui unit kerja lainnya. Perbedaan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha, terutama dalam memastikan layanan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Deputi II BPOM berhasil mencapai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan capaian 100,50%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 94,80,

dan masuk dalam kategori sangat baik. Pengukuran ini dilakukan terhadap 8824 pelaku usaha yang mengikuti 724 kegiatan bimbingan dan pembinaan, dengan rincian 3276 pelaku usaha obat tradisional, 2312 pelaku usaha suplemen kesehatan, dan 3236 pelaku usaha kosmetik. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi berasal dari pelaku usaha suplemen kesehatan (97,41), diikuti oleh obat tradisional (97,36) dan kosmetik (97,40), yang mencerminkan keberhasilan program pembinaan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Dengan capaian yang sangat baik ini, Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan regulatory assistance yang optimal, meningkatkan kualitas produk yang beredar, serta membangun sinergi dengan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penguatan strategi komunikasi, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan jumlah kegiatan bimbingan yang lebih interaktif dan berbasis kebutuhan industri dapat menjadi langkah strategis ke depan.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	758,121,000	758,114,346	100.00	100.50	Efisien

Deputi II BPOM menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dengan capaian kinerja sebesar 100,50% dan penggunaan anggaran 100%. Meskipun seluruh anggaran telah digunakan, hasil yang dicapai tetap melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan layanan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha. Efisiensi ini mencerminkan keberhasilan strategi Deputi II BPOM dalam mengalokasikan anggaran

untuk berbagai program regulatory assistance, termasuk bimbingan teknis, sosialisasi, serta penguatan jejaring pengawasan. Dengan hasil ini, Deputi II BPOM telah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kepuasan dan pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi regulasi.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) tahun 2024 sebesar 95,28% dari target 94,80% dengan capaian kinerja 100,50% menunjukkan bahwa program bimbingan dan pembinaan Deputi II BPOM telah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai kegiatan strategis yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi regulasi. Sosialisasi regulasi dan peningkatan kompetensi petugas registrasi berperan penting dalam memastikan bahwa pelaku usaha memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai persyaratan registrasi dan pemenuhan dossier. Selain itu, Bimbingan Teknis terkait penggunaan fasilitas bersama bagi UKOT serta pembekalan kepada pelaku usaha distribusi memberikan dukungan teknis dan operasional yang diperlukan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Percepatan pelayanan publik melalui Desk CAPA dan Desk Konsultasi telah mempercepat proses sertifikasi CPOTB dan CPKB, sehingga mendukung peningkatan kepuasan pelaku usaha. Verifikasi teknis permohonan SKI pada sarana importir kosmetik juga menjadi faktor penunjang yang memastikan kelancaran dalam proses impor bahan baku dan produk jadi yang memenuhi standar BPOM.

Meskipun capaian kinerja berada di atas target, masih terdapat ruang perbaikan untuk semakin meningkatkan kepuasan pelaku usaha. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih adanya kendala administratif dalam pemrosesan izin dan sertifikasi, serta keterbatasan sumber daya dalam layanan konsultasi yang dapat menyebabkan antrean panjang. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan optimalisasi digitalisasi pelayanan bimbingan, seperti penguatan sistem e-desk konsultasi dan webinar interaktif agar pelaku usaha dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga pendamping dan fasilitator registrasi di tingkat daerah dapat membantu mempercepat proses pemenuhan regulasi bagi UMKM. Ke depan, Deputi II BPOM diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif dalam program bimbingan dan pembinaan,

guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif, kompetitif, dan tetap patuh terhadap regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

6. IKSP 6: Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, Deputi II BPOM terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Berbagai program pengawasan pre-market dan post-market telah dilaksanakan secara intensif, termasuk pengawasan terhadap produksi dan distribusi, penelusuran produk ilegal, serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilihan produk yang aman. Dampak dari upaya tersebut perlu diukur untuk mengetahui efektivitas program yang dijalankan dan memastikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam mengawasi produk yang beredar di pasaran.

Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Indeks ini menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dengan adanya pengukuran ini, BPOM dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan perlindungan konsumen. Selain itu, hasil indeks ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan serta inovasi kebijakan pengawasan agar lebih adaptif terhadap tantangan industri dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi pengawasan, dan mengoptimalkan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran serta kepuasan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,00	83,18	103,98	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan target sebesar 80,00 dan realisasi mencapai 93,18, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 103,98%. Hasil ini mencerminkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, termasuk dalam pengawasan pre-market dan post-market, edukasi publik, serta perlindungan konsumen terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 22 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	86.00	70.90	82.44	Cukup
2021	73.00	68.64	94.03	Cukup
2022	75.00	75.96	101.28	Sangat Baik
2023	77.00	79.90	103.77	Sangat Baik
2024	80.00	83.18	103.98	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian masih dalam kategori cukup, dengan capaian kinerja masing-masing 82,44% dan 94,03%. Namun, mulai tahun 2022, capaian kinerja meningkat ke kategori sangat baik, dengan capaian 101,28% di tahun 2022, 103,77% di tahun 2023, dan 103,98% di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan dan edukasi masyarakat yang diterapkan oleh Deputi II BPOM, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

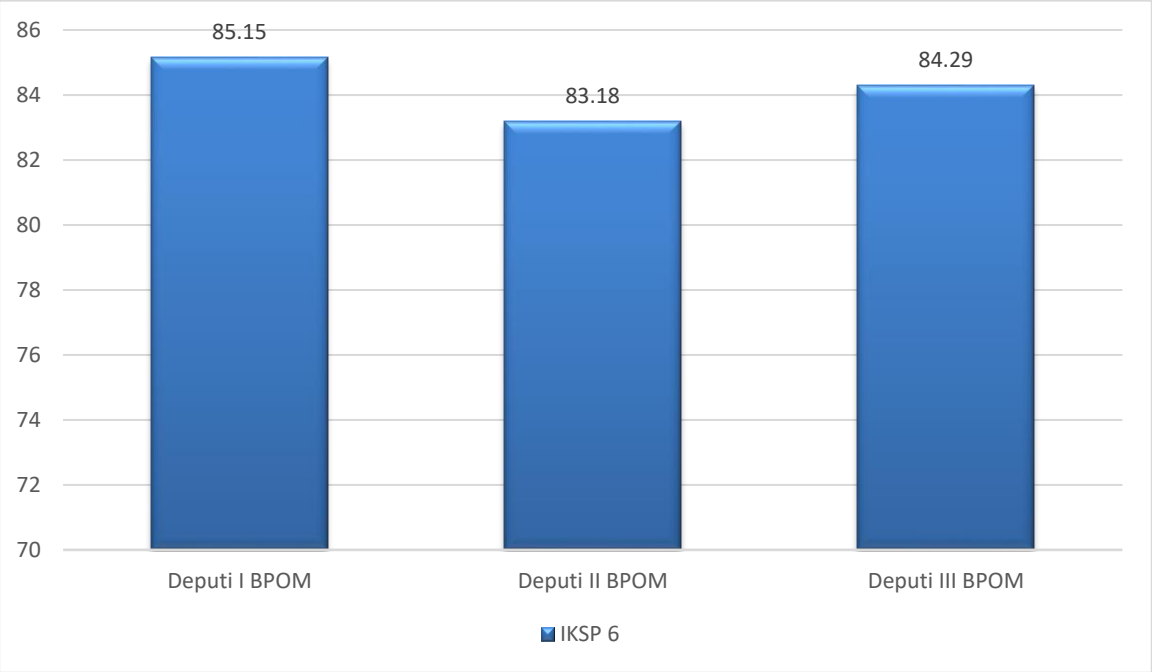

Gambar 10 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 6 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi 83,18, sementara Deputi I BPOM memperoleh nilai 85,15, dan Deputi III BPOM sebesar 84,29. Meskipun capaian Deputi II sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Deputi I dan III, angka ini tetap menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan. Perbedaan ini dapat menjadi dasar untuk peningkatan strategi pengawasan, edukasi, dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal di masa mendatang.

Analisis terhadap keberhasilan

Pengukuran yang dilakukan terhadap 20.610 responden mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM. Secara spesifik, kepuasan masyarakat atas pengawasan Obat Tradisional memperoleh nilai 83,03 (kategori puas), kepuasan atas pengawasan Suplemen Kesehatan mencapai 83,13 (puas), dan kepuasan terhadap pengawasan Kosmetik meraih 83,37 (puas).

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program-program pengawasan yang telah dijalankan BPOM, baik dari aspek pemantauan produk di pasar, pengawasan pre-market dan post-market, serta peningkatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan dan mutu produk. Hasil ini juga menunjukkan bahwa upaya BPOM dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, memastikan ketersediaan produk yang aman di pasaran, serta membangun kepercayaan melalui transparansi informasi telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,207,074,000	1,207,068,083	100.00	103.98	Efisien

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2024 menunjukkan hasil 103,98%, dengan penggunaan anggaran sebesar 100,00%, yang mengindikasikan efisiensi dalam pelaksanaan program. Efisiensi ini mencerminkan bahwa anggaran yang digunakan telah menghasilkan kinerja yang optimal, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan berbagai strategi yang diterapkan, seperti peningkatan pengawasan berbasis risiko, intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2024 mencapai 83,18, melampaui target 80,00 dengan capaian kinerja 103,98%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program pengawasan dan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM. Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online menjadi salah satu strategi penting dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terpapar promosi produk yang menyesatkan. Selain itu, pengawasan keamanan serta pembahasan laporan efek samping Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan

(SK) telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang diterapkan BPOM.

Lebih lanjut, peningkatan kompetensi petugas UPT BPOM dalam mengevaluasi hasil pengawasan iklan dan penandaan produk turut mendukung ketepatan regulasi yang diterapkan. Pengawasan ketat terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya juga menjadi langkah signifikan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Workshop penguatan pengawasan kosmetik bagi petugas berperan dalam meningkatkan pemahaman dan keahlian petugas lapangan dalam mendeteksi serta menangani produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Meski demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, diperlukan upaya optimalisasi sinergi lintas sektor, peningkatan kecepatan dalam merespons temuan di lapangan, serta perluasan cakupan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran dan kepuasan terhadap pengawasan BPOM semakin meningkat.

7. IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tabel 23 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45	91.03	100.64	Sangat Baik

Pada tahun 2024, **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik** menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan **realisasi sebesar 91,03**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **90,45**, sehingga capaian kinerja mencapai **100,64%**. Capaian ini mencerminkan bahwa layanan publik yang diberikan Deputi II BPOM telah memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal kualitas, efisiensi, dan responsivitas. Hasil ini juga menunjukkan efektivitas berbagai program peningkatan layanan publik, termasuk optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kompetensi

petugas, serta upaya proaktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 24 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	82.83	84.46	101.97	Sangat Baik
2021	83.50	84.25	100.90	Sangat Baik
2022	84.38	87.05	103.16	Sangat Baik
2023	85.25	89.99	105.56	Sangat Baik
2024	90.45	91.03	100.64	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terus menunjukkan tren positif dengan capaian kinerja yang selalu berada dalam kategori "Sangat Baik". Realisasi kinerja setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan peningkatan signifikan dari 84,46 pada tahun 2020 menjadi 91,03 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas berbagai program perbaikan layanan publik, termasuk peningkatan transparansi, optimalisasi pelayanan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang cepat, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat serta pelaku usaha. Capaian pada tahun 2024 sebesar 100,64% menegaskan bahwa Deputi II BPOM berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

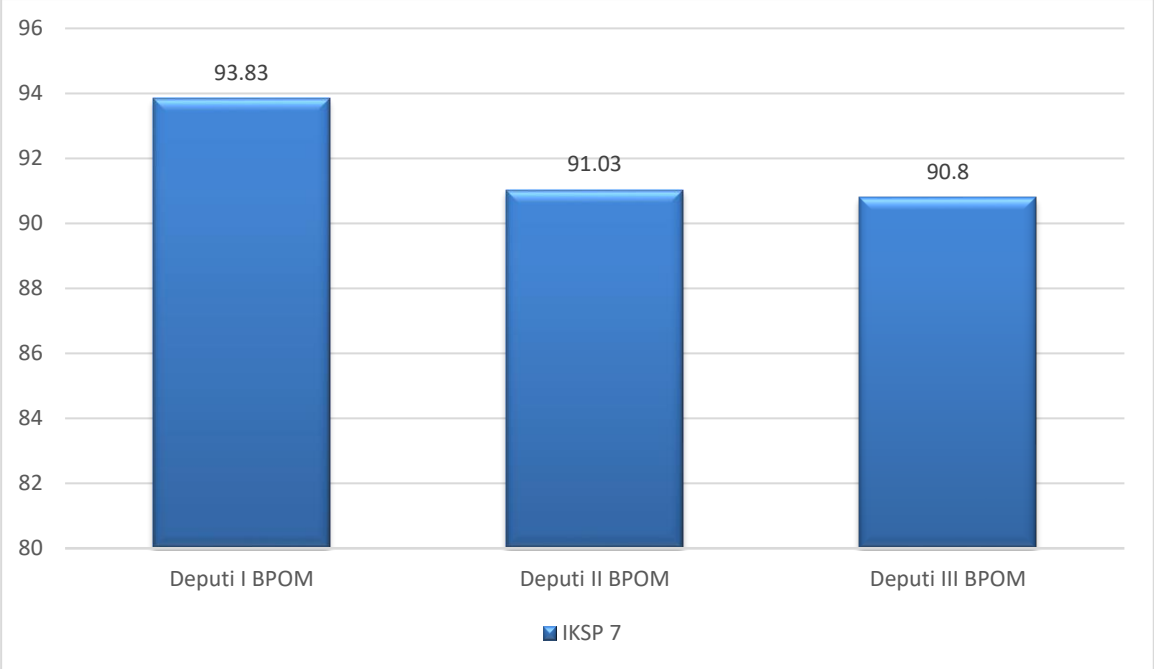

Gambar 11 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 7 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi sebesar 91,03, yang berada di antara Deputi I BPOM (93,83) dan Deputi III BPOM (90,80). Meskipun Deputi II BPOM menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memberikan layanan publik, hasil ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam aspek efisiensi pelayanan, responsivitas, dan kepuasan masyarakat. Deputi I BPOM yang memperoleh nilai tertinggi menunjukkan standar layanan yang lebih optimal, yang dapat menjadi referensi bagi Deputi II BPOM dalam meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Analisis terhadap keberhasilan

Deputi II BPOM telah mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan hasil yang sangat baik, mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lima unit kerja di bawahnya. Pengukuran kinerja pelayanan publik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh unit kerja berhasil memenuhi dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Direktorat Standardisasi OTSKK mencatat capaian 101,04% dengan realisasi 91,19, menunjukkan efektivitas layanan dalam pemberian layanan kajian dan konsultasi regulasi. Direktorat Registrasi OTSKK mencapai 100,94% dengan realisasi 90,34, mencerminkan kemudahan dan ketepatan dalam proses registrasi. Direktorat Pengawasan OTSK memperoleh capaian tertinggi 100,07% dengan realisasi 91,81, menandakan efektivitas pelayanan dalam sertifikasi

CPOTB dan Perizinan Ekspor / Impor terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Selain itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik mencatat 100,94% dengan realisasi 87,82, yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam sertifikasi dan Perizinan Ekspor / Impor kosmetik. Direktorat PMPU OTSKK memperoleh 100,28% dengan realisasi 94,01. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil menjaga kualitas layanan publiknya melalui berbagai strategi, seperti optimalisasi pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi dengan lintas sektor.

Tabel 25 : Capaian Kinerja Unit Kerja di Deputi II BPOM tahun 2024

Unit Kerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
Dit. Standardisasi OTSKK	90,25	91,19	101,04
Dit. Registrsasi OTSKK	89,50	90,34	100,94
Dit. Pengawasan OTSK	91,75	91,81	100,07
Dit. Pengawasan Kosmetik	87,00	87,82	100,94
Dit. PMPU OTSKK	93,75	94,01	100,28
Deputi II BPOM	90,45	91,03	100,64

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.325.890.000	1.325.886.035	100,00	100,64	Efisien

Efisiensi pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat dikategorikan sebagai efisien, dengan capaian kinerja 100,64% dari target yang ditetapkan, sementara penggunaan anggaran mencapai 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa alokasi sumber daya yang telah digunakan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan. Deputi II BPOM berhasil mengelola anggaran secara efektif untuk mendukung berbagai inisiatif pelayanan, termasuk peningkatan akses layanan, percepatan proses perizinan, serta peningkatan kualitas komunikasi dan informasi bagi masyarakat.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai program strategis untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, yang mencerminkan efektivitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang diberikan. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik, termasuk Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik, yang bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengawasan dan memastikan mutu serta keamanan produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional melalui peningkatan koordinasi lintas sektor telah memperkuat ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan kondusif bagi pelaku usaha. Upaya ini diperkuat dengan Optimalisasi Pelayanan Publik Sertifikasi Kosmetik yang dilakukan melalui perluasan peran UPT BPOM dan dukungan dari asosiasi pelaku usaha, sehingga memberikan akses yang lebih luas dan efisien dalam proses sertifikasi kosmetik.

Selain peningkatan koordinasi lintas sektor, Deputi II BPOM juga berfokus pada Peningkatan Kualitas Sarana Layanan Publik, dengan memperbarui fasilitas layanan agar lebih nyaman dan ramah pengguna. Perkuatan koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus utama dalam Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan efisiensi proses perizinan. Workshop Pelayanan Prima dan SDM turut diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang cepat, responsif, dan profesional. Meskipun berbagai upaya telah menunjukkan hasil yang positif, masih diperlukan inovasi lebih lanjut, seperti digitalisasi layanan, penyederhanaan proses birokrasi, serta peningkatan responsivitas terhadap umpan balik masyarakat, guna mempertahankan dan meningkatkan kepuasan layanan publik secara berkelanjutan.

8. IKSP 8: Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tabel 26 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas kebijakan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,37	85,38	100,01	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 85,38 dari target 85,37, menghasilkan capaian kinerja 100,01%. Hasil ini mencerminkan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Deputi II BPOM dalam mengawasi dan mengatur produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik guna memastikan keamanan, mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah dirancang secara komprehensif, berbasis bukti, dan relevan dengan melibatkan pelaku usaha serta mempertimbangkan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 27 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	81.00	87.53	108.06	Sangat Baik
2021	88.00	87.53	99.47	Cukup
2022	89.00	79.73	89.58	Cukup
2023	83.70	85.38	102.01	Sangat Baik
2024	85.37	85.38	100.01	Sangat Baik

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), **Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik** menunjukkan fluktuasi kinerja dengan tren peningkatan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai **108,06%** dengan kategori **sangat baik**, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian **99,47%** dan **89,58%**, masuk

dalam kategori **cukup**. Kinerja kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian **102,01%** dan **100,01%**, menunjukkan efektivitas kebijakan yang lebih optimal dan berada dalam kategori **sangat baik**. Tren ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

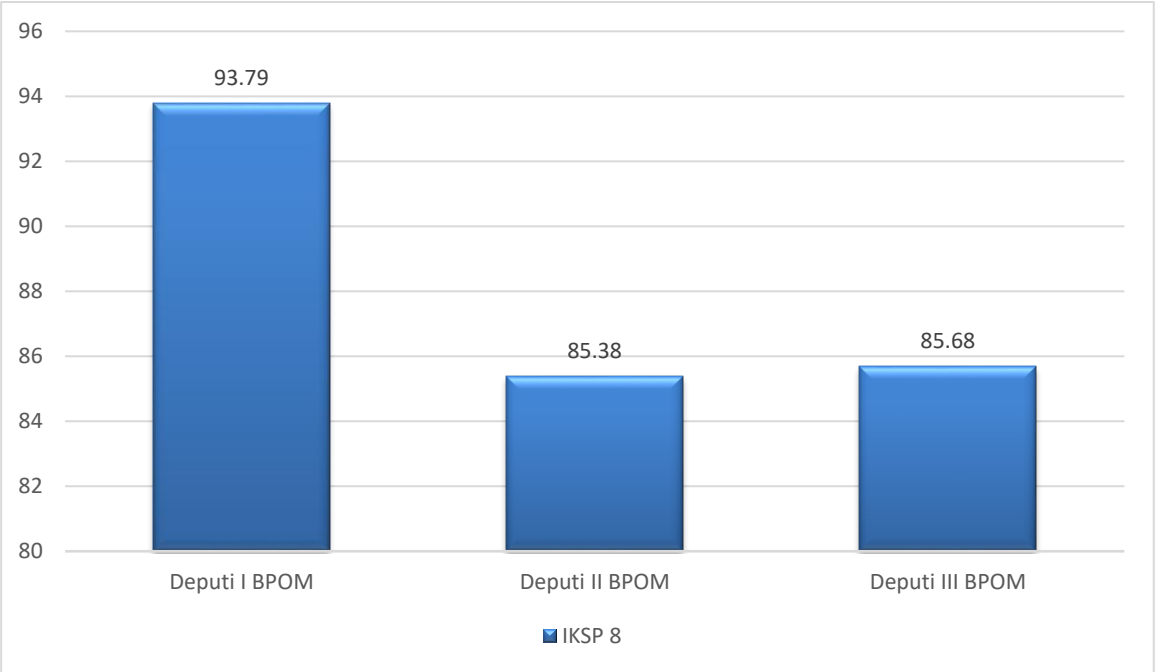

Gambar 12 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 8 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi 85,38, yang berada di bawah Deputi I BPOM dengan 93,79, namun mendekati capaian Deputi III BPOM sebesar 85,68. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengawasan di Deputi II telah mencapai kategori sangat baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam optimalisasi efektivitas regulasi dan implementasi kebijakan agar semakin adaptif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat.Analisis terhadap keberhasilan

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.679.197.000	3.679.191.505	100,00	100,01	Efisien

Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang efisien, dengan realisasi kinerja 100,01% dari target yang ditetapkan, sementara penggunaan anggaran mencapai 100,00%. Efisiensi ini mencerminkan bahwa setiap alokasi dana telah digunakan secara optimal untuk menghasilkan kebijakan pengawasan yang berkualitas. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa program regulasi dan pengawasan yang telah dirancang berjalan sesuai rencana tanpa pemborosan anggaran.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja 100,01% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang telah dilaksanakan, seperti brainstorming dan perencanaan penyusunan standar, kajian keamanan, mutu, dan manfaat di bidang obat tradisional, kosmetik, serta suplemen kesehatan, serta partisipasi aktif dalam Sidang ASEAN *Cosmetic Committee* dan *Traditional Medicine and Health Supplemen Product Working Group Meeting*. Selain itu, review dan penyusunan standar di berbagai bidang turut memperkuat kerangka regulasi yang mendukung efektivitas pengawasan. Sosialisasi regulasi di berbagai sektor juga menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan konsumen. Beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan intensitas kajian berbasis data yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi dengan sektor industri dalam proses penyusunan

kebijakan, serta pengembangan sistem digital dalam penyebarluasan regulasi agar lebih mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam regulasi dan harmonisasi standar internasional juga perlu menjadi fokus ke depan, guna memastikan bahwa kebijakan pengawasan tetap relevan, efektif, dan berdampak langsung dalam meningkatkan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

9. IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pengukuran ini memberikan jaminan bahwa produk-produk tersebut aman untuk digunakan dan bermutu tinggi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Produk yang dianggap aman dan bermutu harus memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup: 1) Nomor Izin Edar/Produk Ilegal: Memastikan produk memiliki izin edar resmi dan tidak termasuk produk ilegal atau palsu; 2) Kedaluwarsa dan Kerusakan: Memastikan produk tidak melewati tanggal kedaluwarsa dan dalam kondisi baik; 3) Label dan Penandaan: Memastikan label dan penandaan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen. 4) Pengujian Laboratorium: Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan produk bebas dari bahan berbahaya dan sesuai dengan standar kualitas. Metode sampling yang digunakan adalah targeted/purposive sampling, yang bertujuan untuk secara khusus menilai produk-produk yang berisiko tinggi atau berpotensi masalah, guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Indikator ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan berstandar tinggi, BPOM dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, memastikan bahwa produk yang digunakan masyarakat aman dan memenuhi standar mutu yang tinggi. Adapun target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,50	90,68	98,03	cukup

Pada tahun 2024, **indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan** mencatat **realisasi kinerja sebesar 90,68%** dari **target yang ditetapkan sebesar 92,50%**, dengan capaian kinerja mencapai **98,03%**, yang masuk dalam kategori **cukup**. Meskipun belum mencapai target yang ditentukan, hasil ini tetap menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Perbaikan dan intensifikasi pengawasan, terutama terhadap produk yang tidak memenuhi standar, masih diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal di masa mendatang.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	86.00	90.68	105.44	Sangat Baik
2021	91.00	88.50	97.25	Cukup
2022	91.50	83.63	91.40	Cukup
2023	92.00	90.72	98.61	Cukup
2024	92.50	90.68	98.03	Cukup

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan mengalami fluktuasi dalam capaian kinerjanya. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 90,68%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,00%, dengan capaian 105,44%, yang dikategorikan sangat baik. Namun, pada 2021 dan 2022, capaian mengalami penurunan dengan kategori cukup, masing-masing sebesar 97,25% dan 91,40%, menandakan adanya tantangan dalam

pengawasan mutu produk. Pada 2023, realisasi meningkat kembali menjadi 90,72%, dengan capaian 98,61%, dan di tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi 92,50%, realisasi masih berada pada angka 90,68%, dengan capaian 98,03%, tetap dalam kategori cukup. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan namun masih memerlukan upaya intensifikasi dalam pengawasan untuk mencapai target yang lebih tinggi secara konsisten.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

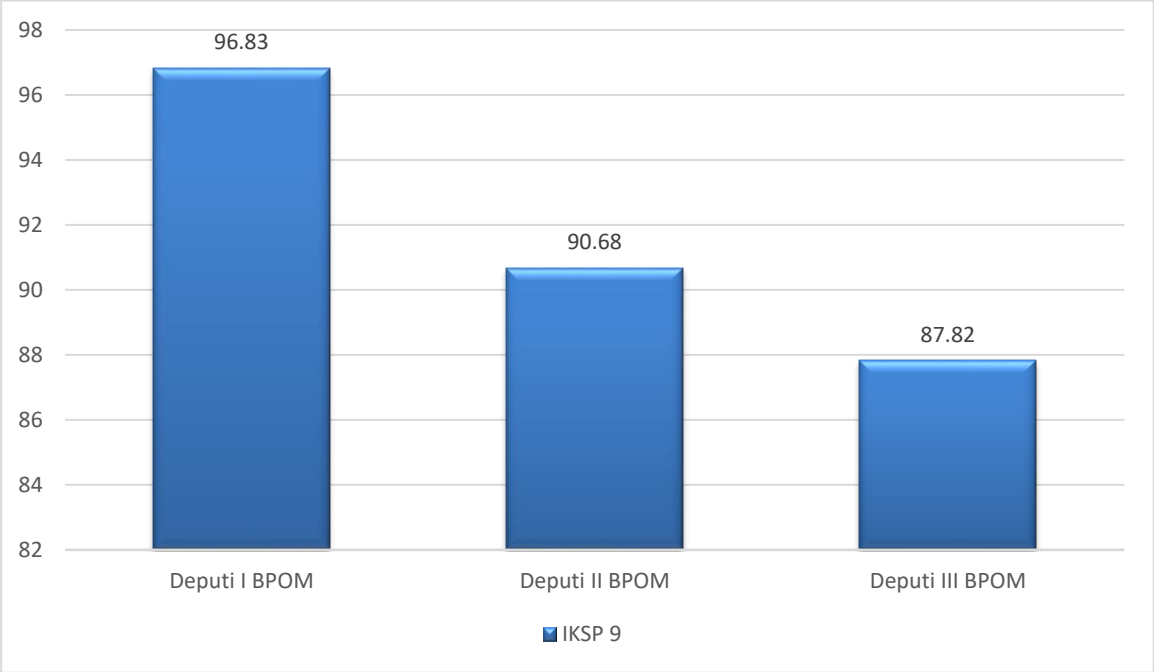

Gambar 13 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 9 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi 90,68%, yang berada di bawah Deputi I BPOM dengan capaian tertinggi 96,83%, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi III BPOM yang mencapai 87,82%. Perbedaan ini mencerminkan efektivitas pengawasan di masing-masing bidang, di mana Deputi I BPOM, yang menangani obat dan zat adiktif, memiliki pengawasan yang lebih ketat dan standar kepatuhan yang lebih tinggi. Sementara itu, Deputi III BPOM, yang membidangi pangan olahan, masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemenuhan standar mutu. Deputi II BPOM, yang berfokus pada obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, perlu terus meningkatkan efektivitas pengawasan untuk mencapai standar yang lebih optimal dalam memastikan keamanan dan mutu produk.

Analisis terhadap kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai capaian kinerja ini, Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan yang dilakukan berupa Forum Komunikasi Fasilitator registrasi, Peningkatan kompetensi petugas BPOM dan UPT dalam Pendampingan monitoring Efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan.
2. Pengawasan Berbasis Risiko: Menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko, di mana produk-produk yang berisiko tinggi mendapatkan prioritas pengawasan lebih ketat. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan berupa Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetik, Intensifikasi Pengawasan Post Market penandaan kosmetik,
3. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk. Program edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa: Bimbingan Teknis CUKB, Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik, Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi *Beauty Enthusiast*), KIE dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik, pendampingan pelaku usahadalam pelaksanaan uji pra klinik dan uji klinik.
4. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa Bimbingan Teknis CUKB kepada peneliti, KomisiE tik, Sponsor dan Organisasi Riset Kontrak.
5. Inspeksi dan Sampling: Melakukan inspeksi rutin dan sampling produk di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Produk yang tidak memenuhi syarat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penanganan Aduan Konsumen: Menerima dan menindaklanjuti aduan dari konsumen mengenai produk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini membantu

dalam identifikasi cepat produk bermasalah dan tindakan korektif yang diperlukan.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	3.107.281.000	3.107.263.700	100,00	98,03	Tidak Efisien

Efisiensi kegiatan Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang digunakan telah mencapai 100,00%, realisasi capaian kinerja hanya sebesar 98,03%, sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya yang digunakan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakefisienan ini antara lain karena adanya blokir anggaran, serta kendala dalam proses sampling dan pengujian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengawasan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan sinergi dengan pelaku usaha dan lintas sektor guna meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi tanpa mengorbankan efisiensi sumber daya.

Analisis program kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat, Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta penguatan kapasitas pengawasan. Program Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, dan organisasi riset kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa uji klinis dan pengembangan produk dilakukan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha diadakan guna meningkatkan

pemahaman industri terkait regulasi, sehingga produk yang didaftarkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha turut diperkuat sebagai upaya pemantauan keamanan pasca-pemasaran guna mendeteksi potensi efek samping yang muncul dari penggunaan produk. Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi juga menjadi strategi kunci dalam memperkuat pendampingan terhadap UMKM Start-Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi, agar mereka lebih siap dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko menjadi langkah krusial dalam mendeteksi potensi pelanggaran, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan dengan memperluas cakupan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Program edukasi publik, seperti Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast) dan Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang, telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi perlu lebih banyak inovasi dalam pendekatan edukasi agar pesan yang disampaikan lebih efektif. Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, diperlukan optimalisasi pengawasan post-market, peningkatan pendampingan terhadap UMKM berbasis kearifan lokal, serta penguatan peran tenaga medis dalam Monitoring Efek Samping OT dan SK. Selain itu, peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) harus menjadi prioritas agar mutu dan keamanan produk yang beredar dapat terus terjaga.

Penyebab Belum Tercapainya Realisasi dan Upaya Perbaikan yang akan dilakukan:

a. **Kurangnya Kepatuhan Pelaku Usaha** Masih ada pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, baik karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan intensitas pelatihan serta pendampingan teknis.
b. **Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan** Keterbatasan sumber daya manusia dan alat pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Deputi II BPOM perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan meningkatkan kapasitas laboratorium.
c. **Distribusi Produk Ilegal** Masih ada produk ilegal yang beredar di pasar. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan kerjasama yang lebih erat dengan

aparat penegak hukum dan peningkatan intensitas operasi penertiban produk ilegal.

10. IKSP 10: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pengawasan Deputi II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor menunjukkan seberapa efektif kolaborasi dan sinergi antara BPOM dengan instansi lain dalam menegakkan regulasi dan memastikan keamanan produk. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus yang mencakup hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Indikator ini mencerminkan tingkat respons dan tindakan yang diambil oleh berbagai sektor terhadap rekomendasi yang diberikan. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerjasama yang kuat antara BPOM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa langkah-langkah korektif dan preventif dilaksanakan dengan baik. Dengan mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, BPOM dapat mengevaluasi efektivitas strategi pengawasannya dan menentukan area yang memerlukan peningkatan. Adapun target dan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor	82,50	83,94	101,75	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 101,75%. Dari target yang ditetapkan sebesar 82,50, realisasi kinerja berhasil mencapai 83,94. Hasil ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan sinergi antara Deputi II BPOM dengan berbagai pemangku kepentingan dalam

menindaklanjuti hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan ini juga menunjukkan peningkatan kesadaran dan komitmen lintas sektor dalam mendukung upaya pengawasan, sehingga dapat memastikan produk yang beredar di masyarakat semakin aman dan memenuhi standar yang telah ditetapkan

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 31 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	66.00	75.82	114.88	Sangat Baik
2021	76.00	81.20	106.84	Sangat Baik
2022	78.00	82.43	105.68	Sangat Baik
2023	80.00	82.10	102.63	Sangat Baik
2024	82.50	83.94	101.75	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor menunjukkan tren capaian kinerja yang konsisten sangat baik. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 75,82 dari target 66,00, dengan capaian 114,88%. Kinerja terus meningkat setiap tahunnya, dengan realisasi 81,20 pada 2021, 82,43 pada 2022, 82,10 pada 2023, hingga mencapai 83,94 di tahun 2024 dengan capaian 101,75% dari target 82,50. Data ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor yang semakin solid dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, menunjukkan peningkatan kepatuhan dan komitmen berbagai pihak dalam memastikan keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

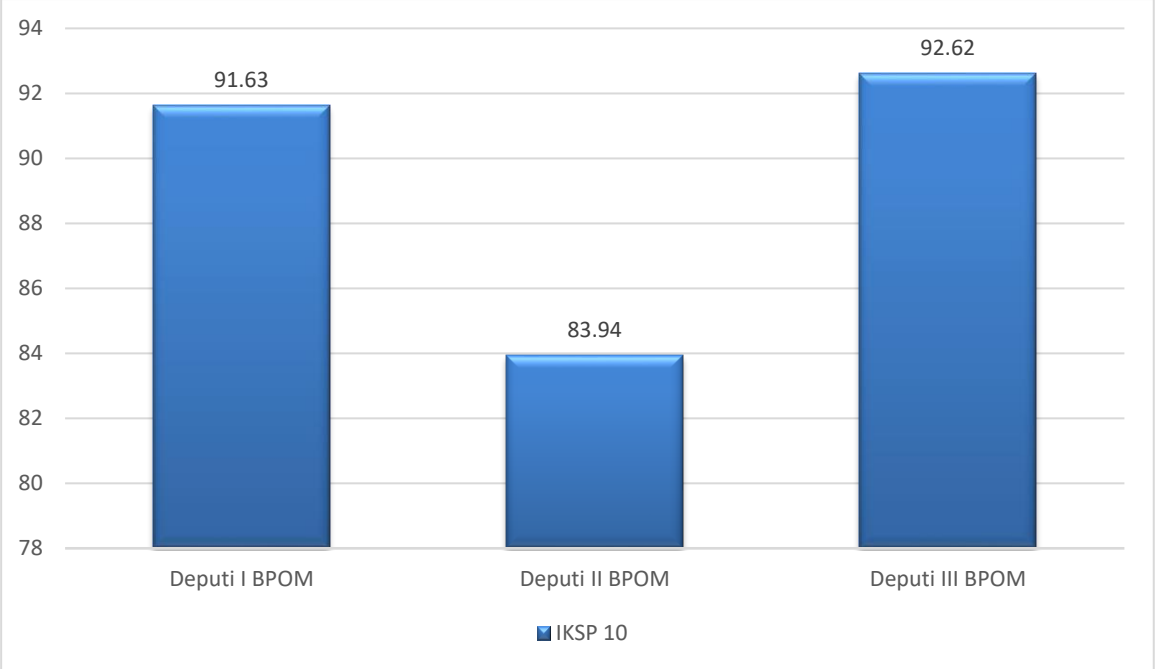

Gambar 14 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 10 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor antara satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencapai 83,94, sementara Deputi I BPOM memiliki capaian lebih tinggi sebesar 91,63, dan Deputi III BPOM mencapai 92,62. Meskipun Deputi II BPOM menunjukkan hasil yang sangat baik dalam koordinasi lintas sektor, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Deputi I dan Deputi III.

Analisis terhadap keberhasilan

Pada tahun 2024 ini terdapat 1.563 rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor (terdiri dari 815 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 748 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik), dengan hasil sebanyak 1.312 rekomendasi telah ditindak lanjuti (83,94%), terdiri dari 669 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 748 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik.

Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan BPOM ditindaklanjuti oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM bisa berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus terkait hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan

pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Upaya-upaya yang telah diilakukan untuk mencapai target ini, yaitu melalui berbagai upaya, antara lain:

a. Kolaborasi Intensif dengan Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lain, sektor industri, dan organisasi masyarakat untuk memastikan tindak lanjut yang efektif terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II, Monitoring dan kordinasi pengawasan, pemantapan kerja pengawasan dan peninkatan kerjasama lintas sektor.
b. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan tentang pentingnya mematuhi rekomendasi BPOM guna memastikan keamanan dan kualitas produk.
c. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang direkomendasikan.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1.585.187.000	1.585.177.403	100,00	101,75	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 101,75% sehingga kegiatan ini dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 83,94% dari target 82,50% dan capaian kinerja mencapai 101,75%. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Selain itu, kegiatan Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan berperan penting dalam memastikan hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor juga menjadi faktor utama dalam memperkuat respons lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Deputi II BPOM.

Namun, meskipun capaian kinerja sudah melampaui target, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar tindak lanjut rekomendasi dapat lebih cepat dan menyeluruh. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan mencakup penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi, peningkatan sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara real-time, serta pengembangan standar prosedur kerja yang lebih terstruktur untuk memastikan rekomendasi pengawasan tidak hanya ditindaklanjuti, tetapi juga menghasilkan dampak positif dalam pengendalian peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Dengan strategi yang lebih proaktif dan sistematis, efektivitas tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh lintas sektor dapat terus ditingkatkan, sehingga pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik menjadi lebih optimal dan berdampak nyata dalam melindungi masyarakat.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Beberapa manfaat dari capaian ini antara lain:

a. Peningkatan Kepatuhan: Pelaku usaha lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga produk yang beredar di pasar lebih aman dan bermutu.

b. Penguatan Sistem Pengawasan: Kolaborasi yang efektif memperkuat sistem pengawasan BPOM, memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat terhadap produk yang tidak memenuhi standar.
c. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat dan rekomendasi tindak lanjut yang efektif.

11. IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas dalam Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan sinergi dengan berbagai sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan, memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak. Pengukuran kinerja melalui indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana kerjasama antara BPOM dan sektor-sektor terkait berjalan dengan baik, serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Deputi II BPOM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Dengan melakukan sinergitas yang kuat, Deputi II BPOM dapat memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengukuran kinerja dengan indikator ini juga memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan lintas sektor dalam mendukung UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia. Adapun capaian dan target kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas Dalam Rangka Pendampingan UMKM Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,00	94,12	102,30	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencapai 94,12% dari target yang ditetapkan sebesar 92,00%, dengan capaian kinerja sebesar 102,30%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya Deputi II BPOM dalam memperkuat kolaborasi dengan lintas sektor dalam mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 33 : Perbandingan Capaian Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas Dalam Rangka Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	80.00	80.00	100.00	Sangat Baik
2022	82.00	83.75	102.13	Sangat Baik
2023	84.00	91.67	109.13	Sangat Baik
2024	92.00	94,12	102,30	Sangat Baik

Dalam lima tahun terakhir, Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dimulai pada tahun 2021 dengan capaian 100,00%, indikator ini terus mengalami peningkatan, mencapai 102,13% pada tahun 2022 dan 109,13% pada

tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian kinerja sebesar 102,30% menunjukkan bahwa Deputi II BPOM tetap berhasil menjaga dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di sektor ini. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan efektivitas strategi penguatan sinergitas, yang terus dipertahankan di tahun 2024 dengan hasil yang sangat baik.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

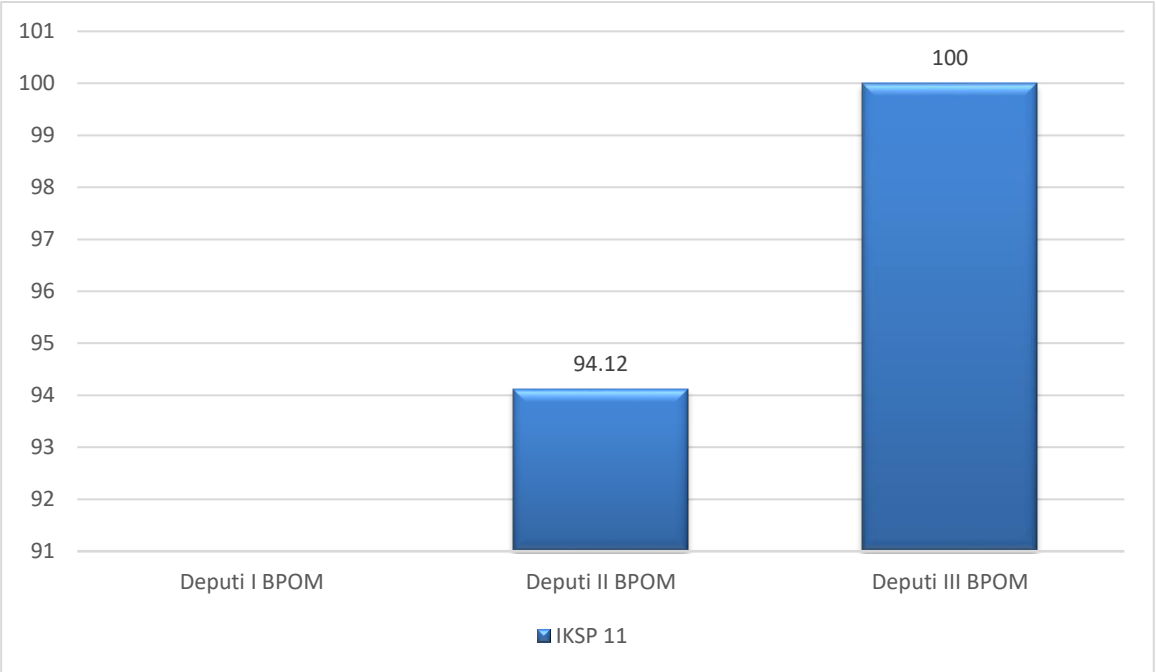

Gambar 15 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 11 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi II BPOM mencatat realisasi 94,12%, sementara Deputi III BPOM mencapai 100%. Deputi I BPOM tidak memiliki data yang dapat dibandingkan untuk indikator ini. Capaian Deputi II menunjukkan keberhasilan dalam membangun sinergi dengan lintas sektor, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai tingkat optimal seperti yang diraih oleh Deputi III.

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Deputi II BPOM telah melalukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah: Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk memastikan program pendampingan yang komprehensif, melalui kegiatan Sinergitas lintas sektor dalam mendukung wellness tourism.
b. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada UMKM dalam hal inovasi dan peningkatan kualitas produk. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pembentukan dan pemberdayaan Duta Kosmetik / jamu aman dalam rangka BPOM *Goes to School*.
c. Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah: Mengajak organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendampingan dan pemberdayaan.
d. Program Edukasi dan Pelatihan: Menyelenggarakan berbagai program edukasi dan pelatihan yang melibatkan lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu.
e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program pendampingan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi UMKM dan masyarakat.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	1.257.526.000	1.257.518.936	100,00	102,30	Efisien

Efisiensi dalam pelaksanaan Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan hasil yang optimal, dengan penggunaan anggaran sebesar 100,00% dan capaian kinerja sebesar

102,30%, yang tergolong efisien. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi Deputi II BPOM dalam membangun sinergi dengan lintas sektor melalui koordinasi yang baik, optimalisasi sumber daya, serta implementasi program yang tepat sasaran. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kolaborasi dan pendampingan bagi UMKM, guna meningkatkan daya saing dan kepatuhan terhadap regulasi.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan dalam mencapai target Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik didukung oleh berbagai program strategis yang melibatkan kerja sama dengan lintas sektor. Kegiatan seperti Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik/Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus, Sinergisitas Bersama Lintas Sektor dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OT, SK, dan Kosmetika, serta Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism telah berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat jejaring kerja sama dalam mendukung pengembangan UMKM dan industri yang berorientasi pada standar keamanan dan mutu.

Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam memperluas cakupan sinergi dengan sektor lain yang lebih luas, termasuk sektor pariwisata, akademisi, serta komunitas berbasis ekonomi kreatif. Upaya yang perlu dilakukan ke depan mencakup penguatan koordinasi dalam perencanaan lintas sektor, peningkatan intensitas kolaborasi dengan lebih banyak mitra strategis, serta optimalisasi program edukasi dan pemberdayaan berbasis digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas sinergitas lintas sektor dalam mendukung UMKM dan pemberdayaan masyarakat dapat semakin meningkat, serta memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang berdaya saing tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk mendukung UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa manfaat dari sinergitas lintas sektor ini antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas UMKM: UMKM mendapatkan akses ke sumber daya, pelatihan, dan bimbingan teknis yang membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
b. Pemberdayaan Masyarakat: Program-program pendampingan dan pemberdayaan yang melibatkan berbagai sektor membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi.
c. Keberlanjutan Program: Sinergitas lintas sektor memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang bagi UMKM dan masyarakat.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam menjalin sinergitas lintas sektor yang efektif dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, namun memerlukan upaya yang cukup kuat agar target tahunan 2024 dapat tercapai. Dengan terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya, sehingga target tahunan 2024 dapat tercapai, untuk memastikan bahwa UMKM dan masyarakat mendapatkan dukungan yang maksimal dalam mengembangkan produk yang aman dan bermutu tinggi.

12. IKSP 12: Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Pelaksanaan program KIE ini dilakukan melalui tiga model utama: secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, serta menggunakan media sosial.

a. Model Langsung: Melibatkan kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan sosialisasi di komunitas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan penjelasan yang mendetail dan menjawab pertanyaan secara langsung.
b. Media Cetak dan Elektronik: Menggunakan brosur, pamflet, televisi, dan radio untuk menyebarkan informasi secara luas dan mencapai audiens yang lebih besar.
c. Media Sosial: Memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan lebih terhubung secara digital, serta menyediakan konten yang mudah diakses dan dibagikan.

Program KIE bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan yang beragam, BPOM berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa pesan-pesan penting mengenai keamanan dan kualitas produk dapat tersampaikan dengan efektif.

Tabel 34 : Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Efektivitas KIE tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	99,20	99,27	100,07	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 99,27 dari target 99,20, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,07%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan, khasiat, dan mutu produk. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dilakukan melalui berbagai platform telah diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 35 : Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	71.00	93.33	131.45	Tidak dapat disimpulkan
2021	92.34	91.09	98.65	Cukup
2022	94.19	95.70	101.60	Sangat Baik
2023	96.08	98.31	102.32	Sangat Baik
2024	99.20	99.27	100.07	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren pencapaian yang konsisten dengan kategori sangat baik pada sebagian besar tahun. Pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai 131,45%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan dengan capaian 98,65%, masuk dalam kategori cukup. Tren positif kembali terlihat pada tahun 2022 dan 2023, dengan capaian masing-masing 101,60% dan 102,32%, mencerminkan efektivitas strategi KIE yang diterapkan. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 99,27% dari target 99,20%, dengan capaian 100,07%, menunjukkan keberhasilan yang stabil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui program KIE yang efektif.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

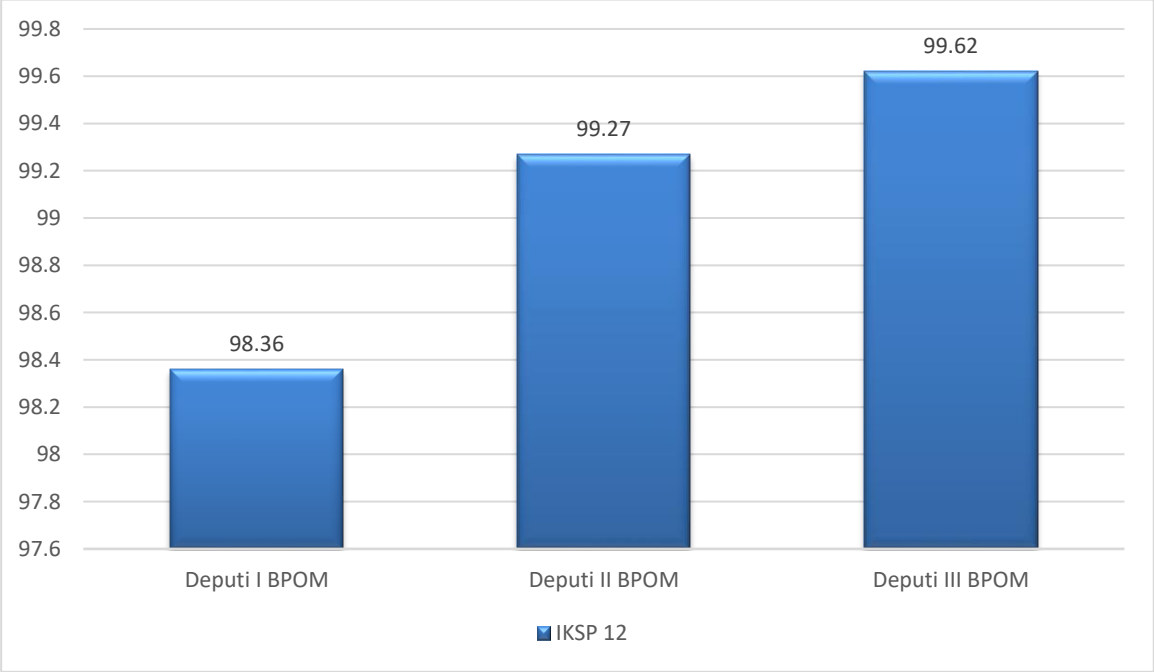

Gambar 16 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 12 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Pada tahun 2024, Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 99,27% untuk Deputi II BPOM. Jika dibandingkan dengan satuan kerja sebanding, Deputi I BPOM mencapai 98,36%, sementara Deputi III BPOM mencatatkan kinerja tertinggi dengan 99,62%. Perbedaan capaian ini mencerminkan efektivitas program KIE yang telah diterapkan masing-masing unit dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

regulasi serta keamanan produk di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Analisis terhadap keberhasilan

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam mencapai keberhasilan ini, antara lain:

a. **Pengembangan Materi KIE yang Relevan dan Menarik** Deputi II BPOM mengembangkan berbagai materi KIE yang relevan dan menarik, mencakup informasi tentang manfaat, penggunaan yang tepat, dan potensi risiko dari obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Materi ini disesuaikan dengan perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat.
b. **Kampanye KIE Melalui Berbagai Media** KIE disampaikan melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Kampanye melalui media sosial, televisi, radio, serta seminar dan lokakarya langsung di lapangan memungkinkan pesan KIE menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.
c. **Kerjasama dengan Stakeholder dan Komunitas** Deputi II BPOM menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan komunitas masyarakat. Kerjasama ini membantu dalam penyebaran informasi yang lebih efektif dan penerimaan pesan KIE yang lebih baik.
d. **Pelatihan dan Penyuluhan Langsung** Pelatihan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan ini mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, pameran kesehatan, dan kegiatan komunitas lainnya.
e. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital** Deputi II BPOM memanfaatkan teknologi dan inovasi digital untuk menyampaikan pesan KIE. Penggunaan aplikasi mobile, platform e-learning, dan situs web interaktif memungkinkan masyarakat mengakses informasi KIE dengan mudah dan cepat.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi

Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	5.074.933.000	5.074.925.630	100,00	100,07	Efisien

Pada tahun 2024, Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan efisiensi yang optimal dengan capaian kinerja sebesar 100,07%, meskipun anggaran yang digunakan mencapai 100% dari alokasi yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan KIE telah berjalan efektif dan tepat sasaran, menghasilkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait keamanan serta regulasi produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan ini mencerminkan strategi KIE yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan berbagai kanal informasi yang luas. Namun, untuk lebih meningkatkan efisiensi ke depan, perlu dilakukan optimalisasi metode edukasi digital dan kemitraan strategis guna mencapai cakupan yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 didukung oleh berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait keamanan produk. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat, KIE yang dilakukan oleh masing-masing direktorat teknis di Deputi II BPOM, serta Koordinasi Pemberdayaan OT, SK, dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk konsumen umum, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, efektivitas KIE berhasil ditingkatkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100,07%, masuk dalam kategori sangat baik.

Namun, meskipun capaian ini menunjukkan efektivitas yang tinggi, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan guna meningkatkan jangkauan dan dampak KIE. Optimalisasi digitalisasi dan penggunaan media sosial menjadi salah satu langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memperluas cakupan sosialisasi secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan sinergi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan

organisasi profesi dapat membantu memastikan bahwa materi KIE tidak hanya tersampaikan dengan baik, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Ke depan, monitoring dan evaluasi berbasis data perlu lebih ditingkatkan agar efektivitas KIE dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan tren perubahan pola konsumsi serta tantangan pengawasan di era digital.

Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa manfaat yang didapat oleh Masyarakat, diantaranya:

1. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat** Upaya KIE yang efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih produk yang mereka gunakan.
2. **Pengurangan Risiko Kesehatan** Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk yang aman dan cara penggunaannya, masyarakat dapat mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai aturan.
3. **Peningkatan Kepercayaan Konsumen** Informasi yang akurat dan terpercaya yang disampaikan melalui KIE meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diawasi oleh BPOM. Hal ini juga membantu dalam membangun citra positif BPOM sebagai lembaga pengawas yang profesional dan bertanggung jawab.
4. **Pemberdayaan Masyarakat,** KIE tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka. Pengetahuan yang didapatkan melalui KIE memungkinkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam menjaga kesehatan.
5. **Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha** Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, pelaku usaha terdorong untuk lebih patuh terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan BPOM. Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

13. IKSP 13 : Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Pelayanan Publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Deputi II BPOM. Indikator ini dirancang

untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan Deputi II BPOM dapat memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan enam aspek utama dengan bobot penilaian yang berbeda, sehingga memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kualitas layanan.

Tabel 36 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks pelayanan publik tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,71	4,89	103,82%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target 4,71, realisasi kinerja mencapai 4,89, menghasilkan capaian sebesar 103,82%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan kemudahan akses, kualitas layanan, serta kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang berkaitan dengan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan profesionalisme dalam layanan publik, sehingga dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pengawasan yang diterapkan.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 37 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	3.38	4.25	125.74%	Sangat Baik
2021	3.28	4.04	123.17%	Sangat Baik
2022	4.36	4.54	104.13%	Sangat Baik
2023	4.45	4.66	104.72%	Sangat Baik
2024	4.71	4.89	103.82%	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren positif dengan capaian kinerja yang konsisten dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian masing-masing mencapai 125,74% dan 123,17%, menandakan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan. Meskipun target meningkat dari tahun ke tahun, realisasi tetap mampu melampaui ekspektasi, dengan capaian 104,13% pada 2022, 104,72% pada 2023, dan 103,82% pada 2024. Tren ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

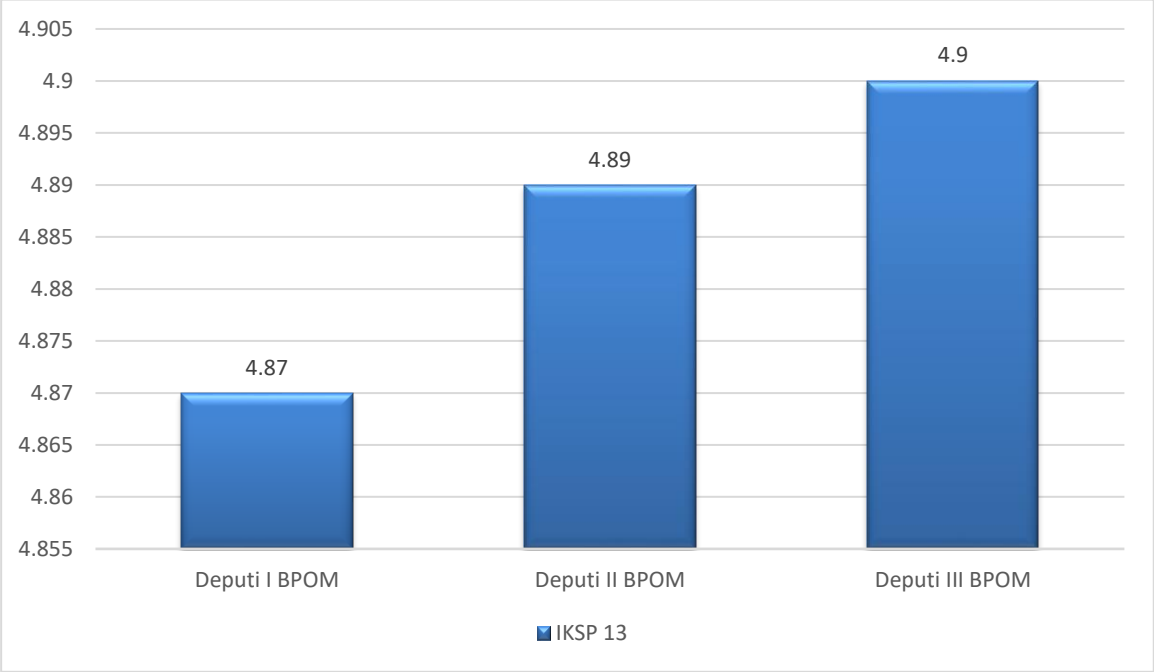

Gambar 17 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 13 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Perbandingan kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan satuan kerja sebanding menunjukkan hasil yang kompetitif. Deputi II BPOM mencatat realisasi 4,89, sedikit lebih tinggi dibandingkan Deputi I BPOM dengan 4,87, namun masih di bawah Deputi III BPOM yang mencapai 4,90. Perbedaan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa ketiga deputi memiliki standar pelayanan publik yang sangat baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas

layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan dengan optimal.

Analisis terhadap keberhasilan

Tabel 38 : Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi II BPOM dalam Pelayanan Publik tahun 2024

No.	Unit Kerja	Nilai IPP	Kategori
1	Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,93	Pelayanan Prima
2	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,93	Pelayanan Prima
3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,92	Pelayanan Prima
4	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,91	Pelayanan Prima
5	Dit. Pengawasan Kosmetik	4,78	Pelayanan Prima

Beberapa upaya yang telah dilakukan sehingga hasil yang didapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu:

1. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pelayanan yang Jelas

   Deputi II BPOM telah merumuskan kebijakan pelayanan yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat, guna memastikan setiap prosedur dan standar pelayanan jelas dan akuntabel. Kebijakan ini juga disosialisasikan secara luas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sehingga masyarakat dan pelaku usaha mengetahui dan memahami hak serta kewajiban mereka.

2. Peningkatan Profesionalitas SDM

   Deputi II BPOM terus meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan pelayanan, komunikasi, dan pemahaman regulasi sehingga setiap petugas mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan

Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, Deputi II BPOM mengembangkan fasilitas fisik dan digital yang mendukung proses layanan, seperti ruang konsultasi yang nyaman dan sistem antrean yang teratur. Pengembangan ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan nyaman.

4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

   Deputi II BPOM memanfaatkan banyak teknologi informasi dalam pelayanan publiknya, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi layanan, status permohonan, dan prosedur secara online, memudahkan mereka dalam memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor.

   Beberapa teknologi informasi yang disediakan dalam rangka pelayanan publik di Deputi II BPOM, antara lain: https://asrot.pom.go.id/asrot/; https://notifkos.pom.go.id/; https://siap-uk.pom.go.id/; https://sireka.pom.go.id/; https://standar-otskk.pom.go.id/sipk; https://e-bpom.pom.go.id/;

5. Peningkatan Saluran Konsultasi dan Pengaduan

   Deputi II BPOM menyediakan berbagai saluran konsultasi dan pengaduan yang dapat diakses dengan mudah, baik secara online maupun langsung. Setiap keluhan dan saran dari masyarakat ditangani dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat dan pelaku usaha merasa didengar dan dilayani dengan baik. Beberapa saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan antara lain: https://www.lapor.go.id/ yang merupakan Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, dikelola oleh KemenPAN RB, dan https://sangintegritas.pom.go.id/ yang merupakan sarana whystle blowing sistem, yang dikelola oleh Inspektorat.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	2.969.624.000	2.969.593.633	100,00	103,91	Efisien

Efisiensi kegiatan Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar 103,91% dan penggunaan anggaran 100,00%. Hal ini menandakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem pelayanan, efektivitas program komunikasi dan edukasi, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Meskipun tergolong efisien, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan guna memastikan keberlanjutan kualitas layanan yang lebih baik serta peningkatan kepuasan pemangku kepentingan.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, didukung oleh berbagai program dan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik menjadi prioritas utama dalam memastikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu langkah yang dilakukan adalah intensifikasi data permohonan notifikasi kosmetika, yang bertujuan untuk mempercepat proses notifikasi produk kosmetik agar lebih efisien dan akurat. Selain itu, Akselerasi penerapan CPOTB bagi UMKM dilakukan dengan pemutakhiran database serta implementasi hasil pemetaan dan pengelompokan (mapping dan clustering), sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan. Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Upaya lain yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang optimal adalah Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik dan Registrasi OTSK bagi UMKM di daerah, yang difokuskan pada percepatan penerbitan izin edar dengan pendekatan yang lebih inklusif. Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik serta pelaksanaan Training Awareness Risk Management dan Workshop Pelayanan Prima turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang berkualitas. Kegiatan Tim Media Sosial juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada masyarakat terkait layanan yang tersedia.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan publik, dengan fokus pada peningkatan responsivitas, digitalisasi layanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

14. IKSP 14 : Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) atau *timeline* yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam pelayanan publik ini mencerminkan efisiensi dan komitmen Deputi II BPOM dalam memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan permohonan penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat segera beredar di pasar setelah melalui proses evaluasi yang ketat. Indikator ini membantu menilai seberapa baik BPOM dalam memenuhi janji pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang diterapkan

Tabel 39 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelayanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,50	95,32	101,95%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu mencapai 95,32% dari target yang ditetapkan sebesar 93,50%, dengan capaian kinerja 101,95%, masuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Deputi II BPOM terus mengalami perbaikan dalam hal ketepatan waktu penyelesaian layanan, mencerminkan efektivitas dalam proses administrasi, peningkatan sistem pelayanan berbasis digital, serta optimalisasi sumber daya manusia dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 40 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	82.00	92.67	113.01%	Sangat Baik
2021	89.00	92.64	104.09%	Sangat Baik
2022	90.00	93.41	103.79%	Sangat Baik
2023	90.00	92.60	102.89%	Sangat Baik
2024	93.50	95.32	101.95%	Sangat Baik

Kinerja Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang konsisten dalam kategori sangat baik, dengan capaian kinerja selalu melebihi 100%. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 92,67% dari target 82,00%, dan terus meningkat setiap tahunnya, meskipun dengan variasi yang tidak signifikan. Pada 2024, realisasi sebesar 94,62% dari target 93,50%, dengan capaian 101,20%, menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian layanan publik. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam mempercepat pelayanan, meningkatkan sistem administrasi, serta mengoptimalkan sumber daya guna memastikan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

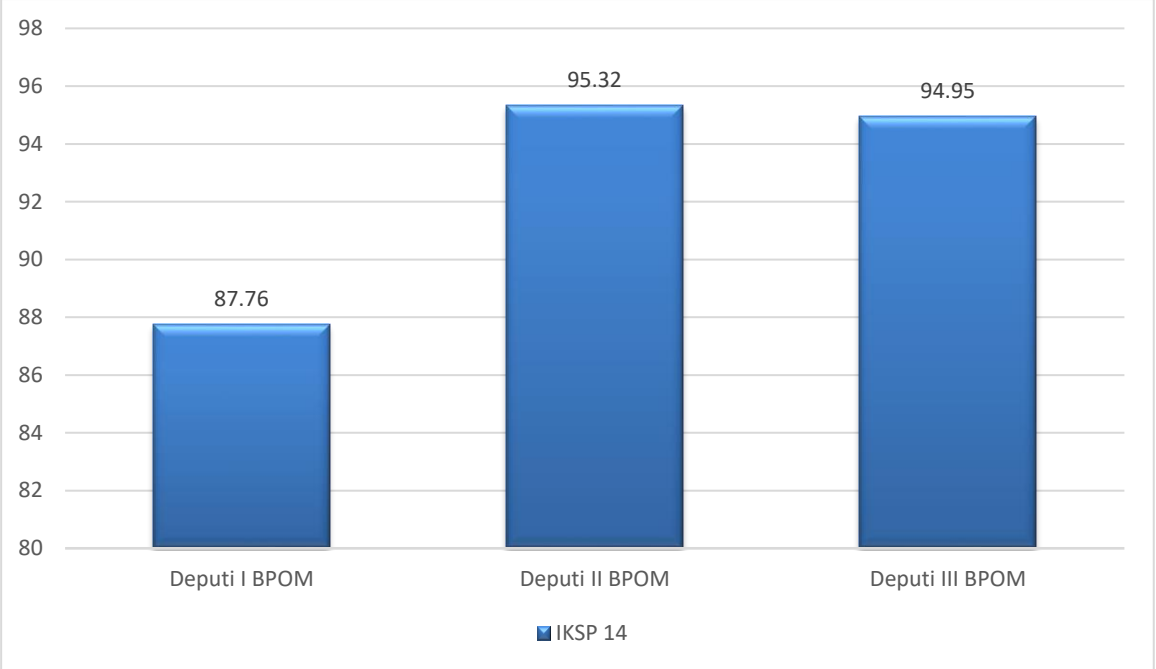

Gambar 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 14 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Kinerja Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu menunjukkan bahwa Deputi II BPOM berhasil mencapai realisasi 94,62%, yang berada di level yang kompetitif dibandingkan dengan satuan kerja sebanding. Deputi III BPOM mencatat kinerja tertinggi dengan realisasi 94,95%, sementara Deputi I BPOM memiliki capaian lebih rendah, yaitu 87,76%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM memiliki mekanisme penyelesaian layanan publik yang cukup optimal, mendukung efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan layanan yang tepat waktu. Namun, Deputi II masih memiliki ruang untuk peningkatan agar dapat menyamai atau melampaui capaian Deputi III BPOM.

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian ini didapatkan dari layanan yang diberikan oleh 3 unit kerja di Deputi II BPOM, dengan total layanan yang diberikan sebanyak 80.477 layanan, terdiri dari layanan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik sebanyak 5.211 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPOTB, layanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 10.586 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPKB. Selain itu juga layanan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 64.680 layanan, meliputi layanan persetujuan izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, persetujuan

iklan, dan persetujuan protokol uji klinik. Dari 80.477 layanan yang diberikan, sebanyak 78.038 layanan telah diselesaikan tepat waktu (96,97%).

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa upaya Deputi II BPOM dalam menyelesaikan berbagai permohonan pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan telah berjalan dengan efektif. Dengan realisasi mencapai 96,37%, kinerja Deputi II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dapat diselesaikan tepat waktu, melebihi ekspektasi.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	4.518.882.000	4.518.861.964	100,00	101,20	Efisien

Efisiensi kegiatan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu menunjukkan hasil yang positif dengan capaian kinerja 101,20% dari target yang ditetapkan, meskipun anggaran yang digunakan mencapai 100,00%. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi sumber daya telah digunakan secara efektif dalam memastikan layanan publik yang cepat dan tepat waktu. Deputi II BPOM berhasil menjaga kualitas pelayanan dengan memastikan setiap proses perizinan, registrasi, serta pengawasan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun efisien, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar dapat mencapai output yang lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih terkendali di masa mendatang.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai dan melampaui target ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

a. Optimalisasi Proses Pelayanan: Mengoptimalkan proses pelayanan melalui penerapan sistem yang efisien dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja, yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan desk registrasi permasalahan registrasi, *One Stop Service* layanan terpadu.
b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas pettugas registrasi dalam rangka pemenuhan dossier registrasi, peningkatan kapasitas UPT dalam rangka layanan publik sertifikasi.
c. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelayanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta memastikan bahwa semua permohonan diproses sesuai dengan SLA.
d. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan: Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung proses yang lebih cepat dan efisien, termasuk pengembangan sistem manajemen informasi yang lebih baik.
e. Komunikasi Efektif dengan Pemohon: Meningkatkan komunikasi dengan pemohon untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status permohonan mereka, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain Dialog interaktif prospek ekspor, coaching clinic, clustering notifikasi dan registrasi.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi guna mempertahankan dan meningkatkan efisiensi layanan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya harmonisasi regulasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan sektor terkait, khususnya dalam aspek registrasi dan sertifikasi. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan mencakup penguatan integrasi sistem layanan digital, pengembangan mekanisme monitoring layanan berbasis data real-time, serta peningkatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha guna mempercepat pemenuhan persyaratan registrasi. Dengan langkah-langkah ini, Deputi II BPOM diharapkan dapat semakin meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan dampak positif terhadap daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif, dengan beberapa manfaat penting:

a. Kepuasan Pelaku Usaha: Pelaku usaha merasa puas dengan layanan yang cepat dan tepat waktu, sehingga mereka dapat segera memasarkan produk mereka tanpa hambatan birokrasi.
b. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM, karena mereka yakin bahwa instansi ini mampu memberikan pelayanan yang efisien dan responsif.
c. Efisiensi Operasional: Penyelesaian tepat waktu mencerminkan efisiensi operasional dalam pengelolaan permohonan, yang dapat mengurangi backlog dan meningkatkan produktivitas.

Hasil ini mencerminkan efektivitas dan komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat yang lebih baik.

15. IKSP 15: Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal dan mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian bimbingan teknis dan pelatihan, workshop, layanan konsultasi, serta asistensi ke lokasi penelitian. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan kualitas hasil penelitian, sehingga inovasi obat bahan alam dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawalan inovasi obat bahan alam melibatkan berbagai bentuk dukungan, termasuk:

a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Deputi II BPOM memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.

b. Workshop: Menyelenggarakan workshop untuk membahas metode penelitian terbaru, standar regulasi, dan cara-cara untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan obat bahan alam.
c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti untuk membantu mereka dalam menyusun proposal penelitian, memahami regulasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
d. Asistensi ke Site Penelitian: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, mengevaluasi progres penelitian, dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Tabel 41 : Target dan Realisasi Kinerja Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90,00	90,07	100,08%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar berhasil mencapai realisasi sebesar 90,07% dari target 90,00%, dengan capaian kinerja 100,08%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi obat bahan alam sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan khasiat yang berlaku. Melalui berbagai program pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi regulasi, BPOM terus mendukung pengembangan inovasi berbasis bahan alam yang berkualitas dan berdaya saing, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta daya saing industri obat bahan alam di Indonesia.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 42 : Perbandingan Capaian Kinerja Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	80.00	77.11	96.39	Cukup
2021	82.00	82.83	101.01	Sangat Baik

2022	85.00	85.72	100.85	Sangat Baik
2023	88.00	88.14	100.16	Sangat Baik
2024	90.00	90.07	100.08	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, capaian kinerja sebesar 96,39% masih dalam kategori cukup, namun sejak 2021 hingga 2024, capaian kinerja terus meningkat dan berhasil masuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 101,01%, diikuti dengan 100,85% pada 2022, 100,16% pada 2023, dan 100,08% pada 2024. Tren positif ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan inovasi obat bahan alam oleh BPOM, yang terus berupaya memastikan bahwa setiap inovasi memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang berlaku.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

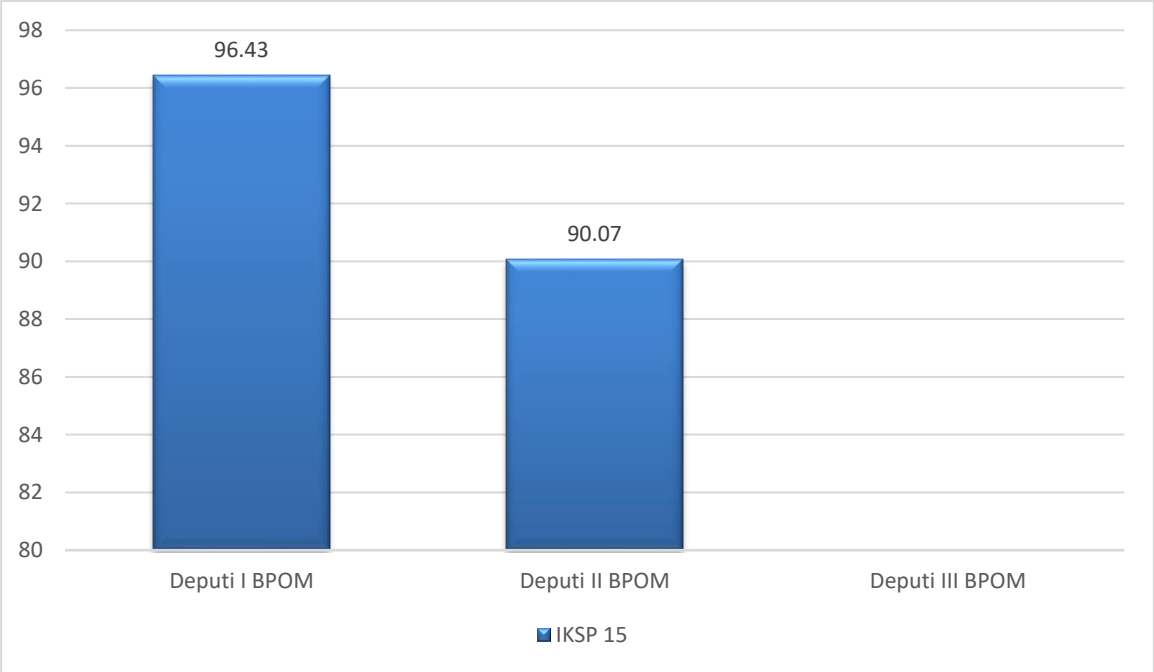

Gambar 19 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 15 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencapai realisasi sebesar 90,07%, sementara Deputi I BPOM mencatat capaian lebih tinggi sebesar 96,43%, dan Deputi III BPOM tidak tersedia datanya (N/A). Deputi II tetap menunjukkan kinerja sangat baik, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan

dalam memastikan inovasi produk berbasis bahan alam dapat dikawal sesuai standar dengan lebih optimal

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	726.618.000	726.614.541	100,00	100,08	Efisien

Efisiensi kegiatan **Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar** pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal, dengan **capaian kinerja sebesar 100,08%** dan **penggunaan anggaran mencapai 100,00%**. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program inovasi obat bahan alam sesuai standar yang ditetapkan.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
b. Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar untuk membahas perkembangan terbaru dalam riset obat bahan alam, serta standar dan regulasi yang harus dipenuhi, termasuk dengan melakukan sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan PPUPK dan PPUK dalam rangka hilirisasi penelitian
c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti dan pengembang produk untuk membantu mereka dalam proses registrasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
d. Kunjungan dan Asistensi Lapangan: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, memantau progres penelitian, dan memberikan masukan yang konstruktif.

e. Kolaborasi dengan Lembaga Riset dan Industri: Menjalin kerjasama dengan lembaga riset dan industri untuk mendukung pengembangan dan hilirisasi inovasi obat bahan alam.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Produk: Dengan bimbingan dan pengawalan yang intensif, kualitas produk obat bahan alam yang dihasilkan meningkat, memenuhi standar keamanan dan efektivitas.
b. Percepatan Proses Registrasi: Pendampingan yang diberikan oleh BPOM dapat mempercepat proses registrasi, sehingga inovasi produk dapat lebih cepat masuk ke pasar.
c. Dukungan untuk Peneliti dan Industri: Dukungan yang diberikan kepada peneliti dan industri membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan produk, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas mereka.

Realisasi kinerja sebesar 90,29% pada IKSP 15 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100,22%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar. Dengan terus meningkatkan upaya dalam pendampingan dan pengawalan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa inovasi obat bahan alam yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi.

16. IKSP 16: Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat tradisional melalui program sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap. IKSP 16 mengukur persentase UMKM obat tradisional yang berhasil menerima sertifikat CPOTB, yang menjadi salah satu indikator kinerja strategis utama bagi Deputi II BPOM. Sertifikasi CPOTB adalah standar yang memastikan bahwa produk obat tradisional diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat. Upaya ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional.

Tabel 43 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100,00	100,00	100,00%	Baik

Pada tahun 2024, indikator Persentase UMKM Obat Tradisional (OT) yang Menerima Sertifikat CPOTB Bertahap mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100,00%, dengan realisasi 100,00%, sehingga capaian kinerja berada pada kategori Baik. Hasil ini mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM di sektor obat tradisional agar memenuhi standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Pencapaian ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM obat tradisional melalui sertifikasi, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang berlaku.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap adalah sebagai berikut:

Tabel 44 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	86.70	80.00	92.27%	Cukup
2022	90.00	95.89	106.54%	Sangat Baik
2023	93.30	100.00	107.18%	Sangat Baik
2024	100.00	100.00	100.00%	Baik

Dalam lima tahun terakhir, Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, capaian kinerja sebesar 92,27% masih berada dalam kategori Cukup, namun meningkat menjadi 106,54% pada 2022 dan 107,18% pada 2023, keduanya masuk dalam

kategori Sangat Baik. Pada 2024, target dan realisasi sama-sama mencapai 100,00%, dengan capaian 100,00%, masuk dalam kategori Baik. Tren ini menunjukkan efektivitas upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan untuk memastikan UMKM obat tradisional memenuhi standar CPOTB.

Capaian kinerja ini spesifik di Deputi II BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan Satuan Kerja Sebanding.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	2.685.571.000	2.685.566.077	100,00	100,00	Efisien

Kegiatan Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap pada tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai efisien, dengan capaian kinerja 100,00% yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta penggunaan anggaran sebesar 100,00%. Efisiensi ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam memberikan bimbingan teknis, pendampingan, serta fasilitasi sertifikasi bagi UMKM. Meskipun pencapaian berada dalam kategori baik, upaya peningkatan efektivitas tetap diperlukan, seperti penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi serta percepatan proses sertifikasi agar UMKM lebih cepat memperoleh manfaat dari standar CPOTB dan mampu bersaing di pasar.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian ini berhasil dicapai, antara lain:

1. **Pelatihan dan Workshop** Deputi II BPOM secara aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk UMKM di bidang obat tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku usaha mengenai standar CPOTB, termasuk tata cara produksi yang baik dan benar. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui KIE dalam rangka peningkatan citra jamu.
2. **Pendampingan Teknis** Tim teknis Deputi II BPOM memberikan pendampingan intensif kepada UMKM dalam proses penerapan CPOTB. Pendampingan ini mencakup konsultasi teknis, kunjungan lapangan, dan penilaian kesiapan sarana

produksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan perluasan pendampingan UMKM melalui fasilitator.

3. **Fasilitasi Sertifikasi** Deputi II BPOM memfasilitasi proses sertifikasi CPOTB untuk UMKM dengan mempermudah prosedur administrasi dan memberikan dukungan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Hal ini termasuk bantuan dalam penyusunan dokumen dan persiapan audit.
4. **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan** Deputi II BPOM menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat program pembinaan. Kolaborasi ini membantu dalam penyebaran informasi dan penyediaan sumber daya tambahan bagi UMKM. Kegiatan yang dilakukan antara lain Pemberdayaan Orang Tua Angkat.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar CPOTB, beberapa manfaat penting yang didapat, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Produk** Dengan mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi CPOTB, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk obat tradisional yang mereka hasilkan. Produk yang berkualitas tinggi tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. **Daya Saing yang Lebih Tinggi** Sertifikasi CPOTB memberikan nilai tambah bagi produk UMKM, sehingga lebih kompetitif di pasar. Produk yang bersertifikat lebih mudah diterima di pasar domestik dan internasional, membuka peluang ekspor yang lebih luas.
3. **Kepercayaan Konsumen** Konsumen lebih cenderung memilih produk yang telah mendapatkan sertifikasi CPOTB karena dianggap lebih aman dan bermutu. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM.
4. **Kepatuhan terhadap Regulasi** Melalui program pembinaan, UMKM menjadi lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi. Kepatuhan ini juga memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. **Pengembangan Kapasitas UMKM** Pendampingan dan pelatihan yang diberikan tidak hanya membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. UMKM yang berkembang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai 100,00%, tetap diperlukan upaya perbaikan untuk memperkuat kesinambungan program ini. Perluasan pendampingan UMKM OT melalui fasilitator menjadi salah satu langkah strategis yang dapat terus ditingkatkan guna menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah. Selain itu, optimalisasi digitalisasi layanan pendampingan dan percepatan proses sertifikasi juga menjadi langkah penting untuk mempermudah akses UMKM dalam memenuhi persyaratan CPOTB. Dengan pendekatan ini, diharapkan keberlanjutan program tetap terjaga, sekaligus memperkuat daya saing produk obat tradisional di tingkat nasional maupun internasional.

17. IKSP 17: Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki komitmen kuat dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kosmetik melalui program sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). IKSP 17 mengukur persentase UMKM kosmetik yang berhasil menerima sertifikat CPKB, yang merupakan salah satu indikator kinerja strategis penting bagi Deputi II BPOM. Sertifikasi CPKB merupakan standar yang memastikan bahwa produk kosmetik diproduksi dengan cara yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Upaya ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional.

Tabel 45 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100,00	100,00	100,00%	Baik

Pada tahun 2024, Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja 100%, sehingga masuk dalam kategori baik. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan UMKM kosmetik memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Keberhasilan ini juga menunjukkan

komitmen dalam meningkatkan daya saing industri kosmetik nasional melalui penerapan standar yang ketat guna memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah sebagai berikut:

Tabel 46 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	86.00	86.00	100.00%	Sangat Baik
2022	87.00	107.45	123.51%	Sangat Baik
2023	88.00	100.00	113.64%	Sangat Baik
2024	100.00	100.00	100.00%	Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB menunjukkan tren pencapaian yang sangat baik. Pada tahun 2021, realisasi kinerja sesuai target dengan capaian 100% (Sangat Baik). Peningkatan signifikan terjadi di 2022, dengan realisasi 107,45% melampaui target 87%, mencerminkan efektivitas pendampingan UMKM dalam memperoleh sertifikasi. Pada 2023, capaian kinerja tetap tinggi di 113,64%, menunjukkan keberlanjutan upaya fasilitasi dan pembinaan. Tahun 2024 menandai pencapaian 100%, dengan realisasi sesuai target yang ditetapkan, masuk dalam kategori baik.

Capaian kinerja ini spesifik di Deputi II BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan Satuan Kerja Sebanding.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	2.134.357.000	2.134.347.663	100,00	100,00	Efisien

Kegiatan Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB pada tahun 2024 menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal, dengan penggunaan anggaran sebesar 100,00% dan capaian kinerja yang mencapai 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung UMKM dalam memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pendampingan, bimbingan teknis, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian di masa mendatang, perlu adanya inovasi dalam metode pelatihan, digitalisasi layanan sertifikasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendampingan guna memastikan bahwa UMKM yang telah tersertifikasi dapat secara konsisten menerapkan standar CPKB dalam produksi mereka.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini antara lain:

1. Program Pelatihan dan Workshop
   Deputi II BPOM secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk pelaku UMKM di bidang kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai standar CPKB, termasuk proses produksi, manajemen kualitas, dan keselamatan produk, melalui kegiatan Peningkatan kapasitas UMKM Kosmetik menuju kemandirian berusaha.
2. Pendampingan Teknis Intensif
   Deputi II BPOM memberikan pendampingan teknis secara intensif kepada UMKM dalam menerapkan standar CPKB. Ini mencakup konsultasi, kunjungan lapangan, dan bantuan dalam menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Intensifikasi pendampingan start up dan UMKM oleh Fasilitator UPT dan Pusat.
3. Fasilitasi Proses Sertifikasi
   Deputi II BPOM memfasilitasi UMKM dalam proses sertifikasi CPKB dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan memberikan dukungan teknis. Ini termasuk bantuan dalam mempersiapkan audit sertifikasi dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
   Deputi II BPOM bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan, untuk

memperkuat program pembinaan. Kolaborasi ini membantu dalam menyediakan sumber daya tambahan dan memperluas jangkauan program pembinaan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melakukan pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik, beberapa manfaat penting yang didapat, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Produk Kosmetik
   Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, UMKM di bidang kosmetik dapat meningkatkan kualitas produk mereka. Sertifikasi CPKB memastikan bahwa produk kosmetik yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Daya Saing yang Lebih Tinggi
   Sertifikasi CPKB memberikan nilai tambah bagi produk kosmetik UMKM, membuatnya lebih kompetitif di pasar. Produk bersertifikat lebih mudah diterima oleh konsumen dan memiliki peluang lebih besar untuk diekspor ke pasar internasional.
3. Kepercayaan Konsumen
   Produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi CPKB lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap lebih aman dan bermutu. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM.
4. Kepatuhan terhadap Regulasi
   Program pembinaan membantu UMKM memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi. Kepatuhan terhadap standar CPKB juga memastikan bahwa proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Pengembangan Kapasitas UMKM
   Pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Deputi II BPOM tidak hanya membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. UMKM yang berkembang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

18. IKSP 18: Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Deputi II BPOM mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan berbagai inisiatif perubahan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi di Deputi II BPOM difokuskan pada peningkatan efektivitas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pembangunan reformasi birokrasi yang berjalan mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas regulasi, optimalisasi pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta penegakan integritas di lingkungan kerja.

Upaya reformasi ini juga didukung dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempermudah akses layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Deputi II BPOM terus memperkuat sinergi dengan lintas sektor dalam rangka mendukung akselerasi reformasi birokrasi, khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Evaluasi berkala terhadap implementasi reformasi birokrasi dilakukan guna mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, Deputi II BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance.

Tabel 47 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,04	89,54	97,28%	cukup

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menetapkan target Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,04, dengan realisasi sebesar 89,54, sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,28% dan masuk dalam kategori **cukup**. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini tetap menunjukkan upaya yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan efisiensi layanan, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital. Ke depan, diperlukan

perbaikan dalam aspek tata kelola, efektivitas implementasi kebijakan, serta peningkatan sinergi lintas sektor guna mempercepat pencapaian reformasi birokrasi yang lebih optimal.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 48 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	85.00	82.21	96.72%	Cukup
2021	82.90	83.03	100.16%	Sangat Baik
2022	85.00	91.58	107.74%	Sangat Baik
2023	87.10	90.07	103.41%	Sangat Baik
2024	92.04	89.54	97.28%	Cukup

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian sebesar **96,72%** masuk dalam kategori **cukup**, diikuti dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian masing-masing **100,16%** dan **107,74%**, masuk dalam kategori **sangat baik**. Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian **103,41%**, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dengan capaian **97,28%**, kembali ke kategori **cukup**.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

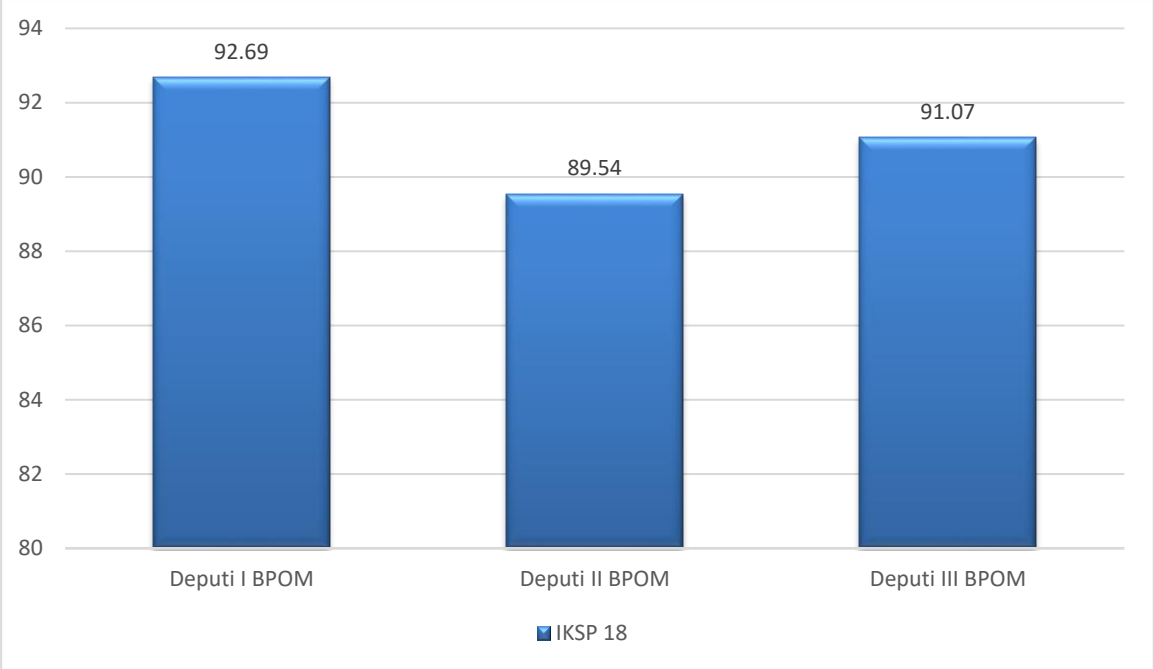

Gambar 20 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 18 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dari grafik di atas terlihat bahwa Realisasi Kinerja Deputi II BPOM pada IKSP 18 sebesar 89,54, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi kinerja Deputi I BPOM (92,68), dan Deputi III BPOM (91,07).

Analisis terhadap kegagalan pencapaian kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian kinerja ini karena adanya penurunan nilai indeks Reformasi pada unit kerja di Deputi II BPOM.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.051.821.000	4.051.811.274	100,00	97,29	Tidak Efisien

Efisiensi kegiatan **Indeks Reformasi Birokrasi** Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil

tidak efisien, dengan **anggaran yang telah digunakan sebesar 100,00%**, namun capaian kinerja hanya mencapai **97,28%** dari target. Meskipun kinerja reformasi birokrasi masih dalam kategori **cukup**, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat area yang perlu ditingkatkan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi, seperti efektivitas tata kelola, perbaikan sistem layanan publik, serta optimalisasi peran sumber daya manusia. Ke depan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi yang digunakan, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi untuk memastikan efisiensi yang lebih baik serta peningkatan hasil yang lebih optimal.

Analisis program kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2024 menunjukkan hasil 97,28% dari target 92,04, masuk dalam kategori cukup. Sejumlah program telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Deputi II BPOM, seperti implementasi pembangunan Zona Integritas, evaluasi kinerja direktorat terkait, serta monitoring pelaksanaan SPIP dan pembangunan Zona Integritas. Selain itu, kegiatan pengelolaan manajemen risiko, pemantapan sistem manajemen terintegrasi, serta penguatan kapasitas SDM melalui capacity building turut berperan dalam mendukung reformasi birokrasi yang lebih efektif. Meskipun program-program tersebut telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi birokrasi yang efisien dan berdampak luas terhadap kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil meraih status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga kini terdapat empat direktorat di lingkungan Deputi II BPOM yang telah mencapai status WBK. Dengan pencapaian ini, tersisa satu unit kerja yang masih dalam proses memperoleh status WBK, yang menandakan adanya komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas reformasi birokrasi, langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan meliputi mempercepat digitalisasi proses birokrasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam implementasi reformasi birokrasi berbasis kinerja. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai dalam implementasi kebijakan reformasi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas manajemen risiko akan menjadi strategi penting dalam memperbaiki

kualitas reformasi birokrasi di Deputi II BPOM. Dengan upaya tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih optimal dan berdampak positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

19. IKSP 19: Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Deputi II BPOM terus berkomitmen dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengelolaan kinerja yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dijalankan oleh Deputi II BPOM selaras dengan rencana strategis nasional, efektif dalam implementasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Deputi II BPOM mengadopsi prinsip perencanaan berbasis kinerja, yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta indikator-indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam kontrak kinerja. Selain itu, pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan transparan, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik.

Dalam penerapannya, Deputi II BPOM telah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada outcome dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis data. Selain itu, penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di berbagai unit kerja semakin memperkuat tata kelola yang profesional dan akuntabel. Dengan berbagai langkah strategis ini, Deputi II BPOM terus berupaya membangun budaya kinerja yang unggul, bertanggung jawab, dan berdaya saing, guna mendukung misi BPOM dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 49 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai AKIP tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,05	80,66	100,76%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencapai 80,66, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,05 dengan capaian kinerja 100,76%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang berbasis hasil (outcome) dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Deputi II BPOM terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta penguatan sistem pengawasan internal guna memastikan akuntabilitas kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 50 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	81.00	77.79	96.04	Cukup
2021	79.30	79.69	100.49	Sangat Baik
2022	80.80	76.36	94.50	Cukup
2023	82.30	79.73	96.88	Cukup
2024	80.05	80.66	100.76	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan fluktuasi dalam pencapaiannya. Pada tahun 2020, realisasi kinerja mencapai 77,79 dari target 81,00, dengan capaian 96,04% yang masuk dalam kategori cukup. Kinerja meningkat pada tahun 2021 dengan capaian 100,49% (kategori sangat baik), tetapi kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 94,50% dan 96,88%, yang masih dalam kategori cukup. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 100,76%, dengan realisasi 80,66, masuk dalam kategori sangat baik. Tren ini mencerminkan upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas yang dilakukan secara bertahap, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai konsistensi kinerja optimal setiap tahunnya.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

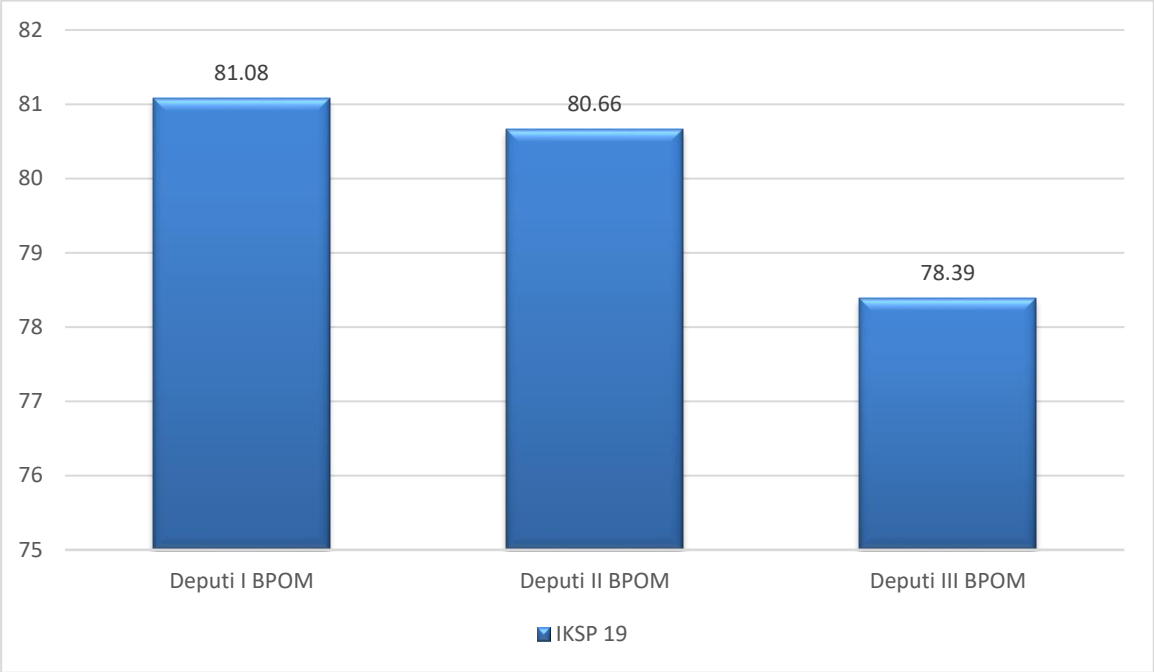

Gambar 21 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 19 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, Deputi II BPOM mencatat realisasi 80,66, yang lebih rendah dibandingkan dengan Deputi I BPOM yang mencapai 81,08, namun lebih tinggi dari Deputi III BPOM dengan realisasi 78,39. Meskipun terdapat perbedaan nilai antar satuan kerja, capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM tetap berada dalam kategori sangat baik, mencerminkan komitmen dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja instansi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	259.782.000	259.781.225	100,00	100,76	Efisien

Efisiensi kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Deputi II BPOM tercermin dalam capaian kinerja sebesar 100,76%, dengan penggunaan anggaran mencapai 100,00%, yang menunjukkan bahwa program dan inisiatif yang dijalankan telah memberikan hasil yang optimal. Pencapaian ini mengindikasikan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta keselarasan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh. Meskipun demikian, upaya peningkatan tetap diperlukan, terutama dalam memperkuat sistem pengukuran kinerja berbasis outcome, meningkatkan integrasi antarunit kerja, serta mengoptimalkan strategi pengelolaan anggaran agar tetap menghasilkan capaian tinggi dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi II BPOM pada tahun 2024 menunjukkan hasil 80,66 dengan capaian 100,76% dari target, yang masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain:

a. **Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis (Renstra)** – Deputi II BPOM telah melakukan penyusunan dokumen Renstra yang selaras dengan kebijakan nasional serta melakukan reviu secara berkala guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
b. **Pengukuran Kinerja Secara Periodik** – Evaluasi berkala terhadap indikator kinerja dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta perbaikan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan dan program pengawasan.
c. **Penyusunan Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu** – Deputi II BPOM telah berupaya meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan laporan kinerja dengan menerapkan sistem digitalisasi, yang memungkinkan monitoring dan pelaporan dilakukan secara lebih akurat dan real-time

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi II BPOM, perlu dilakukan berbagai perbaikan yang berlandaskan rekomendasi

Inspektorat Utama atas hasil penilaian AKIP tahun 2024. Langkah-langkah perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyusunan dan pelaporan kinerja, sehingga Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

a. Mempublikasikan Seluruh Dokumen Perencanaan SAKIP pada Subsite Unit Kerja
    - Setiap dokumen perencanaan terkait SAKIP akan dipublikasikan secara terbuka melalui subsite masing-masing unit kerja, sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara luas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta keterbukaan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Deputi II BPOM.
b. Memastikan Keselarasan Penyajian Target pada PK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim
    - Penyusunan target dan pelaporan kinerja akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan konsisten antar dokumen perencanaan, seperti Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim, guna menghindari ketidaksesuaian dalam pelaporan dan evaluasi kinerja.
c. Memperbaiki Mekanisme dalam Pengumpulan Data Kinerja
    - Proses pengumpulan data kinerja akan diperbaiki dengan mengoptimalkan sistem manajemen data yang lebih terstruktur, baik melalui penggunaan platform digital maupun tata kelola pelaporan yang lebih akurat. Peningkatan mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan validitas data dalam proses monitoring dan evaluasi.
d. Meningkatkan Transparansi dengan Mempublikasikan Laporan Kinerja pada Website Seluruh Unit Kerja Deputi II BPOM
    - Seluruh laporan kinerja Deputi II BPOM akan dipublikasikan pada website unit kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholder terkait.
e. Memperbaiki Mekanisme Akuntabilitas Kinerja melalui Pengembangan Kompetensi Tim Monev
    - Peningkatan kapasitas Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) akan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan guna memastikan mekanisme pelaporan kinerja lebih akurat, transparan, dan berbasis hasil (outcome-based). Dengan kompetensi yang lebih baik, Tim Monev dapat

memberikan analisis kinerja yang lebih tajam serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

20. IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan

Deputi II BPOM terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan guna mendukung transparansi dan efektivitas administrasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai langkah telah dilakukan, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, optimalisasi sistem pengelolaan arsip dinamis, serta penyelamatan arsip bernilai guna permanen. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana penyimpanan arsip serta alokasi anggaran yang sesuai turut mendukung pengelolaan dokumen yang lebih tertata dan terakses dengan baik. Dengan pengelolaan kearsipan yang semakin baik, Deputi II BPOM memastikan bahwa data dan informasi yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta meningkatkan akuntabilitas layanan publik.

Tabel 51 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,02	98,19	102,26	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan kearsipan, dengan target nilai 96,02 dan realisasi sebesar 98,19, sehingga capaian kinerja mencapai 102,6%. Hasil ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan standar kearsipan yang sesuai dengan regulasi, mulai dari kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, hingga penyelamatan arsip bernilai guna permanen. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam tata kelola dokumen, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi administrasi di Deputi II BPOM.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 52 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	n/a	n/a	n/a	n/a
2022	n/a	n/a	n/a	n/a
2023	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	96,02	98,19	102,26%	Sangat Baik

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan baru diterapkan pada tahun 2024, data kinerja pada tahun 2020 – 2023 tidak dapat disajikan, sehingga perbandingan capaian kinerjanya tidak dapat dilakukan.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

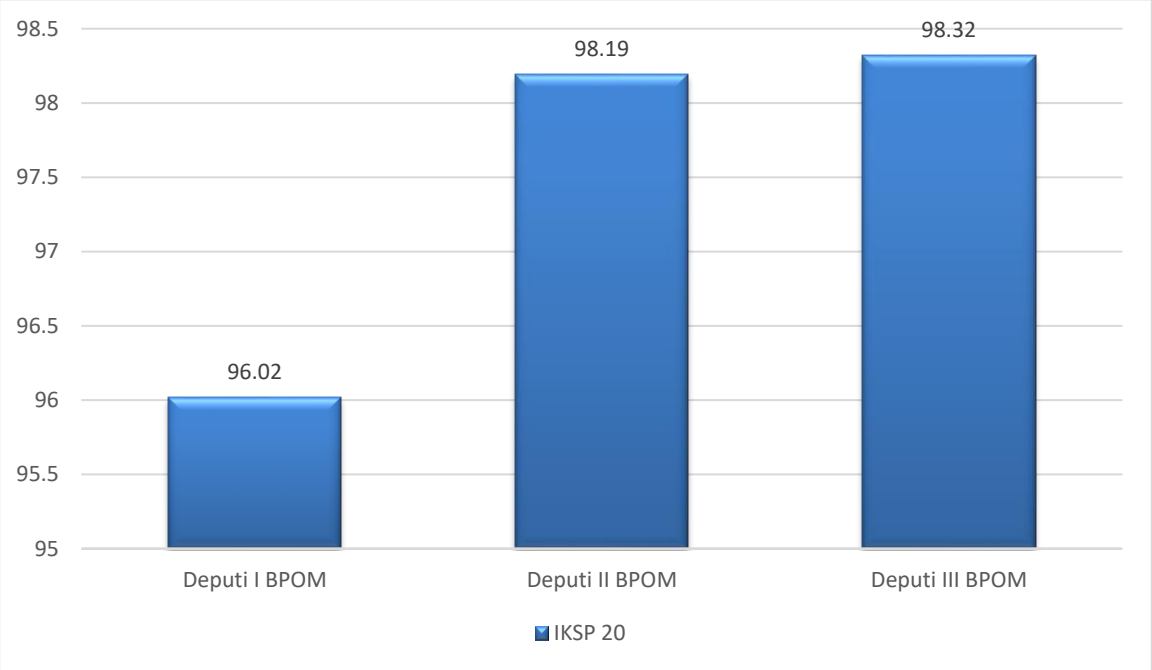

Gambar 22 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 20 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja pengelolaan kearsipan dengan satuan kerja sebanding, Deputi II BPOM mencatat realisasi nilai sebesar 98,19, lebih tinggi dibandingkan Deputi I BPOM yang mencapai 96,02, namun sedikit lebih rendah dari Deputi III BPOM yang memperoleh nilai 98,32. Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menjalankan pengelolaan arsip dengan sangat baik, sejalan dengan standar yang ditetapkan. Meskipun terdapat perbedaan tipis dalam capaian antar unit kerja, hasil ini mencerminkan bahwa Deputi II BPOM tetap berada pada tingkat optimal dalam

menjaga keteraturan, aksesibilitas, dan kelengkapan arsip sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini merupakan kumulasi dari keberhasilan 5 (lima) unit kerja di Deputi II BPOM dalam melakukan pengelolaan arsip di unitnya, capaian kinerja dari ke-lima unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 53 : Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip di Unit Kerja Deputi II BPOM tahun 2024

No.	Unit Kerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94,70	97,41	102,86
2	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	97,50	98,46	100,98
3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96,55	98,46	101.98
4	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,00	98,46	103,64
5	Dit. Pengawasan Kosmetik	96,33	98,17	101,91
	Deputi II BPOM	96,02	98,19	102,26

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	221.692.000	221.688.167	100,00	102,26	Efisien

Pengelolaan kearsipan di Deputi II BPOM pada tahun 2024 menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar 102,26% dari target yang ditetapkan, meskipun anggaran yang digunakan mencapai 100%. Efisiensi ini mencerminkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara

efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, baik dalam aspek pencatatan, penyimpanan, maupun aksesibilitas dokumen. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya sistem kearsipan yang terorganisir dengan baik, didukung oleh kebijakan serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan arsip. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan evaluasi berkala dan inovasi dalam sistem digitalisasi arsip guna memastikan kelangsungan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kearsipan di masa mendatang.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Deputi II BPOM telah melakukan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan kearsipan, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kearsipan, digitalisasi arsip untuk mempermudah akses dan penyimpanan dokumen, serta optimalisasi implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Srikandi dalam mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif. Selain itu, penguatan koordinasi antar unit kerja juga dilakukan guna memastikan keselarasan dalam standar pengelolaan arsip di seluruh lingkungan Deputi II BPOM.

Meskipun capaian kinerja sudah sangat baik, beberapa upaya perbaikan tetap perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan. Beberapa langkah yang perlu dioptimalkan antara lain mempercepat proses digitalisasi arsip agar lebih efisien, memastikan konsistensi dalam penerapan standar kearsipan di semua unit kerja, serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan dalam manajemen dokumen. Selain itu, perlu adanya pembaruan berkala terhadap kebijakan dan pedoman kearsipan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi, sehingga pengelolaan arsip dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan lebih modern, serta peningkatan kompetensi dari para arsiparis agar dapat mengelola arsip dengan lebih baik lagi.

21. IKSP 21: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Profesionalitas ASN di Deputi II BPOM merupakan ukuran tingkat profesionalisme pegawai berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pegawai Deputi II BPOM memenuhi standar profesional dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya, sekaligus sebagai indikator keberhasilan dalam pengembangan SDM yang berkualitas dan berintegritas

Tabel 54 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,04	87,82	96,46	cukup

Pada tahun 2024, Indeks Profesionalitas ASN di Deputi II BPOM mencapai realisasi sebesar 87,82 dari target 91,04, dengan capaian kinerja 96,46%, masuk dalam kategori cukup. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, hasil ini tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga profesionalisme ASN. Penurunan capaian ini disebabkan oleh perubahan metode pengukuran, khususnya pada dimensi kompetensi dan kualifikasi, sesuai dengan kebijakan terbaru Badan Kepegawaian Negara. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus melakukan upaya peningkatan melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, serta penyelarasan sistem evaluasi kinerja agar lebih sesuai dengan standar profesionalitas yang diharapkan.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Tabel 55 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	75.00	85.11	113.48	Sangat Baik
2021	84.20	84.63	100.51	Sangat Baik
2022	84.85	85.76	101.07	Sangat Baik
2023	85.50	91.10	106.55	Sangat Baik
2024	91.04	87.82	96.46	Cukup

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Profesionalitas ASN di Deputi II BPOM menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian mencapai 113,48% dengan kategori sangat baik, dan tetap berada dalam kategori yang sama hingga 2023, dengan capaian tertinggi sebesar 106,55% pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, capaian mengalami penurunan menjadi 96,46%, masuk dalam kategori cukup. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan metode pengukuran, terutama pada

dimensi kompetensi dan kualifikasi. Meskipun demikian, Deputi II BPOM terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja yang lebih efektif.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

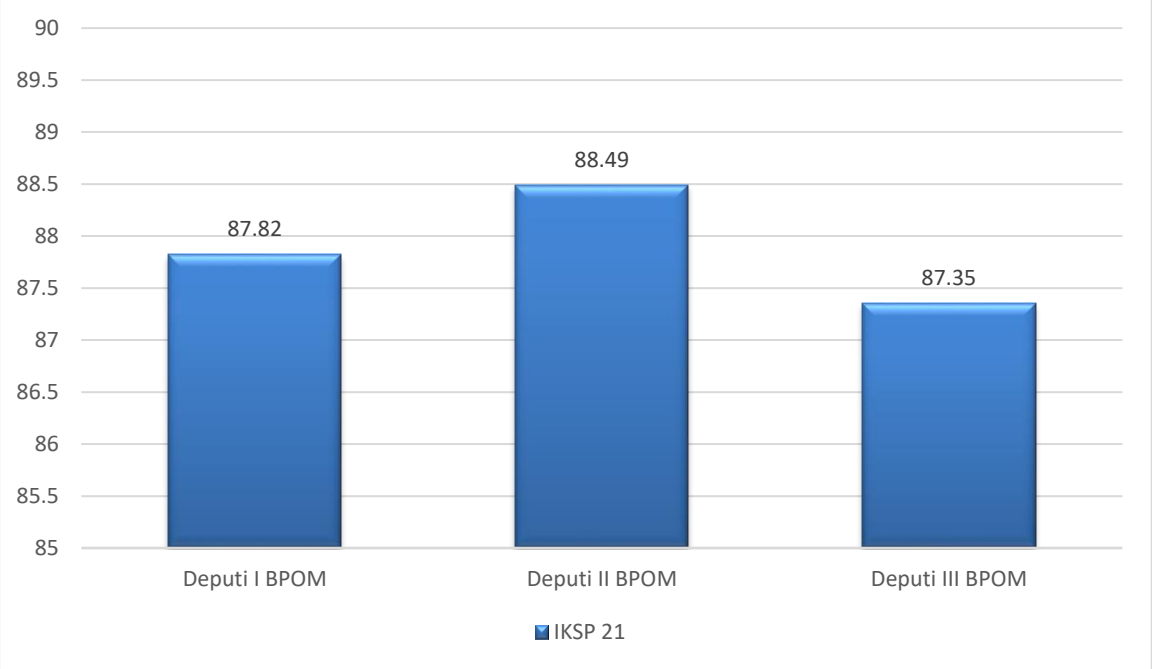

Gambar 23 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 21 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Indeks Profesionalitas ASN antara satuan kerja di BPOM, Deputi II mencatat nilai 88,49, sedikit lebih tinggi dibandingkan Deputi I yang mencapai 87,82 dan Deputi III dengan nilai 87,35. Meskipun terdapat perbedaan yang tidak signifikan, hasil ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM memiliki keunggulan dalam pengelolaan profesionalitas ASN, terutama dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Namun, untuk mencapai target yang lebih optimal, diperlukan peningkatan berkelanjutan dalam program pengembangan SDM serta penyesuaian terhadap standar baru dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Analisis terhadap kegagalan pencapaian kinerja

Kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena adanya perubahan metode pengukuran di tahun 2024 menyebabkan dimensi kompetensi dan

kualifikasi memiliki bobot yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada penurunan skor meskipun kualitas ASN tetap terjaga.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.865.026.000	1.865.015.721	100,00	96,46	Tidak Efisien

Dalam evaluasi efisiensi kegiatan terkait Indeks Profesionalitas ASN di Deputi II BPOM, realisasi capaian kinerja sebesar 96,46% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, meskipun anggaran telah digunakan secara penuh (100,00%). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program pengembangan ASN masih perlu ditingkatkan, baik dari segi optimalisasi penggunaan sumber daya, metode pelatihan, maupun implementasi kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalitas pegawai. Faktor perubahan komponen penilaian juga turut mempengaruhi pencapaian indeks, sehingga diperlukan strategi yang lebih adaptif dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM agar lebih selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi dan standar profesionalisme yang berlaku..

Analisis program kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja

Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), baik melalui pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial. Berbagai pelatihan teknis telah diberikan kepada pegawai guna meningkatkan kompetensi dalam bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Selain itu, pelatihan fungsional bagi pejabat struktural dan pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik juga dilakukan untuk memastikan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Deputi II BPOM juga terus mendorong pegawai untuk mengikuti program tugas belajar, baik melalui jalur beasiswa maupun biaya mandiri, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan dapat menciptakan ASN yang

kompeten dan adaptif terhadap perubahan regulasi serta tantangan yang ada di sektor pengawasan obat dan makanan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, capaian IP ASN tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan metode penilaian IP ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya dalam dimensi kompetensi dan kualifikasi. Perubahan ini berpengaruh terhadap sistem pengukuran, sehingga nilai yang diperoleh Deputi II BPOM mengalami penyesuaian. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti penyelarasan pemetaan kompetensi pegawai dengan standar baru yang diterapkan oleh BKN, peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan bersertifikasi, serta penguatan mekanisme pengelolaan data kualifikasi dan kompetensi pegawai. Selain itu, perlu didorong percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga komposisi pegawai yang tersedia dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya dalam meningkatkan kinerja ini adalah dengan mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui keikut sertaan pada pelatihan baik teknis maupun fungsional, memastikan pegawai telah mengikuti pelatihan selama minimal 20 (dua puluh) jam Pelajaran, kemudian mendorong pegawai untuk mengikuti program tugas belajar baik dari dana beasiswa maupun mandiri. Selain itu juga melakukan penyegaran kembali terhadap aturan kode etik disiplin pegawai, agar pegawai mentaati seluruh aturan kepegawaian yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi disiplin pegawai.

22. IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengelolaan data dan informasi yang optimal merupakan fondasi utama dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan di Deputi II BPOM. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data dan informasi yang digunakan selalu diperbarui secara real-time, sehingga memungkinkan keputusan yang lebih akurat, berbasis bukti, dan tepat sasaran. Selain itu, pengukuran indeks ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi sistem informasi telah diterapkan dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis di Deputi II BPOM, baik

dalam pengawasan pre-market maupun post-market terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi, termasuk dengan digitalisasi proses bisnis melalui sistem berbasis elektronik, pemanfaatan data dan analitik untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, serta integrasi sistem informasi guna memastikan bahwa data yang tersedia bersifat valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan data yang optimal, Deputi II BPOM tidak hanya meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Ke depan, penguatan sistem pengelolaan data berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI) diharapkan semakin mempercepat deteksi dini terhadap potensi risiko keamanan produk serta meningkatkan responsivitas dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Tabel 56 : Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,00	3,60	120.00	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dalam Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, dengan target yang ditetapkan sebesar 3,00 dan realisasi mencapai 3,60. Capaian ini setara dengan 120,00% dari target, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan, pemanfaatan, serta penyajian data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Keberhasilan ini mencerminkan upaya peningkatan sistem manajemen data yang lebih terstruktur, implementasi teknologi informasi yang lebih optimal, serta penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan informasi

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 57 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	1.50	0.125	8.33	Kurang
2021	2.00	1.60	80.00	Cukup
2022	2.25	2.90	128.89	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	2.50	3.00	120.00	Sangat Baik
2024	3.00	3.60	120.00	Sangat Baik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi II BPOM menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi hanya mencapai 0,125 atau 8,33% dari target, dengan kategori "Kurang." Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi perbaikan yang cukup pesat, dengan capaian 80,00% pada 2021 dan peningkatan drastis menjadi 128,89% pada 2022, meskipun kategorinya tidak dapat disimpulkan. Tren positif terus berlanjut dengan capaian 120,00% pada 2023 dan 2024, yang masuk dalam kategori "Sangat Baik." Peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih sistematis serta optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

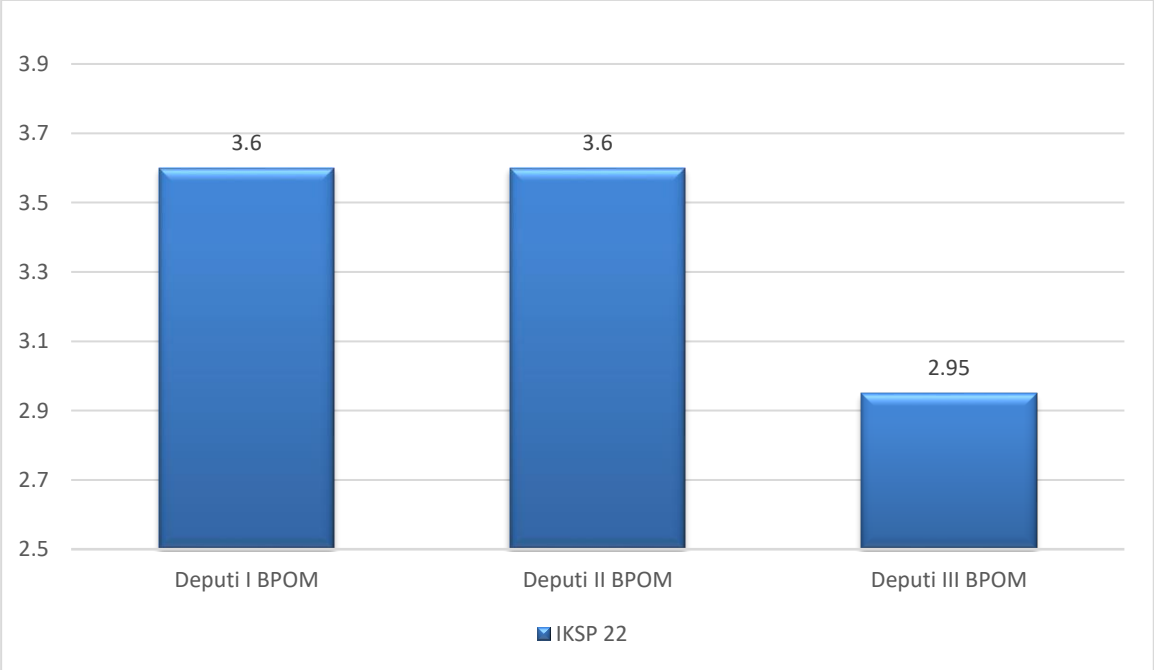

Gambar 24 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 22 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Pada tahun 2024, kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi II BPOM mencapai 3,60, sejajar dengan capaian Deputi I BPOM yang juga berada di angka 3,60, sementara Deputi III BPOM mencatatkan nilai 2,95. Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM berada pada tingkat yang optimal dalam pengelolaan data dan informasi, setara dengan Deputi I BPOM, dan lebih unggul dibandingkan Deputi III BPOM..

Analisis terhadap keberhasilan

Keberhasilan Deputi II BPOM dalam mencapai target kinerja, khususnya dalam Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, serta berbagai indikator lainnya, dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, antara lain:

a. Pemanfaatan sarana *email corporate* oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, dan pemanfaatan *Dashboard* BoC oleh pimpinan unit kerja
b. Penerapan Sistem Manajemen Informasi: Implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, terstruktur, dan mudah diakses.
c. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan bagi staf terkait pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi yang ada.
d. Penggunaan Teknologi Terkini: Memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengelolaan data, seperti database terstruktur dan sistem penyimpanan berbasis cloud, untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data.
e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan data dan informasi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.
f. Pengadaan infrastruktur teknologi informasi: Melakukan pengadaan Alat Pengolah Data dalam rangka memfasilitasi pegawai untuk melakukan pekerjaan pengawasan baik pre maupun post market control.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.149.848.000	1.149.848.000	100,00	120,00	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 120,00% sehingga kegiatan ini bisa dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan Deputi II BPOM dalam mencapai target kinerja tidak lepas dari berbagai program dan kegiatan strategis yang telah dijalankan. Beberapa program utama yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain:

- Digitalisasi Pengawasan dan Layanan Publik, termasuk penguatan sistem informasi berbasis elektronik untuk registrasi, sertifikasi, dan pelaporan hasil pengawasan.
- Pemanfaatan sarana dashboard BoC dalam upaya pengambilan keputusan
- Pemanfaatan e-mail corporate dalam hal korespondensi

23. IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tabel 58 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34	98,80	102,55	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2024 adalah sebesar 98,80, dengan target yang ditetapkan sebesar 96,34 sehingga capaian kinerjanya adalah 102,55%, masuk dalam kategori sangat baik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 59 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	93.45	95.64	102.34	Sangat Baik
2021	92.30	95.45	103.41	Sangat Baik
2022	92.90	96.16	103.51	Sangat Baik
2023	94.10	94.15	100.05	Sangat Baik
2024	96.34	98.80	102.55	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja Deputi II BPOM selama kurun waktu 2020 – 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan kriteria sangat baik. Realisasi memiliki trend meningkat tiap tahunnya dengan kinerja tertinggi di tahun 2024.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

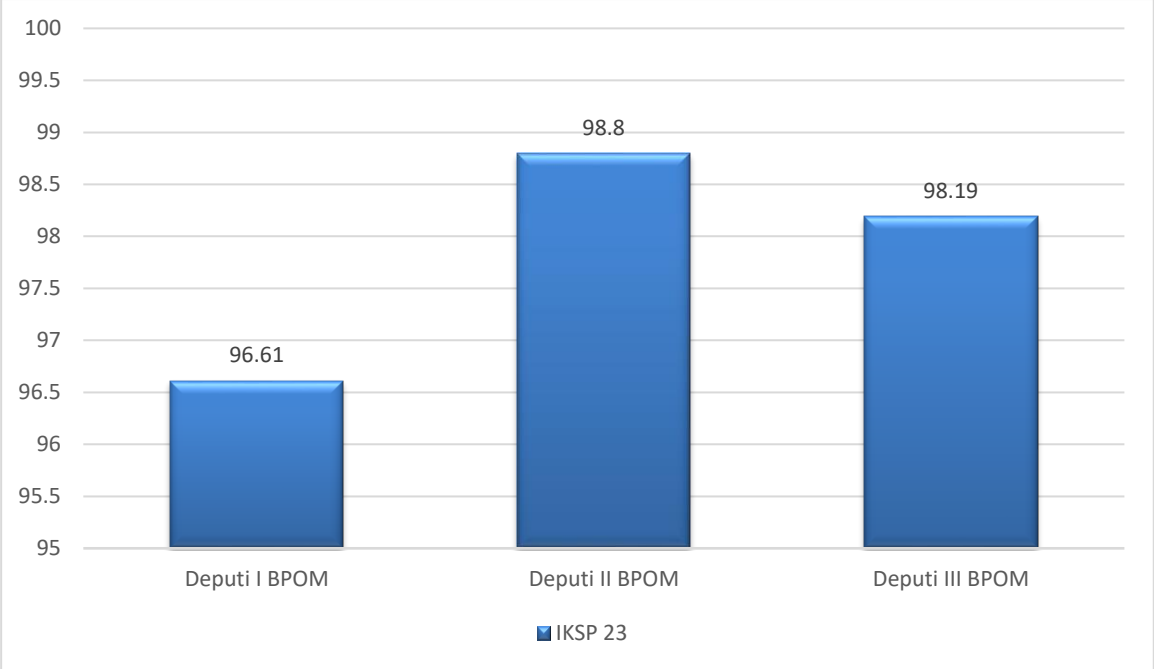

Gambar 25 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 23 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja Nilai Kinerja Anggaran antara unit kerja sebanding di BPOM, Deputi II BPOM mencatat capaian 98,80, lebih tinggi dibandingkan Deputi I BPOM yang mencapai 96,61, serta sedikit lebih unggul dari Deputi III BPOM yang memperoleh 98,19. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran di Deputi II BPOM dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Keunggulan Deputi II BPOM dalam hal ini menunjukkan bahwa strategi penggunaan anggaran yang dilakukan telah berjalan optimal, baik dalam perencanaan, realisasi, maupun pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.890.252.000	1.890.242.464	100,00	102,55	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 102,55% sehingga kegiatan ini bisa dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain melalui penyusunan rencana penarikan dana yang cukup cermat, diikuti dengan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun, ketepatan waktu dalam pelaporan data kontrak dan pelaporan pertanggungawaban bendahara, pengelolaan uang persediaan (UP) yang baik, dan pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai dengan ketentuan, serta pelaporan capaian output secara tepat waktu.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja ini adalah dengan melakukan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan output kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Tabel 60 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76,21	95,00	124,66	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 adalah sebesar 95,00, dengan target yang ditetapkan sebesar 76,21 sehingga capaian kinerjanya adalah 124,66%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 61 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	n/a	n/a	n/a	n/a
2022	n/a	n/a	n/a	n/a
2023	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	76.21	95.00	124.66	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Barang dan Jasa baru diterapkan pada tahun 2024, data kinerja pada tahun 2020 – 2023 tidak dapat disajikan, sehingga perbandingan capaian kinerjanya tidak dapat dilakukan.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

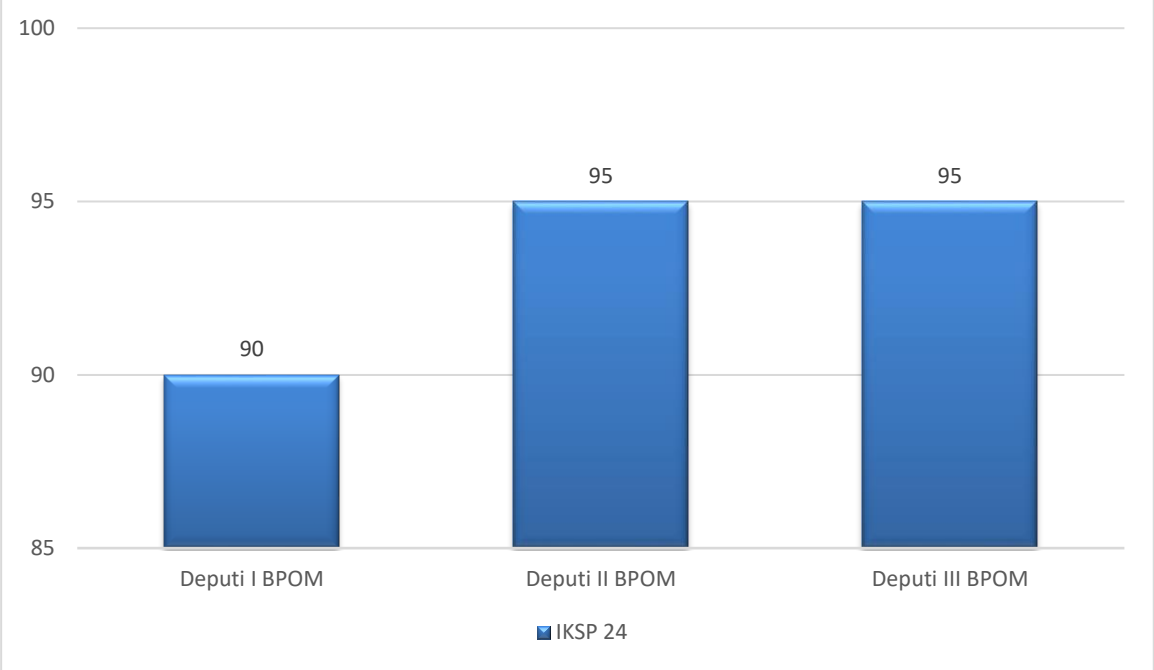

Gambar 26 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 24 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Deputi II BPOM mencatat capaian 95,00, setara dengan Deputi III BPOM yang juga memperoleh 95,00, dan lebih tinggi dibandingkan Deputi I BPOM yang mencapai 90,00. Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menjalankan proses pengelolaan barang dan jasa secara efektif, sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen

dalam memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara optimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja dan layanan publik

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	260.345.000	260.344.600	100,00	124,66	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 124,66% sehingga kegiatan ini bisa dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain dengan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

25. IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Tabel 62 : Target dan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81,00	94,56	116,74%	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 adalah sebesar 94,56, dengan target yang ditetapkan sebesar 81,00 sehingga capaian kinerjanya adalah 116,74%, masuk dalam kategori sangat baik.

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 63 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	n/a	n/a	n/a	n/a
2022	n/a	n/a	n/a	n/a
2023	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	81.00	94.56	116.74	Sangat Baik

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara baru diterapkan pada tahun 2024, data kinerjapada tahun 2020 – 2023 tidak dapat disajikan, sehingga perbandingan capaian kinerjanya tidak dapat dilakukan.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

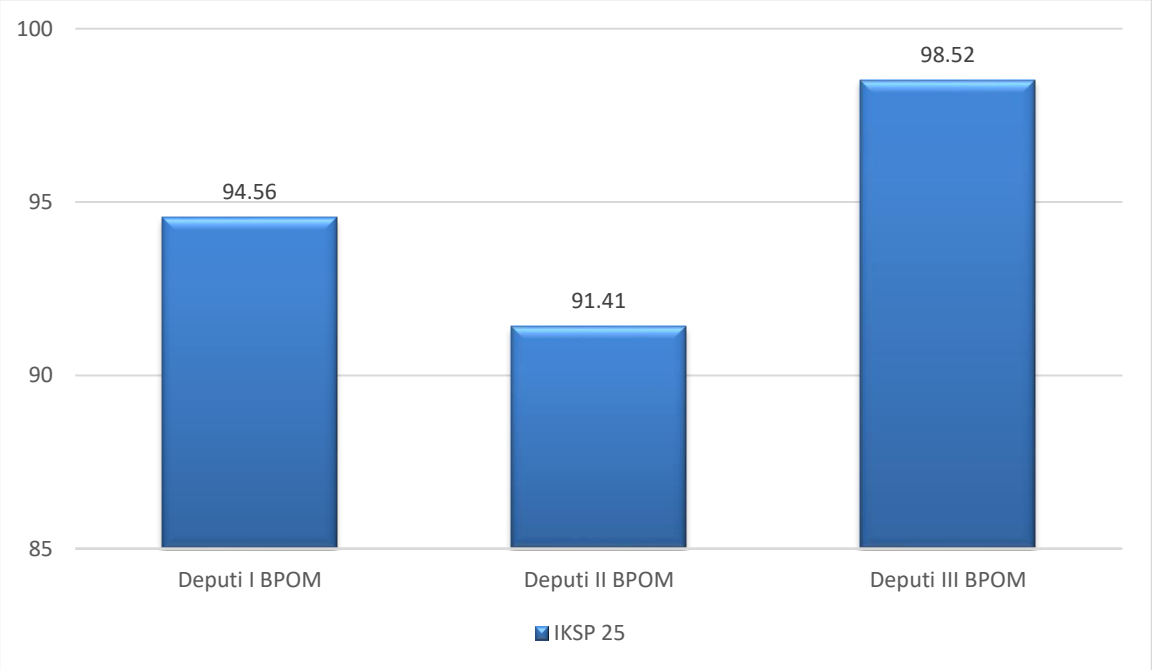

Gambar 27 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 2522 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dari grafik di atas terlihat bahwa Realisasi Kinerja Deputi II BPOM pada IKSP 25 sebesar 91,41, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi kineja 3,60, sama dengan dengan Deputi I BPOM (94,563,602), dan namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Deputi III BPOM (98,522,95).

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	10.846.000	10.845.000	99,99	116,74	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebesar 99,99%, dengan output kinerja sebesar 116,74% sehingga kegiatan ini bisa dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain melalui penataan BMN sesuai ketentuan baik pencatatan BMN, pelaporan sampai dengan pemusnahan / Penghapusan BMN.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan meningkatkan kordinasi dalam pencatatan, dan pelaporan BMN. Serta pelaksanaan penghapusan BMN yang tertib terhadap asset yang sudah dihentikan penggunaannya.

26. IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Deputi II BPOM berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri lokal serta kemandirian ekonomi nasional. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan produk yang telah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proses pengadaan, baik untuk keperluan operasional, maupun kebutuhan penunjang lainnya. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri dalam negeri dan mendukung pencapaian target penggunaan PDN di lingkungan BPOM secara berkelanjutan.

Tabel 64 : Target dan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	78,61	131,02%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan target sebesar 60,00%, realisasi capaian mencapai 78,61%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 131,02%. Meskipun capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, nilai capaian yang melebihi 120% menyebabkan indikator ini masuk dalam kategori "tidak dapat disimpulkan.".

Gambaran kinerja Deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir pada indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 65 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2021	n/a	n/a	n/a	n/a
2022	n/a	n/a	n/a	n/a
2023	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	60.00	78.61	131.02	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri baru diterapkan pada tahun 2024, data kinerja pada tahun 2020 – 2023 tidak dapat disajikan, sehingga perbandingan capaian kinerjanya tidak dapat dilakukan.

Terhadap capaian Kinerja dari Satuan Kerja sebanding di Badan POM, yaitu Deputi I dan Deputi III Badan POM, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

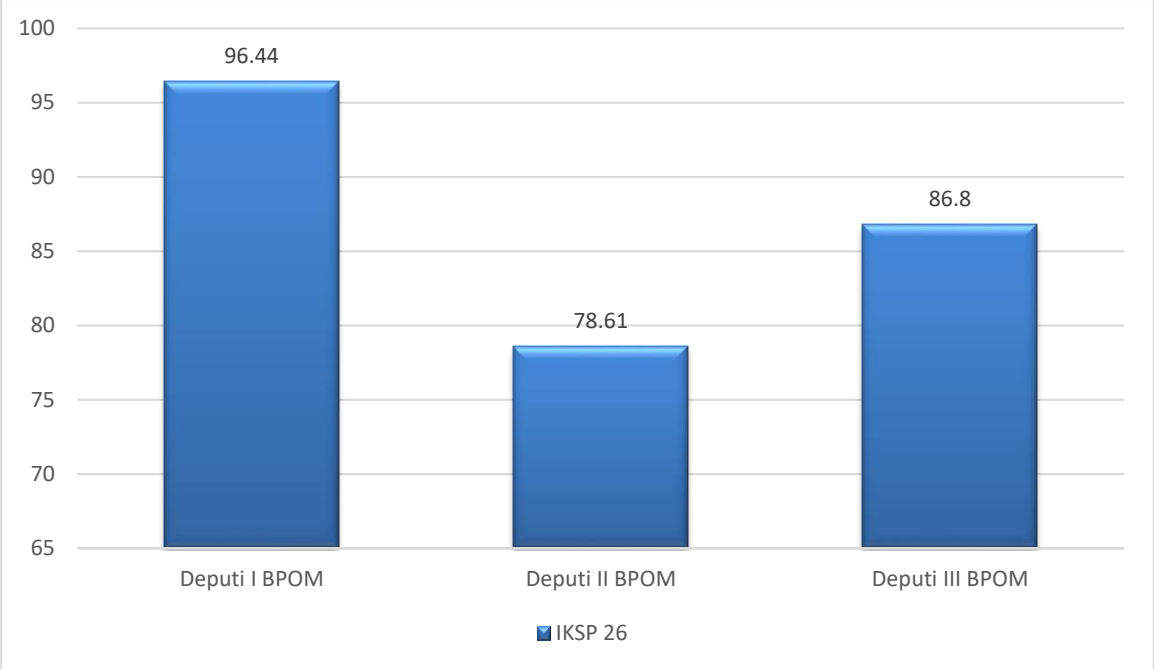

Gambar 28 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKSP 26 Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Sebanding

Dalam perbandingan kinerja indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Deputi II BPOM mencatat realisasi sebesar 78,61%, lebih rendah dibandingkan Deputi I BPOM yang mencapai 96,44% dan Deputi III BPOM dengan 86,80%. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa Deputi I BPOM memiliki tingkat optimalisasi penggunaan PDN yang lebih tinggi, sementara Deputi II BPOM masih perlu meningkatkan strategi dalam mengutamakan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa.

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 78,61% menunjukkan komitmen Deputi II BPOM dalam mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya optimalisasi pemilihan barang dan jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai regulasi yang berlaku. Deputi II BPOM telah memastikan bahwa dalam setiap proses pengadaan, produk-produk dengan kandungan TKDN tinggi menjadi prioritas utama, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Meski capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam implementasi kebijakan PDN agar lebih optimal di tahun-tahun mendatang. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	234.979.000	234.977.640	100,00	131,02	Efisien

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah sebesar 100,00%, dengan output kinerja sebesar 131,02% sehingga kegiatan ini bisa dinyatakan efisien.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain dengan memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan barang-barang produksi dalam negeri, atau barang-barang yang memiliki TKDN tinggi.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan terus memprioritaskan penggunaan barang produksi dalam negeri, atau barang dengan TKDN tinggi pada proses pengadaan barang dan jasa.

3.2 Evaluasi Tahun Ke-5

1. Analisis Trend

Dari hasil analisis trend terhadap capaian kinerja Deputi II BPOM selama periode Renstra 2020 – 2024 didapatkan hasil bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) indikator kinerja menunjukkan trend yang meningkat (on the track), 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan trend meningkat (moderat), 1 (satu) indiaktor kinerja menunjukkan trand stagnan, 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan trend menurun, dan 3 (tiga) indikator kinerja tidak dapat dilakukan analisisnya (Direktif Penugasan)

2. Analisis Gap

Berdasarkan analisi Gap terhadap capaian kinerja Deputi II BPOM selama periode Renstra 2020 – 2024 , didapatkan hasil bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja menunjukkan hasil sangat baik, dan 5 (lima) indikator kinerja menunjukkan hasil baik.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik memiliki enam tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Empat tujuan di antaranya berhasil dicapai atau *on track,* adapun dua tujuan lainnya belum tercapai atau memerlukan upaya keras. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai ketercapaian setiap tujuan berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja program:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Rata-rata	99,53	104,02
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Rata-rata	106,35	

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Rata-rata	103,39	
	Tingkat efektivitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Rata-rata	106,82	

Berdasarkan tabel di atas, tujuan tersebut telah tercapai dengan baik *(on track)*. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tercermin dari semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan temuan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peningkatan kolaborasi antar kementerian/lembaga dan swasta. Selain itu, berbagai program edukasi dan sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang pada gilirannya mendorong pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik belum tercapai 100% sehingga membutuhkan upaya keras untuk mencapainya. Belum tercapainya indikator tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, sehingga pengetahuan masyarakat terkait produk tersebut terbatas. Dengan demikian, diperlukan upaya sosialisasi lebih masif dan intensif dengan melibatkan komunitas, pelaku usaha, dan sarana layanan kesehatan.

2) Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	103,62	103,62

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator yang mendukung pencapaian tujuan tersebut telah tercapai dengan Sangat Baik sehingga tujuan tercapai dengan baik *(on track)*. Meningkatnya kapasitas SDM di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis kajian/kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dibuktikan dengan peningkatan jumlah pendidikan/pelatihan yang diikuti pegawai dan terbangunnya sistem informasi pelayanan publik untuk kemudahan dan percepatan layanan. Selain itu, terjalinnya kolaborasi antar kementerian/lembaga dapat mengoptimalkan efektivitas pengawasan dan kebijakan yang ditetapkan.

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Rata-rata	102,68	103,13
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	102,45	
	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	Rata-rata	99,70	
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	Rata-rata	103,18	
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	Rata-rata	101,50	
	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	Rata-rata	109,29	

Dari tabel di atas, diketahui bahwa 5 indikator kinerja program tercapai dengan Sangat Baik, adapun 1 indiikator kinerja program tercapai dengan nilai Cukup. Namun meskipun demikian, ketercapaian tujuan sudah tercapai dengan baik *(on track)*. Belum tercapainya indikator kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi sesuai standar di lingkup Obat Bahan Alam dikarenakan pada tahun 2020 definisi operasional yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memengaruhi nilai capaian. Selain itu, indikator kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik hanya ada pada tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap da Persentase

UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB. Tercapainya tujuan tersebut dicerminkan oleh meningkatnya jumlah UMKM yang memperoleh NIE dan nomor notifikasi, peningkatan jumlah pendampingan penyusunan protokol penelitian uji praklinik dan uji klinik serta hasil penelitian di lingkup registrasi obat bahan alam, dan simplifikasi serta deregulasi pelayanan publik di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	100,22	98,22
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	Rata-rata	95,66	
	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Rata-rata	99,59	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Rata-rata	97,10	
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	98,15	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tujuan tersebut belum tercapai dengan baik atau membutuhkan upaya keras. Belum tercapainya tujuan tersebut disebabkan oleh masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan

penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan antara petugas pusat dan petugas UPT. Hal ini berdampak pada banyaknya temuan OBA, OK, dan SK TMK. Selain itu terbatasnya pengetahuan pelaku usaha OBA yang didominasi oleh UMK terkait regulasi yang berlaku menyebabkan produk OBA yang TMK. Rekomendasi yang perlu dilakukan di antaranya:

a) Standarisasi prosedur pengawasan terutama terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan agar hasil pengawasan dapat lebih seragam antara petugas pusat dan UPT.
b) Peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk UMKM guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem, mekanisme, dan tata cara regulasi yang berlaku.
c) Penyederhanaan dan aksesibilitas regulasi agar pelaku usaha dapat mengakses informasi mengenai regulasi yang berlaku dan memperoleh kemudahan persyaratan perizinan di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
d) Mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha berupa fasilitasi pendampingan sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan tingkat kepatuhan.
e) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pengawasan untuk memastikan langkah-langkah perbaikan dapat efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Indeks kualias kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	99,83	99,83

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tujuan tersebut belum tercapai dengan baik atau memerlukan upaya keras. Belum tercapainya tujuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

a) Pada tahun 2022 terdapat perubahan metode pengukuran dan penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sehingga dilakukan penyesuaian target kajian yang diselesaikan tepat waktu dari semula 130 kajian menjadi 100 kajian

yang terdiri dari 40 kajian di bidang obat tradisional, 45 kajian di bidang suplemen kesehatan, dan 15 kajian di bidang kosmetik.

b) Penilaian IKP hanya dapat dilakukan dua tahun sekali, sehingga tidak dapat menggambarkan kinerja setiap tahunnya.

Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah:

1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui meningkatkan kolaborasi antar unit atau lembaga terkait untuk mempercepat proses kajian dan pengumpulan data.
2) Peningkatan penggunaan teknologi untuk penyelesaian kajian secara lebih cepat dan efisien.
3) Melakukan penilaian kualitas kebijakan secara mandiri dengan mengadopsi *tool* penilaian dari LAN.

6) Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	102,45	107,36
	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	112,32	
	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional,	Rata-rata	105,15	

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
	suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu			
	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	101,06	
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	97,73	
	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	91,51	
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Rata-rata	102,37	
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,	Rata-rata	101,01	

Tujuan	Indikator Kinerja Program	Sifat Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rata-rata	102,26	
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rata-rata	135,71	
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-rata	124,66	
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rata-rata	131,02	

Berdasarkan tabel di atas, tujuan tersebut sudah tercapai *(on track).* Adapun indikator kinerja program yang mendapatkan kategori Cukup adalah Nilai AKIP dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penyebab belum tercapainya indikator tersebut adalah:

1) Terdapat target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang tidak tercapai pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan rata-rata pencapaian indikator tidak tercapai.
2) Belum seluruh dokumen perencanaan SAKIP dipublikasikan pada *subsite* unit kerja
3) Masih terdapat perbedaan target indikator pada dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
4) SOP pengumpulan kinerja belum meliputi aktivitas jika terdapat perubahan data sebelum pelapporan ke Biro Perencanaan dan Keuangan.
5) Notulen rapat evaluasi internal belum dilengkapi dengan data pendukung berupa daftar hadir.
6) Perhitungan capaian kinerja belum dapat ditelusuri sehingga masih terdapat perbedaan data.

7) Dokumen Manual IKU belum sesuai ketentuan
8) Analisis capaian kinerja kurang memadai sehingga belum mengidentifikasi kendala/penyebab atas kegagalan pencapaian target dan RTL.
9) Belum seluruh personil Tim Penyusunan Perencanaan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos yang mengikuti pelatihan SAKIP

Dengan demikian, rekomendasi yang perlu dilakukan adalah:

1) Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada *subsite* unit kerja di lingkup Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
2) Memastikan keselarasan data target dan realisasi kinerja pada seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
3) Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan menambahkan mekanisme perubahan/kesalahan data kinerja/
4) Melengkapi notulen rapat evaluasi internal dengan daftar hadir
5) Memastikan perhitungan capaian kinerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev
6) Menyusun dokumen manual IKU sesuai dengan pedoman SAKIP
7) Memastikan penggunaan sumber daya yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja.
8) Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai.
9) Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Akuntabilitas di lingkup Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos terkait implementasi SAKIP

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Evaluasi

Matriks Tindak Lanjut Rekomenasi Hasil Evaluasi

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 88,68 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (89)	TW 4 /2024	Tidak dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 89,20 - Capaian dibandingkan dengan target = 100,22 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023
2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 90,91 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024, target 2024 (97) karena merupakan target RPJMN 1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan 2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan kepada pelaku usaha melalui	TW 4 /2024	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan 2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan kepada pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo 3. Melakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang 4. Melakukan pendampingan/supervisi regulasi	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 93,01 - Capaian dibandingkan dengan target 95,89 - Belum Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo 3. Melakukan desk Kepada pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang 4. Melakukan pendampingan /supervisi regulasi terkait penandaan kosmetik kepada UMKM.		terkait penandaan kosmetik kepada UMKM.			
3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 85,72 (Menurun dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (88) Melaksanakan Sosialisasi untuk pelaksanaan IKPU Tahun 2024	TW 4 /2024	Melaksanakan Sosialisasi untuk pelaksanaan IKPU Tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 87,83 - Capaian dibandingkan dengan target 99,81 - Belum Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 83,08 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (84)	TW 4 /2024	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 86,71 - Capaian dibandingkan dengan target 103,23 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 94,74 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (94,5) menjadi PK (94,8) Sosialisasi Pedoman Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) Tahun 2024	TW 4 /2024	Sosialisasi Pedoman Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) Tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 95,28 - Capaian dibandingkan dengan target 100,51 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 79,90 (Menurun dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (79) menjadi PK (80)	TW 4 /2024	Melakukan penyesuaian target pada tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 83,18 - Capaian dibandingkan dengan target 103,98 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Menurun dari tahun 2023
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 89,99 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan reviu dari unit pengampu dan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (86,13) menjadi PK (90,45)	TW 4 /2024	Melakukan penyesuaian target pada tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 91,03 - Capaian dibandingkan dengan target 100,64 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023
8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 85,38 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (85,37)	TW 4 /2024	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 85, 38 - Capaian dibandingkan dengan target 100,01 - Telah Mencapai target yang ditentukan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 90,72 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024, target 2024 (92,5) karena merupakan target rpjmn 1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan 2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan kepada pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo 3. Melakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang 4. Melakukan pendampingan	TW 4 /2024	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan 2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan kepada pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo 3. Melakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang 4. Melakukan pendampingan/supervisi regulasi terkait penandaan kosmetik kepada UMKM. 5. Melakukan Bimtek Sampling dan Pengujian kepada seluruh UPT 6. Melaksanakan Monev hasil pengawasan kepada seluruh UPT.	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 90,68 - Capaian dibandingkan dengan target 98,03 - Belum Mencapai target yang ditentukan - Menurun dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/supervisi regulasi terkait penandaan kosmetik kepada UMKM. 5. Melakukan Bimtek Sampling dan Pengujian kepada seluruh UPT 6. Melaksanakan Monev hasil pengawasan kepada seluruh UPT.					
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 82,10 (Menurun dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (82) menjadi PK (82,5) 1. Rapat Koordinasi tim Asistensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 2. Sosialisasi kepada UPT BPOM untuk dapat mengawasi	TW 4 /2024	1. Rapat Koordinasi tim Asistensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 2. Sosialisasi kepada UPT BPOM untuk dapat mengawasi implementasi kewajiban pengisian NIE oleh seller sesuai target platformnya (implementasi INTERAKSI) 3. Forum Diskusi Mekanisme Penjualan Langsung di Kementerian Perdagangan. 4. Rapat koordinasi dengan DJBC terkait pengawasan	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 83,94 - Capaian dibandingkan dengan target 101,75 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			implementasi kewajiban pengisian NIE oleh seller sesuai target platformnya (implementasi INTERAKSI) 3. Forum Diskusi Mekanisme Penjualan Langsung di Kementerian Perdagangan. 4. Rapat koordinasi dengan DJBC terkait pengawasan Importasi Kosmetik		Importasi Kosmetik			
11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 91,67 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (86) menjadi PK (92)	TW 4 /2024	Terdapat 3 lintas sektor yang bersinergi dalam pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat - Kwarda Pramuka - YPI - Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 94,12 - Capaian dibandingkan dengan target 102,30 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kesehatan dan Kosmetik							
12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 98,31 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (97) menjadi PK (99,2) Selama pelaksanaan KIE pada bulan Maret, Data Indeks Efektivitas KIE hasil tarikan Biro Hukum dan Organisasi pada bulan juni didapatkan indeks sebesar 98,71	TW 4 /2024	Selama pelaksanaan KIE pada bulan Maret, Data Indeks Efektivitas KIE hasil tarikan Biro Hukum dan Organisasi pada bulan juni didapatkan indeks sebesar 98,71	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 99,27 - Capaian dibandingkan dengan target 100,07 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 4,66 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (4,55) menjadi PK (4,71)	TW 4 /2024	Persiapan pelaksanaan penilaian PEKPPP melalui pengisian lembar penilaian di evortala.pom.go.id dan mengunggah data dukung penyelenggaraan pelayanan publik	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 4,89 - Capaian dibandingkan dengan target 103,82 - Telah Mencapai target yang ditentuka - Meningkat dari tahun 2023
14	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 92,60 (Menurun dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (91) menjadi PK (93,5) 1. Permintaan Informasi data toko/ Seller yang menjual produk OBA dan SK di marketplace kepada Idea dan marketplace 2.Pembahasan konsep materi edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan awareness seller terkait pemenuhan legalitas produk OBA	TW 4 /2024	1. Permintaan Informasi data toko/ Seller yang menjual produk OBA dan SK di marketplace kepada Idea dan marketplace 2. Pembahasan konsep materi edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan awareness seller terkait pemenuhan legalitas produk OBA dan SK di platform penjualan marketplace 3. Melaksanakan Desk percepatan sertifikasi sarana dan produk OBA, SK dan Kos	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 95,32 - Capaian dibandingkan dengan target 101,95 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan SK di platform penjualan marketplace 3.Melaksanakan Desk percepatan sertifikasi sarana dan produk OBA, SK dan Kos					
15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 88,14 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (90) Melaksanakan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA kepada peneliti dan	TW 4 /2024	Melaksanakan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA kepada peneliti dan pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta kegiatan pendampingan bersama lembaga pendanaan penelitian untuk kemudahan pengembangan obat bahan alam	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 90,07 - Capaian dibandingkan dengan target 100,08 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta kegiatan pendampingan bersama lembaga pendanaan penelitian untuk kemudahan pengembangan obat bahan alam					
16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 100 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (96,7) menjadi PK (100)	TW 4 /2024	Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilator UPT dalam pendampingan UMKM OT	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 100 - Capaian dibandingkan dengan target 100 - Telah Mencapai target yang ditentukan
17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 100 (Menurun dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (89) menjadi PK (100)	TW 4 /2024	Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilator UPT dalam pendampingan UMKM Kosmetik	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 100 - Capaian dibandingkan dengan target 100 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 90,07 (Menurun dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dari target awal pada RKT (89,2) menjadi PK (92,04) 1. Melakukan pengisian LKE ZI 2. Melaksanakan Desk pengajuan WBBM/WBK 3. Melaksanakan Rencana Aksi pembangunan ZI untuk masing-masing pokja	TW 4 /2024	1. Melakukan pengisian LKE ZI 2. Melaksanakan Desk pengajuan WBBM/WBK 3. Melaksanakan Rencana Aksi pembangunan ZI untuk masing-masing pokja	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 89,54 - Capaian dibandingkan dengan target 97,28 - Belum Mencapai target yang ditentukan - Menurun dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 79,73 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dan hasil reviu unit pengampu dari target awal pada RKT (83,8) menjadi PK (80,05) 1. Melakukan benchmark ke P3OMN 2. Telah dibangun goolesite kedeputian terkait SAKIP 3. Benchmark ke BBPOM Surabaya 4. Memedomani penyelenggaraan SAKIP yang di atur pada Keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan no 311 tahun 2023 ttg pedoman SAKIP 5. Melakukan Tindak lanjut atas hasil penilaian SAKIP periode sebelumnya	TW 4 /2024	1. Melakukan benchmark ke P3OMN 2. Telah dibangun goolesite kedeputian terkait SAKIP 3. Benchmark ke BBPOM Surabaya 4. Memedomani penyelenggaraan SAKIP yang di atur pada Keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan no 311 tahun 2023 ttg pedoman SAKIP 5. Melakukan Tindak lanjut atas hasil penilaian SAKIP periode sebelumnya	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 80,66 - Capaian dibandingkan dengan target 100,76 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	IKSP Baru	IKSP Baru	TW 4 /2024	1. Melakukan penataan Arsip 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi terkait kearsipan	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 98,19 - Capaian dibandingkan dengan target 102,26 - Telah Mencapai target yang ditentukan
21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 91,10 (Meningkat dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dan hasil reviu unit pengampu dari target awal pada RKT (86,15) menjadi PK (91,04) Melaksanakan monitoring pengembangan kompetensi seluruh pegawai	TW 4 /2024	Melaksanakan monitoring pengembangan kompetensi seluruh pegawai	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 87,82 - Capaian dibandingkan dengan target 96,46 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Menurun dari tahun 2023
22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 3,00 (Meningkat dari tahun 2022)	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (3) Melakukan monitoring	TW 4 /2024	Melakukan monitoring pemanfaatan email corporate	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 3,6 - Capaian dibandingkan dengan target 120 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		pemanfaatan email corporate					
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 94,15 (Menurun dari tahun 2022)	Terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdsarkan realisasi tahun sebelumnya dan hasil reviu unit pengampu dari target awal pada RKT (95,3) menjadi PK (96,34)	TW 4 /2024	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 98,8 - Capaian dibandingkan dengan target 102,55 - Telah Mencapai target yang ditentukan - Meningkat dari tahun 2023
24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	IKSP Baru	IKSP Baru	TW 4 /2024	IKSP Baru	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 95 - Capaian dibandingkan dengan target 124,66 - Telah Mencapai target yang ditentukan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	IKSP Baru	IKSP Baru	TW 4 /2024	IKSP Baru	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 94,56 - Capaian dibandingkan dengan target 116,74 - Telah Mencapai target yang ditentukan
26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	IKSP Baru	IKSP Baru	TW 4 /2024	IKSP Baru	-	-	- Realisasi Pada tahun 2024 sebesar 78,61 - Capaian dibandingkan dengan target 131,02 - Telah Mencapai target yang ditentukan

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan *Continuous Improvement*, Deputi II BPOM senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan kinerja sebelumnya untuk dapat menentukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diketahui terdapat 4 Indikator yang belum mencapai target dari 22 indikator kinerja yang ada. Indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut 1) Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat; 2) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha dibidang OT, SK dan Kos; 3) Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan 4) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos. Atas hasil pencapaian kinerja tersebut maka telah dilakukan evaluasi dengan melakukan analisi kegagalan serta merencanakan upaya yang akan dilakukan selama tahun 2024 untuk dapat meningkatkan pencapaian hasil kinerja tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab 3.1 tentang capaian Kinerja dan sub bab 3.4 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.

Pada akhir tahun 2024 masih terdapat 3 indikator yang mengalami penurunan nilai kinerja dari tahun sebelumnya dari 26 indikator kinerja yang ada pada tahun 2024. Indikator yang mengalami penurunan antara lain: 1) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Hal ini disebabkan karena masih tinggi nya TMK penandaan terutama pada produk kosmetik dimana informasi dan promosi merupakan *sellingg point* dalam meningkatkan penjualan kosmetik, serta belum ada nya evaluasi pre market penandaan kosmetik yang mengakibatkan label kosmetik tidak di evaluasi penandaan nya sebelum produk tersebut beredar. 2). Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, 3). Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, penurunan untuk indikator ini disebabkan antara lain karena ada nya perubahan *tools* perhitungan indeks profesionalitas yang di keluarkan oleh BKN. Atas hasil pencapaian tersebut maka akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya guna meningkatkan pencapaian hasil kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Mengingat bahwa pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara (LAN), dimana LAN melalukan pengukuran tiap 2 (dua) tahun sekali, maka hal ini tidak memenuhi kebutuhan dari Deputi II BPOM dalam hal pelaporan kinerja. Oleh karena itu, maka ke depannya untuk pengukuran kualitas kebijakan akan dilakukan secara mandiri, dengan menggunakan *tools* IKK yang dimodifikasi. Dengan pengukuran secara mandiri maka pengukuran kualitas kinerja dapat selalu terlaksana tiap tahunnya.

Selain itu juga terhadap indikator indikator yang pencapaiannya telah optimal di periode Renstra ini, diusulkan agar dihilangkan atau menggunakan indikator lainnya. Salah satu indikator yang diusulkan untuk dihilangkan antara lain: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, Indeks Profesionalitas ASN,

Penggunaan nomenklatur Obat Tradisional juga diusulkan diganti menjadi Obat Bahan Alam, mengikuti terminologi yang berlaku saat ini sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

3.6 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Namun, terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 3.406.578.000 (tiga miliar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) akibat kebijakan efisiensi dan pembatasan perjalanan dinas yang diterapkan oleh Pemerintah. Dengan adanya blokir tersebut, maka pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 50.194.505.000,- (Lima puluh miliar seratus sembiln puluhh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Meskipun demikian, Deputi II BPOM tetap berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 50.194.290.590 (lima puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang setara dengan 93,64% dari total anggaran yang tersedia atau 100,00% dari total anggaran yang dapat digunakan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjalankan program dan kegiatan prioritas, sehingga pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tetap berjalan efektif meskipun terdapat kendala anggaran.

Kendati terjadi pemangkasan anggaran, hal ini tidak cukup signifikan dalam menghambat pencapaian target kinerja Deputi II BPOM. Terbukti bahwa dengan pemanfaatan anggaran sebesar 100,00% Deputi II BPOM mampu mencapai target

kinerja dengan capaian 104,17%, hal ini menandakan bahwa Deputi II BPOM efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerjanya. Optimalisasi sumber daya yang ada tetap menjadi prioritas utama guna memastikan efektivitas setiap program yang dijalankan. Strategi yang diterapkan mencakup penyesuaian skala prioritas kegiatan, efisiensi operasional, serta digitalisasi berbagai layanan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Upaya berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran yang efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Realisasi anggaran Deputi II BPOM dialokasikan untuk berbagai kegiatan strategis, termasuk penyusunan regulasi, pengawasan pre-market dan post-market, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha. Berikut beberapa alokasi utama dalam penggunaan anggaran:

1. Penyusunan regulasi: Rp. 6.801.910.000
2. Pengawasan pre-market melalui evaluasi sebelum beredar: Rp. 10.897.024.000
3. Pengawasan post-market di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan: Rp. 11.195.244.000
4. Pengawasan post-market di bidang kosmetik: Rp. 9.611.088.000
5. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE): Rp. 4.144.275.000
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha: Rp. 10.951.542.000

Alokasi ini mencerminkan pendekatan berbasis prioritas dalam memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan, mulai dari regulasi hingga edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dapat berjalan efektif guna mendukung industri yang aman dan berdaya saing.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Deputi II BPOM secara konsisten mengukur efisiensi pengelolaan anggaran dengan membandingkan antara input berupa anggaran yang digunakan dengan output berupa capaian kinerja. Pada tahun 2024, Deputi II BPOM mencatat capaian kinerja sebesar 98,69% dengan tingkat realisasi anggaran 93,64%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Anggaran ini mencakup berbagai biaya operasional, program pengawasan, penyusunan regulasi, pemberdayaan masyarakat, KIE, pelatihan, serta kegiatan

lainnya yang mendukung optimalisasi layanan publik dan perlindungan masyarakat terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Capaian ini menggambarkan efektivitas pengelolaan anggaran yang tinggi, di mana Deputi II BPOM mampu menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia, sekaligus memperkuat transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana publik.

Ke depan, Deputi II BPOM akan terus meningkatkan inovasi dalam pengelolaan anggaran melalui optimalisasi sistem digital, perencanaan berbasis data, serta sinergi dengan lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Realisasi anggaran per sasaran

Rincian realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 66 : Realisasi Anggaran Per Sasaran Program

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	6,438,527,000	6,438,493,112	100.00%
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	2,781,126,000	2,781,114,171	100.00%
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,291,085,000	3,291,068,464	100.00%
SP 04	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,679,197,000	3,679,191,505	100.00%
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	18,513,433,000	18,513,341,266	100.00%
SP 06	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	5,546,546,000	5,546,528,281	100.00%
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	5,065,040,000	5,065,023,704	100.00%
SP 08	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen	1,333,281,000	1,333,272,683	100.00%

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
	kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal			
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,149,848,000	1,149,848,000	100.00%
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	2,396,422,000	2,396,409,704	100.00%
	Jumlah	**50,194,505,000**	**50,194,290,890**	**100,0%**

Rincian realisasi anggaran per kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 67 : Realisasi Anggaran Per kegiatan

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 01 Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	**6,438,527,000**	**6,438,493,112**	**100,00%**
IKSP 01 Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**3,050,024,000**	**3,050,009,357**	**100,00%**
Forum Komunikasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik	94.059.000	94.059.000	100,00%
Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi	862.123.000	862.121.361	100,00%
Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal	83.716.000	83.716.000	100,00%
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	629.032.000	629.028.538	100,00%
Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	276.157.000	276.155.089	100,00%
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	45.767.000	45.765.660	100,00%
Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik	153.219.000	153.218.192	100,00%
Persiapan Assessment PICs	462.012.000	462.008.958	100,00%
Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	279.094.000	279.092.560	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik	164.845.000	164.843.999	100,00%
IKSP 02 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	**3,388,503,000**	**3,388,483,755**	**100,00%**
Bimbingan Teknis Kepada UMKM OBA dalam Pelaksanaan Penarikan Kembali Produk TMS	227.123.000	227.122.769	100,00%
PENINGKATAN DUKUNGAN KOSMETIK AMAN DAN BERKUALITAS	926.872.000	926.868.810	100,00%
Intensifikasi hasil pengawasan sampling dan pengujian kosmetik di peredaran	90.639.000	90.638.651	100,00%
Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas	165.182.000	165.181.345	100,00%
Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi	245.743.000	245.742.260	100,00%
Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	237.351.000	237.348.544	100,00%
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	120.182.000	120.179.589	100,00%
Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	308.842.000	308.841.372	100,00%
Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika	1.296.000	1.296.000	100,00%
Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder	79.028.000	79.026.474	100,00%
Pendampingan serta Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam Pengawalan Keamanan dan Mutu Produk	284.714.000	284.712.088	100,00%
Peningkatan Kompetensi Petugas terkait Tindak Lanjut dan Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu OBA, OK, SK	158.158.000	158.157.163	100,00%
Percepatan Maturitas IOT untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Melalui Implementasi CPOTB	149.532.000	149.530.050	100,00%
Rapat Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	18.301.000	18.300.400	100,00%
Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Tradisional	257.939.000	257.938.900	100,00%
Rapat Koordinasi dan Penilaian Dokumen Registrasi OT dan SK bersama lintas sektor dan Tim Ahli dalam rangka Percepatan Izin Edar	91.799.000	91.798.640	100,00%
Risk Analisis Data Produk Kosmetik	25.802.000	25.800.700	99,99%
SP 02 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	**2,781,126,000**	**2,781,114,171**	**100,00%**

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
IKSP 03 Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**738,287,000**	**738,285,616**	**100,00%**
Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	306.040.000	306.040.000	100,00%
Peningkatan Kepatuhan UMKM Dalam Memenuhi Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten	302.372.000	302.371.351	100,00%
Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	124.355.000	124.354.265	100,00%
E-Rapor Industri Kosmetik	5.520.000	5.520.000	100,00%
IKSP 04 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index)* terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**2,042,839,000**	**2,042,828,555**	**100,00%**
Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	12.850.000	12.850.000	100,00%
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	307.628.000	307.625.864	100,00%
Pembentukan dan Pemberdayaan Penyuluh/Kader dalam rangka BPOM Goes to Community	1.204.850.000	1.204.843.939	100,00%
Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	142.420.000	142.418.427	100,00%
Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi OT dan SK melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait	375.091.000	375.090.325	100,00%
SP 03 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	**3,291,085,000**	**3,291,068,464**	**100,00%**
IKSP 05 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**758,121,000**	**758,114,346**	**100,00%**
Peningkatan Kompetensi Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dalam rangka Pemenuhan Dossier Registrasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	250.928.000	250.927.358	100,00%
Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT	83.567.000	83566200	100,00%
Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	107.533.000	107532504	100,00%
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi CPOTB	76.462.000	76461300	100,00%
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah	32.650.000	32.650.000	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB			
Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	206.981.000	206.976.984	100,00%
IKSP 06 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**1,207,074,000**	**1,207,068,083**	**100,00%**
Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online	443.427.000	443.425.930	100,00%
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	186.197.000	186.195.497	100,00%
Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan SuplemenKesehatan	205.097.000	205.096.015	100,00%
Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang	139.555.000	139.553.123	100,00%
Workshop perkuatan pengawasan kosmetik bagi petugas	232.798.000	232.797.518	100,00%
IKSP 07 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**1,325,890,000**	**1,325,886,035**	**100,00%**
Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	147.358.000	147.357.595	100,00%
Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	169.881.000	169.880.500	100,00%
Optimalisasi Pelayanan Publik Sertifikasi Kosmetik Melalui Perluasan Peran UPT Badan POM dan Dukungan Asosiasi Pelaku Usaha	271.521.000	271.520.300	100,00%
Peningkatan Kualitas Sarana Layanan Publik	190.074.000	190.074.000	100,00%
Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	260.625.000	260.625.000	100,00%
Workshop Pelayanan Prima dan SDM	286.431.000	286.428.640	100,00%
SP 04 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	**3,711,138,000**	**2,883,287,220**	**100,00%**
IKSP 08 Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**3,711,138,000**	**2,883,287,220**	**100,00%**
Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	65.680.000	65.680.000	100,00%
Dukungan Operasional	40.000.000	40.000.000	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	638.131.000	638.130.808	100,00%
Partisipasi pada Sidang ASEAN Cosmetic Committe	73.705.000	73.704.240	100,00%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	375.101.000	375.100.377	100,00%
Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.804.123.000	1.804.119.880	100,00%
Sosialisasi Regulasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan KosmetikKosmetik	682.457.000	682.456.200	100,00%
SP 05 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	**20,990,903,000**	**15,265,444,691**	**100,00%**
IKSP 09 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	**4,466,991,000**	**3,209,941,582**	**100,00%**
Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	69.588.000	69.587.475	100,00%
Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha	272.355.000	272.353.154	100,00%
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	3.925.000	3.925.000	100,00%
Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi	126.337.000	126.337.000	100,00%
Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	378.747.000	378.745.552	100,00%
Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)	568.875.000	568.873.434	100,00%
Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	230.599.000	230.596.820	100,00%
Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik	304.995.000	304.992.469	100,00%
Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia	33.764.000	33.763.337	100,00%
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha OT dan SK dalam Menindaklanjuti Temuan Penandaan TMK	126.160.000	126.158.700	100,00%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	335.871.000	335.868.459	100,00%
Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	237.680.000	237.679.800	100,00%
Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	418.385.000	418.382.500	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	**2,032,028,000**	**1,159,044,459**	**100,00%**
Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II	74.884.000	74.884.000	100,00%
Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	350.549.000	350.546.514	100,00%
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	828.400.000	828.394.689	100,00%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor di Bidang Pengawasan OT dan SK	331.354.000	331.352.200	100,00%
IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**1,310,324,000**	**814,753,489**	**100,00%**
Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus	331.815.000	331.813.545	100,00%
Sinergisitas Bersama Lintas Sektor dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OT, SK dan kosmetika	854.954.000	854.950.347	100,00%
Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism	70.757.000	70.755.044	100,00%
IKSP 12 Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**5,065,079,000**	**4,850,073,906**	**100,00%**
KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat	379.880.000	379.880.000	100,00%
KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	1.228.805.000	1.228.805.000	100,00%
KIE oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik	856.774.000	856.772.746	100,00%
KIE oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1.184.774.000	1.184.772.474	100,00%
KIE oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	494.042.000	494.040.509	100,00%
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	930.658.000	930.654.901	100,00%
IKSP 13 Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**2,648,924,000**	**1,849,222,579**	**100,00%**
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	396.711.000	396.690.270	99,99%
Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	102.719.000	102.717.905	100,00%
Agent Of Change Direktorat Pengawasan Kosmetik	96.908.000	96.907.500	100,00%
Akselerasi penerapan CPOTB bagi UMKM melalui pemutakhiran database dan implementasi hasil mapping dan clustering	281.132.000	281129125	100,00%
Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	40.430.000	40.430.000	100,00%
Kegiatan Tim Media Sosial	10.040.000	10.039.701	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	894.323.000	894.321.046	100,00%
Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	434.037.000	434.036.424	100,00%
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	88.573.000	88.572.700	100,00%
Pemenuhan Keperluan Perkantoran	282.879.000	282.878.486	100,00%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	157.001.000	156.999.476	100,00%
Training Awareness Risk Management	11.371.000	11.371.000	100,00%
Workshop Pelayanan Prima	173.500.000	173.500.000	100,00%
IKSP 14 Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	**5,467,557,000**	**3,382,408,676**	**100,00%**
One Stop Service Layanan Terpadu Registrasi OT, SK dan NotifikasiKosmetik	690.172.000	690.170.483	100,00%
Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	11.577.000	11.576.400	99,99%
Coaching clinic DIP	144.310.000	144.308.869	100,00%
Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik	156.350.000	156.348.440	100,00%
Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	300.000	300.000	100,00%
Evaluasi Hasil Penilaian DIP	64.841.000	64.839.700	100,00%
Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	120.058.000	120.056.528	100,00%
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Tradisional	336.892.000	336.890.744	100,00%
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatanan	336.829.000	336.827.199	100,00%
Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	34.990.000	34.990.000	100,00%
Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	547.161.000	547158650	100,00%
Penilaian DIP	255.525.000	255.523.977	100,00%
Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	4.390.000	4.390.000	100,00%
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	740.072.000	740.069.454	100,00%
Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	226.590.000	226590000	100,00%
Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang Obat Tradisional dalam Rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB	146.973.000	146972643	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	34.100.000	34.100.000	100,00%
Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	133.549.000	133.549.000	100,00%
Program Kemandirian Bahan Baku Bahan Alam Untuk Obat Bahan Alam	288.632.000	288630181	100,00%
Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan	216.206.000	216.205.500	100,00%
Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2.665.000	2.665.000	100,00%
Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	26.700.000	26.699.196	100,00%
SP 06 Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	**5,254,982,000**	**4,533,822,114**	**100,00%**
IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	**465,879,000**	**324,142,800**	**100,00%**
Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik	291.680.000	291.678.841	100,00%
Workshop Uji Praklinik/Klinik	37.305.000	37.305.000	100,00%
Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	397.633.000	397.630.700	100,00%
IKSP 16 Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	**2,774,180,000**	**2,457,864,646**	**100,00%**
KIE dalam rangka peningkatan citra jamu	1.735.871.000	1.735.870.047	100,00%
Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	9.520.000	9.520.000	100,00%
Pengembangan Bahan Obat Tradisional untuk mendukung daya saing UMKM Obat Tradisional	136.435.000	136.433.200	100,00%
Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	12.540.000	12.540.000	100,00%
Perluasan Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	791.205.000	791.202.830	100,00%
IKSP 17 Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	**2,014,923,000**	**1,751,814,668**	**100,00%**
Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap	159.846.000	159.843.920	100,00%
Expo UMKM Kosmetik Indonesia	771.745.000	771.743.800	100,00%
Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kos oleh Fasilitator UPT dan Pusat	306.054.000	306.052.353	100,00%
Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam Mendukung UMKM Kosmetik Berdaya Saing	165.498.000	165.497.500	100,00%
Peningkatan Kapasitas UMKM Kosmetik Menuju Kemandirian Berusaha	189.073.000	189.069.989	100,00%
Peningkatan Kompetensi Fasilitator UMKM Kos UPT dan Pusat	542.141.000	542.140.101	100,00%
SP 07 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat	**4,471,863,000**	**3,346,614,764**	**100,00%**

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal			
IKSP 18 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**4,042,298,000**	**3,015,677,921**	**100,00%**
Implementasi Pembangunan Zona Integritas	245.621.000	245.621.000	100,00%
Halal Bihalal Kedeputian II	7.130.000	7.130.000	100,00%
Capacity Building Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	216.372.000	216.372.000	100,00%
Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	951.989.000	951.988.133	100,00%
Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	138.290.000	138.290.000	100,00%
Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	11.427.000	11.427.000	100,00%
Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	280.888.000	280.888.000	100,00%
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Manajemen Risiko	334.711.000	334.709.859	100,00%
Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK	26.243.000	26.242.300	100,00%
Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi	449.118.000	449.115.000	100,00%
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1.077.272.000	1.077.268.042	100,00%
Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	45.310.000	45.309.940	100,00%
Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	5.075.000	5.075.000	100,00%
Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	144.000.000	144.000.000	100,00%
Perkuatan Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	15.319.000	15.319.000	100,00%
Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik	103.056.000	103.056.000	100,00%
IKSP 19 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**246,090,000**	**174,899,676**	**100,00%**
Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	19.798.000	19.798.000	100,00%
Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	128.129.000	128.128.450	100,00%
Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	111.855.000	111.854.775	100,00%
IKSP 20 Nilai Pengelolaan Kearsipan	**183,475,000**	**156,037,167**	**100,00%**
Penataan Arsip dan BMN di Direktorat PMPU OTSKK	49.854.000	49.854.000	100,00%
Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	77.361.000	77.358.267	100,00%
Penatalaksanaan Data Arsip	94.477.000	94.475.900	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 08 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	**1,349,412,000**	**1,191,943,507**	**100,00%**
IKSP 21 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**1,349,412,000**	**1,191,943,507**	**100,00%**
Evaluasi Program Kerja	531.745.000	531.743.038	100,00%
Pembekalan Evaluator Kosmetik	150.187.000	150.186.305	100,00%
Pembekalan Evaluator OT dan SK Tematik	166.249.000	166.246.751	100,00%
Pembekalan Staf Untuk Peningkatan Kompetensi Staf	44.270.000	44.268.126	100,00%
Pengayaan Uji Praklinik/Klinik	53.112.000	53.111.700	100,00%
Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik	258.936.000	258.934.578	100,00%
Peningkatan Kompetensi Pegawai	312.169.000	312.169.000	100,00%
Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	48.640.000	48.638.723	100,00%
Peningkatan Kompetensi Fungsional dan Non Fungsional Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	82.857.000	82.857.000	100,00%
Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	216.861.000	216.860.500	100,00%
SP 09 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**1,719,578,000**	**1,477,453,200**	**100,00%**
IKSP 22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**1,719,578,000**	**1,477,453,200**	**100,00%**
Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	1.149.848.000	1.149.848.000	100,00%
SK 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	**3,468,786,000**	**1,795,322,957**	**100,00%**
IKSP 23 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**2,571,284,000**	**1,165,321,217**	**100,00%**
Honorarium Pengelola Keuangan	4.320.000	4.320.000	100,00%
Honorarium PPNPN	199.784.000	199.783.350	100,00%
Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	224.196.000	224.193.520	100,00%
Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	23.900.000	23.900.000	100,00%
Pemeliharaan Kendaraan dan APD Direktorat Pengawasan OT dan SK	28.064.000	28.064.000	100,00%
Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	5.328.000	5.328.000	100,00%
Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	66.579.000	66.578.700	100,00%
Honorarium Pengelola PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik	6.768.000	6.768.000	100,00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	171.973.000	171.972.227	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	426.055.000	426.055.000	100,00%
Pembahasan Masalah Aktual	44.837.000	44.835.950	100,00%
Pengadaan Fasilitas Kantor	206.889.000	206.889.000	100,00%
Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	7.378.000	7.378.000	100,00%
Koordinasi Laporan Penerimaan PNBP	33.904.000	33.903.500	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	8.890.000	8.890.000	100,00%
Pemenuhan Keperluan perkantoran	431.387.000	431.383.217	100,00%
IKSP 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	**314,826,000**	**234,410,000**	**100,00%**
Pengadaan Fasilitas Kantor Ditwas Kosmetik	136.845.000	136.844.600	100,00%
Pengadaan Fasilitas Kantor Ditwas OTSK	123.500.000	123.500.000	100,00%
IKSP 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	**128,937,000**	**14,085,500**	**100,00%**
Penataan dan Pengelolaan BMN	10.846.000	10.845.000	99,99%
IKSP 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	**453,739,000**	**381,506,240**	**100,00%**
Pengadaan Fasilitas Kantor Dit. Registrasi OTSKK	26.500.000	26.500.000	100,00%
Pengadaan Peralatan Dit. Registrasi OTSKK	33.500.000	33.500.000	100,00%
Pengadaan Sarana Prasarana Dit. PMPU	174.979.000	174.977.640	100,00%
Jumlah	**50,194,505,000**	**50,194,290,890**	**100,00%**

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengelola efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan capaian kinerja (output) sebesar 98,69% dan realisasi anggaran (input) sebesar 71,49%, Deputi II BPOM mencapai indeks efisiensi sebesar 1,38, yang termasuk dalam kategori "efisien". Indeks ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

Capaian efisiensi ini mencerminkan komitmen Deputi II BPOM dalam menjalankan program-program pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan pendekatan yang efisien dan tepat sasaran. Efisiensi ini juga didukung oleh upaya strategis, seperti penggunaan teknologi digital dalam pengawasan, pelatihan SDM yang berkelanjutan, serta sinergi dengan lintas sektor untuk mengoptimalkan sumber daya. Deputi II BPOM telah berhasil menunjukkan bahwa dengan manajemen anggaran yang efisien, target kinerja tetap dapat dicapai dengan baik, memberikan nilai tambah yang besar bagi organisasi serta kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan. Rincian perbandingan anggaran (input) dan capaian kinerja (output) yang dihasilkan pada adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 68 : Indeks Efisiensi Perbandingan antara capaian Kinerja (Output) yang dihasilkan dengan anggaran (input) yang digunakan

Kode	SP / IKSP	Output	Input	IE
	Deputi II BPOM	**104,17**	**100,00**	**1,04**
A	***Stakeholder perspective***	**100,43**	**100,00**	**1,04**
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	98,06	100,00	0,98
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	101,71	100,00	1,02
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	101,52	100,00	1,01
B	***Internal Process Perspective***	**100,45**	**100,00**	**1,00**
SP 04	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	100,01	100,00	1,00
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	101.07	100,00	1,01
SP 06	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	100.12	100,00	1,00
C	*Learn & Growth Perspective*	111.64	100,00	1,12
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	100,10	100,00	1,00
SP 08	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	96,46	100,00	0,96
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	120,00	100,00	1,20
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	114,82	100,00	1,15

BADAN POM

BAB IV

HASIL EVALUASI TAHUN KE-5 PADA DIREKTORAT DI DEPUTI II BPOM

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB IV HASIL EVALUASI

4.1 Target Kinerja Jangka Menengah

A. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85,00	93,29	93,00	94,31	93,50	92,80	94,00	95,96	93,0	98,30
Pelayanan publik di Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	77	81,49	83	84,69	84	86,96	85	89,02	90	90,34

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70	84,61	82	88,21	82,5	94,2	83	89,25	90	95,74
	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72,00	86,27	73	91,96	74	86,33	75	95	90	95,27
	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,26	3,7	4,35	4,07	4,45	4,79	4,55	4,78	4,85	4,92
Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kosmetik	Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi obat tradisional, suplemen	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	kesehatan, notifikasi kosmetik, dan penilaian uji praklinik/klinik										
	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68,00	82,41	82	81,47	82,5	86,45	83	82,92	83,5	88,18
	Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	75	86,64	76	81,42	77	93,14	78	90,08	82	87,95
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80	77,11	82	82,92	85	85,72	88	88,04	90	90,07

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	81	81,42	84,7	84,33	87,2	91,5	86,7	92,14	93,14	91,29
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	96,55	98,46
Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	75	83,59	86	87,03	86,5	86,85	87	92,28	91,74	88,16
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,5	0,5	2	2,25	2,25	2,5	2,5	3	3	3
Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	96	100	96	100	97	100	97	100	100	100

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengalami perubahan nomenklatur Sasaran Kegiatan pada tahun 2024, semula Meningkatnya Efektivitas Pengawasan *Pre Market* Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, menjadi Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Klausul 6.2.1 ISO 9001:2015 untuk kategori *Area for Improvement* (AFI) atau saran peningkatan yaitu mengenai penyesuaian sasaran mutu yang mengukur kinerja proses evaluasi Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik dengan proses bisnis yang berdampak pada mutu dan keamanan produk yang telah beredar di masyarakat. Hal tersebut perlu ditetapkan untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penilaian DIP kosmetik karena merupakan bagian dari pengawasan *post market* yang terpisah dari kegiatan *pre market.* Kemudian, indikator kinerja kegiatan Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, dan penilaian uji praklinik/klinik ditiadakan pada tahun 2021 karena unit kerja tidak berkontribusi langsung dalam pencapaiannya.

B. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapatkan penambahan 3 indikator direktif penugasan pada tahun 2024 pada tahun sebelumnya, yaitu Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta Nilai Pengelolaan Kearsipan, Pada tahun 2022 Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tidak diteruskan kembali sesuai dengan sesuai dengan SK Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor : HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024, karena sasaran kegiatan tersebut merupakan bagian dari sasaran kegiatan Penyusunan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif, sehingga untuk efektifitas pengukuran cukup dihitung dalam 1 (satu) sasaran kegiatan saja.

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	87,53	88,00	87,53	89,00	79,73	83,70	85,37	85,60	85,37
Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Roadmap	Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,00	171,00	90,00	114,00	-	-	-	-	-	-
Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	80,00	98,00	90,00	100,00	95,50	100,00	93,00	100,00	100,00	100,00
Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	85,00	118,00	90,00	135,00	91,00	117,00	92,50	125,00	95,00	96,44

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	98,00	90,00	97,60	95,25	99,00	95,50	99,00	99,00	98,00
Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45	4,93
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	-	-	90,25	91,19
Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	78,42	82,00	84,56	86,30	94,00	88,80	90,51	91,51	88,68
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	94,70	97,41

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,00	87,26	79,00	75,61	88,00	88,00	88,50	91,01	92,14	88,57
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK	1,51	-	2,75	2,75	2,75	3,00	2,75	3,00	3,00	3,60
Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

4.2 Analisis Capaian Kinerja

4.2.1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

a. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu sebelum Diedarkan

Analisis Tren

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Perkembangan Kinerja</th></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Keamanna dan Mutu sebelum Diedarkan</td><td>85</td><td>93,29</td><td>109,75</td><td>93,0</td><td>94,31</td><td>101,41</td><td rowspan="8">Menurun</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>93,5</td><td>92,80</td><td>99,25</td><td>94</td><td>95,96</td><td>102,09</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">93</td><td colspan="2">98,30</td><td colspan="2">105,70</td></tr>
</table>

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren dengan *baseline* kinerja pada tahun 2020 dan capaian kinerja terkini tahun 2023, perkembangan kinerja menunjukkan hasil Menurun. Perkembangan kinerja cenderung menurun dari tahun *baseline,* baik terhadap kondisi terkini maupun terhadap target 2024. Perkembangan kinerja yang menurun disebabkan oleh penurunan target untuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Hal itu dipengaruhi oleh penetapan target yang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja bulan November 2023, yang tercatat sebesar 89,22, serta realisasi tahun 2022 yang belum dapat mencapai target yaitu sebesar 92,80 dari target yang ditetapkan yaitu 93,50. Adanya peningkatan realisasi kinerja di bulan Desember tahun 2023 didorong oleh strategi pembatasan layanan di akhir tahun yang mencakup penerimaan permohonan registrasi dan notifikasi baru, serta pengajuan tambahan data secara berkala. Selain itu, pengoptimalan sistem aplikasi registrasi/notifikasi *online* juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di akhir tahun.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Melakukan percepatan penilaian permohonan baru dengan melaksanakan

zero stock dokumen permohonan melalui instensifikasi.

- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM evaluator OT, SK, Kos melalui pengembangan kompetensi.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan Pusdatin untuk pengembangan sistem business intelligence pada aplikasi Notifkos dan ASROT.
- ✓ Melaksanakan pembinaan kepada industri di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui Training of Trainers Regulatory Officer.
- ✓ Meningkatkan efektivitas pendampingan kepada UMKM dan start up untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- ✓ Melaksanakan kegiatan pembatasan layanan di akhir tahun untuk penerimaan permohonan registrasi/notifikasi baru dan pengajuan tambahan data secara berkala.
- ✓ Menerapkan rencana pembatasan jumlah permohonan yang masuk disesuaikan dengan kemampuan sumber daya (manusia, sistem, dan anggaran).

Analisis Gap

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Kategori Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Keamanna dan Mutu sebelum Diedarkan</td><td>85</td><td>93,29</td><td>109,75</td><td>93,0</td><td>94,31</td><td>101,41</td><td rowspan="6">Sangat Baik</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>93,5</td><td>92,80</td><td>99,25</td><td>94</td><td>95,96</td><td>102,09</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">93</td><td colspan="2">98,30</td><td colspan="2">105,70</td></tr>
</table>

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%..

b. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Pelayanan Publik di Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, dan Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang Prima

Analisis Tren

<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</td><td colspan="3">2020</td><td colspan="3">2021</td><td rowspan="2">Perkembangan Kinerja</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP</td><td>77</td><td>81,49</td><td>105,83</td><td>83</td><td>84,69</td><td>102,04</td><td rowspan="6">Meningkat (On The Track)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>84</td><td>86,96</td><td>103,52</td><td>85</td><td>89,02</td><td>104,73</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">90</td><td colspan="2">90,34</td><td colspan="2">100,94</td></tr>
</table>

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat *(On The Track)*. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha terkait tata cara dan mekanisme registrasi dan/atau notifikasi.
- ✓ Melaksanakan evaluasi terhadap bisnis proses layanan registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik terutama dalam hal simplifikasi dan deregulasi.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM terkait pengembangan dan pemeliharaan ASROT, NOTIFKOS, dan SIREKA.
- ✓ Meningkatkan koordinasi bersama unit lain dan Tim Ahli untuk produk yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam berkaitan dengan kategori pendaftaran produk, kemanfaatan produk, ketidaksesuaian data administrasi, aspek keamanan dan klaim, rancangan iklan, dan beberapa kasus lainnya.

- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Biro Umum terkait kendala pada sistem antrian online yang memengaruhi waktu penyelesaian serta pelaksanaan sistem, mekanisme, dan prosedur.

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	77	81,49	105,83	83	84,69	102,04	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	84	86,96	103,52	85	89,02	104,73	
	2024						
	T		R		C		
	90		90,34		100,94		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%.

c. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	77	81,49	105,83	83	84,69	102,04	Meningkat (On The Track)
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	84	86,96	103,52	85	89,02	104,73	
	2024						
	T		R		C		
	90		90,34		100,94		
Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Persentase	72	86,27	119,82	73	91,96	125,92	Meningkat (On

<table>
<tr><td rowspan="8">pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti</td><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td><td rowspan="8">The Track)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>74</td><td>86,33</td><td>116,66</td><td>75</td><td>95</td><td>127,32</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">90</td><td colspan="2">95,27</td><td colspan="2">105,86</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Kegiatan</td><td colspan="3">2020</td><td colspan="3">2021</td><td>Perkembangan Kinerja</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td rowspan="11">Meningkat (On The Track)</td></tr>
<tr><td>3,26</td><td>3,7</td><td>113,50</td><td>4,35</td><td>4,07</td><td>93,56</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>4,45</td><td>4,79</td><td>107,64</td><td>4,55</td><td>4,78</td><td>105,05</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">4,85</td><td colspan="2">4,92</td><td colspan="2">101,44</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Persentase Pengaduan terkait Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, dan Penilaian Uji Praklinik/Klinik, dan DIP yang Ditindaklanjuti dan tahun 2020 untuk indikator kinerja lainnya sebagai *baseline,* serta tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat *(On The Track)* pada semua indikator kinerja. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Melaksanakan kegiatan intensifikasi data permohonan registrasi/notifikasi dalam rangka mempercepat penerbitan izin edar
- ✓ Melaksanakan kegiatan coaching clinic untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman regulatory officer.
- ✓ Meningkatkan kompetensi evaluator di bidang registrasi obat bahan alam,

suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Pusdatin secara berkelanjutan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi.
- ✓ Melakukan sosialisasi layanan aduan di unit kerja kepada pengguna layanan sehingga pemantauan aduan dapat terpusat di satu kanal.
- ✓ Pengembangan sistem pengaduan yang terintegrasi dengan sistem pendaftaran produk.
- ✓ Mengembangkan dan mempertahankan kegiatan inovasi layanan pendampingan secara terpadu (*one stop service)* serta mengikutsertakan inovasi tersebut dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.
- ✓ Meningkatkan pemanfaatan *subsite* dan media sosial untuk informasi konsultasi dan pengaduan layanan publik.
- ✓ Meninjau mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan publik secara rutin agar relevan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	77	81,49	105,83	83	84,69	102,04	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	84	86,96	103,52	85	89,02	104,73	
	2024						
	T		R		C		
	90		90,34		100,94		
Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72	86,27	119,82	73	91,96	125,92	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	74	86,33	116,66	75	95	127,32	
	2024						
	T		R		C		
	90		95,27		105,86		
Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi	3,26	3,7	113,50	4,35	4,07	93,56	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,45	4,79	107,64	4,55	4,78	105,05	
	2024						
	T		R		C		
	4,85		4,92		101,44		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada seluruh indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%.

d. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Persentase Keputusan Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang Diselesaikan sesuai Standar	68,00	82,41	121,19	82	81,47	99,35	Meningkat (Moderat)
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	82,5	86,45	104,79	83	82,92	99,90	
	2024						
	T		R		C		
	83,5		88,18		105,60		
Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Persentase Pendampingan di Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang Efektif	75	86,64	115,52	76	81,42	107,13	Meningkat (Moderat)
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	77	93,14	120,96	78	90,08	115,49	
	2024						
	T		R		C		
	82		87,95		107,26		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Persentase Pendampingan di Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang Efektif dan tahun 2020 untuk indikator kinerja Persentase Keputusan

Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang Diselesaikan sesuai Standar sebagai *baseline,* serta tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (Moderat) pada semua indikator kinerja. Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Pengembangan sistem ASROT dan NOTIFKOS serta peningkatan frekuensi pelatihan untuk *regulatory officer*
- ✓ Melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha dan peneliti ke daerah sentra produksi obat bahan alam dan kosmetik untuk mempercepat penerbitan NIE.
- ✓ Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dengan melibatkan fasilitator UPT BPOM.
- ✓ Mengoptimalkan penggunaan subsite dan SELASAR sebagai sarana edukasi mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, serta penilaian uji praklinik/klinik untuk OBA, SK, dan Kos, dan penilaian DIP kosmetik

Analisis Gap

<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</td><td colspan="3">2020</td><td colspan="3">2021</td><td rowspan="2">Kategori Kinerja</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Persentase Keputusan Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang Diselesaikan sesuai Standar</td><td>68,00</td><td>82,41</td><td>121,19</td><td>82</td><td>81,47</td><td>99,35</td><td rowspan="8">Sangat Baik</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>82,5</td><td>86,45</td><td>104,79</td><td>83</td><td>82,92</td><td>99,90</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">83,5</td><td colspan="2">88,18</td><td colspan="2">105,60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</td><td colspan="3">2020</td><td colspan="3">2021</td><td rowspan="2">Perkembangan Kinerja</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Persentase Pendampingan di Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen</td><td>75</td><td>86,64</td><td>115,52</td><td>76</td><td>81,42</td><td>107,13</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
</table>

Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang Efektif	77	93,14	120,96	78	90,08	115,49	
	2024						
	T		R		C		
	82		87,95		107,26		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada seluruh indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%.

e. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat Bahan Alam

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80	77,11	96,39	82	82,92	101,12	Meningkat *(On The Track)*
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	85	85,72	100,85	88	88,04	100,05	
	2024						
	T		R		C		
	90		90,07		100,08		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Meninjau kembali rencana penelitian dengan memperhatikan ketersediaan dana untuk melihat alternatif pendanaan yang tersedia.
- ✓ Memfasilitasi melalui forum pertemuan jika terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian.

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80	77,11	96,39	82	82,92	101,12	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	85	85,72	100,85	88	88,04	100,05	
	2024						
	T		R		C		
	90		90,07		100,08		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%.

f. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Optimal

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81	81,42	100,52	84,7	84,33	99,56	Meningkat *(On The Track)*
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	87,2	91,5	104,93	86,7	92,14	106,27	
	2024						
	T		R		C		
	93,14		91,29		98,01		
Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	Stagnan
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		R		C		
	96,55		98,46		101,98		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator Indeks RB yang dilakukan dengan

menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (*On The Track*). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024. Adapun Nilai Kearsipan tidak diukur perkembangan kinerjanya karena baru dimasukkan dalam PK pada tahun 2024, yang mana pada periode sebelumnya adalah direktif penugasan.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Melengkapi target prioritas dalam rencana kerja ZI dengan ukuran indikator keberhasilan dan melakukan upaya aktif untuk menyebarkan kampanye pembangunan ZI kepada unit kerja sekitar.
- ✓ Menganalisis dampak implementasi inovasi berupa pemangkasan alur proses verifikasi badan usaha pemohon notifikasi kosmetik dan simplifikasi alur pendaftaran komoditi OTSK yang dirasakan oleh pelaku usaha secara terukur baik output maupun outcome yang menggambarkan peningkatan berkelanjutan dari kondisi predikat WBK menuju WBBM.
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik sesuai dengan kondisi, mengidentifikasi kendala, rencana aksi tindak lanjut (RATL) perbaikan dan melaksanakan tindak lanjut atas RATL secara berkala.
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai dan menganalisis dampak pengembangan kompetensi terhadap perbaikan kinerja.
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik serta menindaklanjuti pengaduan secara berkala.
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik dan mengukur dampak yang bersifat outcome yang dirasakan oleh penerima layanan atas inovasi tersebut.
- ✓ Menjaga kualitas dalam pemberian pelayanan publik dan/atau kualitas penerapan budaya anti korupsi dengan melaksanakan survei secara berkala serta menindaklanjuti hasil survei.
- ✓ Melaksanakan continous improvement dan meningkatkan kualitas

dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81	81,42	100,52	84,7	84,33	99,56	Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	87,2	91,5	104,93	86,7	92,14	106,27	
	2024						
	T		R		C		
	93,14		91,29		98,01		
Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		R		C		
	96,55		98,46		101,98		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Baik dan Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan dan membuat strategi untuk pencapaian indikator kinerja yang capaiannya belum 100% untuk mencapai target di akhir periode Renstra 2020-2024.

g. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Berkinerja Optimal

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75	83,59	111,45	86	87,03	101,20	Meningkat *(On The Track)*
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	86,5	86,85	100,40	87	92,28	106,07	
	2024						
	T		R		C		
	91,74		88,16		96,10		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Merencanakan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan jabatan fungsional untuk pegawai yang berstatus PNS dan PPPK
- ✓ Menyusun anggaran pengembangan kompetensi dalam periode 1 (satu) tahun.
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75	83,59	111,45	86	87,03	101,20	Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	86,5	86,85	100,40	87	92,28	106,07	
	2024						
	T		R		C		
	91,74		88,16		96,10		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan dan membuat strategi untuk pencapaian indikator kinerja yang capaiannya belum 100%.

h. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Terintegrasi dan Adaptif

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	

Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,5	0,5	33,33	2	2,25	112,50	Meningkat *(On The Track)*
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	2,5	3,0	120	3,0	3,0	100	
	2024						
	T		R		C		
	3,0		3,60		120		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk memanfaatkan email *corporate* dalam melaksanakan pekerjaan.
- ✓ Verifikasi data di BOC oleh pimpinan unit kerja dilanjutkan untuk dilakukan secara tepat waktu.

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,5	0,5	33,33	2	2,25	112,50	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	2,5	3,0	120	3,0	3,0	100	
	2024						
	T		R		C		
	3,0		3,60		120		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. . Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%..

i. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Tingakt Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	96	100	104,17	96	100	104,17	Stagnan
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	97	100	103,09	97	100	103,09	
	2024						
	T		R		C		
	100		100		100		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Stagnan. Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun *baseline* terhadap kondisi terkini.

Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang:

- ✓ Menyusun POA dengan lebih cermat dan akurat.
- ✓ Melakukan komitmen terhadap pegawai agar lebih konsisten dalam melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan.

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	96	100	104,17	96	100	104,17	Sangat Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	97	100	103,09	97	100	103,09	
	2024						
	T		R		C		
	100		100		100		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan.Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%.

4.2.2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

a. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Analisis Tren

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Perkembangan Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</td><td>81,00</td><td>87,53</td><td>108,06</td><td>88,00</td><td>87,53</td><td>99,47</td><td rowspan="6">Meningkat (On The Track)</td></tr>
<tr><th colspan="3">2022</th><th colspan="3">2023</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td>89,00</td><td>79,73</td><td>89,58</td><td>83,70</td><td>85,37</td><td>102,00</td></tr>
<tr><th colspan="6">2024</th></tr>
<tr><th colspan="2">T</th><th colspan="2">R</th><th colspan="2">C</th></tr>
<tr><td colspan="2">85,60</td><td colspan="2">85,37</td><td colspan="2">99,73</td></tr>
</table>

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren dengan baseline kinerja pada tahun 2020 dan capaian kinerja terkini tahun 2023, maka perkembangan kinerja menunjukkan hasil Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun baseline, baik terhadap kondisi terkini maupun terhadap target 2024, unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan dan membuat strategi untuk pencapaian indikator kinerja yang capaiannya belum 100%.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ mengingat pengukuran indeks ini dilakukan oleh pihak Eksternal (Lembaga Administrasi Negara), dimana pengukuran dilakukan 2 (dua) tahun sekali, sementara pelaporan kinerja perlu dilakukan tiap tahun, maka diusulkan agar dilakukan penilaian secara mandiri terhadap kualitas kebijakan. Pengukuran dapat dilakukan oleh Pihak BPOM dengan mengadopsi tools yang digunakan oleh LAN.
- ✓ melakukan penyusunan regulasi sesuai dengan prinsip *Good Regulatory Practise,* dengan turut melibatkan pelaku usaha dalam prosesnya.
- ✓ Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang dikeluarkan

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Kategori Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	87,53	108,06	88,00	87,53	99,47	Baik
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	89,00	79,73	89,58	83,70	85,37	102,00	
	2024						
	T		R		C		
	85,60		85,37		99,7		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan dan membuat strategi untuk pencapaian indikator kinerja yang capaiannya belum 100%.

b. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Roadmap

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	R	C	T	R	C	
Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,00	171,00	213,75	90,00	114,00	126,67	Meningkat (Moderat)
	2022			2023			
	T	R	C	T	R	C	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		R		C		
	-		-		-		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (Moderat). Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target. Pada tahun 2022, indikator tidak dilanjutkan kembali sesuai dengan Sk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor : HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024.

Rekomendasi

Indikator ini telah dihentikan pengukurannya karena masih merupakan bagian dari proses penyusunan regulasi.

Analisis Gap

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Kategori Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</td><td>80,00</td><td>171,00</td><td>213,75</td><td>90,00</td><td>114,00</td><td>126,67</td><td rowspan="8">Tidak dapat disimpulkan</td></tr>
<tr><th colspan="3">2022</th><th colspan="3">2023</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><th colspan="6">2024</th></tr>
<tr><th colspan="2">T</th><th colspan="2">R</th><th colspan="2">C</th></tr>
<tr><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Belum dapat disimpulkan, karena tidak ada realiasasi pada tahun 2024. Indikator tidak dilanjutkan kembali sesuai dengan Sk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor : HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024.

c. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif

Analisis Tren

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Perkembangan Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan</td><td>80,00</td><td>98,00</td><td>122,50</td><td>90,00</td><td>100,00</td><td>111,11</td><td rowspan="8">Meningkat (On The Track)</td></tr>
<tr><th colspan="3">2022</th><th colspan="3">2023</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td>95,50</td><td>100,00</td><td>104,71</td><td>93,00</td><td>100,00</td><td>107,53</td></tr>
<tr><th colspan="6">2024</th></tr>
<tr><th colspan="2">T</th><th colspan="2">R</th><th colspan="2">C</th></tr>
<tr><td colspan="2">100</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2">90</td></tr>
</table>

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2019 untuk Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan dan tahun 2020 untuk indikator kinerja lainnya sebagai *baseline,* serta tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat *(On The Track)* pada semua indikator kinerja. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Melakukan penyusunan regulasi sesuai dengan tahapan penyusun regulasi
- ✓ Melakukan monitoring progres penyusunan regulasi
- ✓ Melibatkan pelaku usaha dalam proses penyusunan

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	80,00	98,00	122,50	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	95,50	100,00	104,71	93,00	100,00	107,53	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	100		100		100		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada seluruh indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi sama dengan 100%.

d. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			Perkembangan Kinerja
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Persentase Sosialisasi standar	85,00	118,00	138,82	90,00	135,00	150,00	Menurun
	2022			**2023**			

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	**T**	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	91,00	117,00	128,57	92,50	125,00	135,14	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	95,00		96,44		101,52		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder, serta tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Menurun, dikarenakan perkiraan capaian pada tahun 2024 menurun. Perkembangan kinerja cenderung menurun namun dapat diperkirakan mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik konvensional (tatap muka) maupun nonkonvensional (online meeting, sosial media, *podcast*)
- ✓ Meningkatkan frequensi sosialisasi dengan melibatkan UPT di daerah

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	85,00	118,00	138,82	90,00	135,00	150,00	Sangat Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	91,00	117,00	128,57	92,50	125,00	135,14	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	95,00		96,44		101,52		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar

atau sama dengan 100%.

e. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	98,00	115,29	90,00	97,60	108,44	Meningkat *(On The Track)*
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	95,25	99,00	103,94	95,50	99,00	103,66	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	99,00		98,22		99,21		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ meningkatkan pemakaian sistem informasi dalam proses permohonan kajian
- ✓ meningkatkan kompetensi staf penyusun kajian
- ✓ melibatkan tim ahli dalam proses penyusunan kajian

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat	85,00	98,00	115,29	90,00	97,60	108,44	Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	95,25	9,00	103,94	95,50	99,00	103,66	
	2024						
	T		**R**		**C**		

waktu	99,00	98,00	99,00	

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih 99%.

f. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan analisis untuk indikator direktif penugasan
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	4,45		4,93		110,79		
Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan analisis untuk indikator direktif penugasan
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	90,25		91,19		101,04		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai capaian terkini, tidak diukur perkembangan kinerjanya karena baru dimasukkan dalam PK pada tahun 2024, yang mana pada periode sebelumnya adalah direktif penugasan.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di

masa mendatang yaitu:

- ✓ Meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik
- ✓ meningkatkan pemakaian teknologi informasi dalam pemberian layanan publik
- ✓ menggunakan kecerdasan buatan dalam pemberian layanan konsultasi

Analisis Gap

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Kategori Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="6">Sangat Baik</td></tr>
<tr><th colspan="3">2022</th><th colspan="3">2023</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><th colspan="6">2024</th></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">4,45</td><td colspan="2">4,93</td><td colspan="2">110,79</td></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Perkembangan Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="6">Sangat Baik</td></tr>
<tr><th colspan="3">2022</th><th colspan="3">2023</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><th colspan="6">2024</th></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">90,25</td><td colspan="2">91,19</td><td colspan="2">101,04</td></tr>
</table>

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih dari 100%.

g. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	78,42	96,81	82,00	84,56	103,12	Meningkat *(On The Track)*
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	86,30	94,00	108,92	88,80	90,51	101,93	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	91,51		88,68		96,91		
Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan analisis untuk indikator direktif penugasan
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	94,70		97,41		102,86		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja untuk Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah Meningkat (On The Track) dan Nilai Pengelolaan Kearsipan tidak dilakukan analisis untuk indikator direktif penugasan, karena merupakan indicator direktif penugasan pada tahun sebelumnya. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ meningkatkan kompentesi arsiparis
- ✓ mensosialisasikan kebijakan terkait pengelolaan arsip dan tata naskah dinas kepada seluruh pegawai
- ✓ meningkatkan upaya pengelolaan arsip

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	78,42	96,81	82,00	84,56	103,12	Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	86,30	94,00	108,92	88,80	90,51	101,93	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	91,51		88,68		96,91		
Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	Sangat Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	-	-	-	-	-	-	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	94,70		97,41		102,86		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh keduanya adalah Baik dan Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan.

h. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,00	87,26	113,32	79,00	75,61	95,71	Meningkat *(On The Track)*
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	88,00	88,00	100,00	88,50	91,01	102,84	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	92,14		88,57		96,13		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang yaitu:

- ✓ Mendorong pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan (teknis, fungsional) baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak lain
- ✓ mendorong pegawai untuk mengikuti tugas belajar
- ✓ melalukan sosialisasi secara periodik terkait kode etik dan disiplin pegawai

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,00	87,26	113,32	79,00	75,61	95,71	Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	88,00	88,00	100,00	88,50	91,01	102,84	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	92,14		88,57		96,13		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 96,13%.

i. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK	1,51	-	-	2,75	2,75	100,00	Meningkat (*On The Track*)
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	2,75	3,00	109,09	2,75	3,00	109,09	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	3,00		3,60		120,00		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (On The Track). Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang:

- ✓ mendorong pegawai untuk terus memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian layanan dan menjalankan tugas
- ✓ meningkatkan pemanfaatan dashboard BoC dalam pengambilan keputusan

Analisis Gap

<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja Kegiatan</th><th colspan="3">2020</th><th colspan="3">2021</th><th rowspan="2">Kategori Kinerja</th></tr>
<tr><th>T</th><th>R</th><th>C</th><th>T</th><th>R</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK</td><td>1,51</td><td>-</td><td>-</td><td>2,75</td><td>2,75</td><td>100,00</td><td rowspan="6">Sangat Baik</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>T</td><td>R</td><td>C</td><td>T</td><td>R</td><td>C</td></tr>
<tr><td>2,75</td><td>3,00</td><td>109,09</td><td>2,75</td><td>3,00</td><td>109,09</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">T</td><td colspan="2">R</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td colspan="2">3,00</td><td colspan="2">3,60</td><td colspan="2">120,00</td></tr>
</table>

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan.Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi lebih besar atau sama dengan 100%.

j. Evaluasi Akhir pada Sasaran Kegiatan Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel

Analisis Tren

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Perkembangan Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Stagnan
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	100,00		100,00		100,00		

Hasil Evaluasi

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Stagnan. Indikator ini bersifat stagnan karena target dan realisasi dari 2020-2024 sudah optimal.

Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang:

- ✓ melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara efektif
- ✓ meningkatkan pemantauan pelaksanaan anggaran
- ✓ Melakukan optimalisasi anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja

Analisis Gap

Indikator Kinerja Kegiatan	**2020**			**2021**			**Kategori Kinerja**
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
	2022			**2023**			
	T	**R**	**C**	**T**	**R**	**C**	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2024						
	T		**R**		**C**		
	100,00		100,00		100,00		

Berdasarkan analisis gap yang dilakukan pada indikator tersebut di atas, notifikasi kinerja pembangunan yang diperoleh adalah Sangat Baik, sehingga unit kerja perlu mempertahankan

kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator ini, target akhir tahun periode Renstra 2020 – 2024 mendapatkan kategori Tercapai dengan realisasi sama dengan 100%.

BAB V PENUTUP

Pada tahun 2024, Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 104,17 masuk dalam predikat Istimewa. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 100,43 dengan predikat istimewa, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,45 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 111,64 dengan predikat Istimewa.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Deputi II BPOM Pada tahun 2024 ini, sebanyak terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja masuk kriteria sangat baik, 2 (dua) indkator kinerja masuk kategori baik, 5 (lima) indikator kinerja masuk kategori cukup, dan 2 (dua) indikator kinrja masuk indikator tidak dapat disimpulkan.

Dengan realisasi anggaran sebesar 50.194.290.590 dari pagu anggaran efektif sebesar Rp. Rp. 50.194.505.000,- setara dengan 100,00%, Deputi II BPOM telah mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai target kinerja. Meskipun terdapat blokir anggaran sebesar Rp. Rp. 3.406.578.000, namun upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

Kesimpulan

Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program pengawasan pada tahun 2024. Capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Dengan penggunaan sumber daya (anggaran sebesar 100,00%), Deputi II BPOM mampu meraih kinerja NPSS sebesar 104,17, hal ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menggunakan anggarannya dengan efisien, sehingga mampu mencapai output kinerja yang tinggi. Pengukuran efisiensi ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, Deputi II BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi. Beberapa permasalahan / kendala dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan cukup besar, realisasinya sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti blokir anggaran dan kebutuhan operasional yang tinggi. Keterbatasan jumlah dan kapabilitas tenaga pengawas juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan kecepatan dalam menangani pelanggaran serta risiko kesehatan yang mungkin timbul.

Selain itu, Deputi II BPOM juga dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi produk ilegal dan tidak memenuhi standar yang masih banyak beredar di pasar. Produk-produk ini tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga merusak reputasi industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang seharusnya diatur dengan ketat. Deputi II BPOM perlu memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan intensitas operasi penertiban produk ilegal. Permasalahan lainnya termasuk rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Upaya edukasi dan kampanye publik yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang ditetapkan.

Deputi II BPOM telah merancang beberapa strategi komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi anggaran. Deputi II BPOM berencana untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengawas untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam melakukan inspeksi dan pengawasan. Selain itu, pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta pemantauan ketat terhadap penggunaan anggaran, akan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan maksimal untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Strategi lainnya melibatkan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk meningkatkan intensitas operasi penertiban produk ilegal. Deputi II BPOM juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, seperti sistem informasi manajemen pengawasan dan aplikasi mobile untuk inspeksi lapangan. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, Deputi II BPOM akan

memperkuat program edukasi dan kampanye publik melalui berbagai media, termasuk media sosial. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada konsumen untuk meningkatkan literasi tentang produk yang aman dan bermutu, tetapi juga kepada pelaku usaha untuk mendorong mereka mematuhi regulasi yang ada. Dengan penerapan strategi-strategi ini, Deputi II BPOM berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan produk yang beredar di pasar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan. Deputi II BPOM dapat meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan melalui sistem informasi manajemen dan aplikasi mobile. Selain itu, penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk operasi penertiban produk ilegal dan intensifikasi kampanye publik serta edukasi masyarakat melalui berbagai media akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen. Dengan langkah-langkah ini, Deputi II BPOM diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar.

BADAN POM

BAB V
PENUTUP

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BADAN POM

LAMPIRAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Plt. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	03 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas	84 Indeks
2.	08 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37 Indeks
3.	11 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5 %
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5 %
		03 - Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92 %
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.2 %
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.71 Indeks
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5 %
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90 %
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	100 %
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	100 %
5.	15 - Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89 Indeks
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat	97 %

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.8 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45 Indeks
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04 Indeks
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05 %
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02 Nilai
8.	18 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04 Indeks
9.	19 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3 Indeks
10.	20 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34 %
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81 Nilai
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 53,601,083,000 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,286,030,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	11,245,244,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	9,611,088,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,610,155,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	10,897,024,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	10,951,542,000

Jakarta, 21 December 2023

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	03 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												88	1,203,308,000
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas												84	3,125,973,000
2.	08 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85.37	4,227,933,000
3.	11 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	4,872,445,000
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	1,924,725,500
		03 - Persentase		10	20	25	30	40	40	50	60	70	70	92	1,696,563,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik							99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	4,006,320,000
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									4.71	4.71	4.71	4.71	3,174,768,400
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3,481,950,200
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424,303,000
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap					8	18	36	48	60	70	80	100	2,238,090,000
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB					8	18	36	48	60	70	80	100	2,000,000,000
5.	15 - Terwujudnya Obat	01 - Indeks Pengawasan Obat												89	2,976,899,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat			97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3,624,613,000
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												94.8	1,252,096,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80	1,144,190,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90.45	2,416,384,500
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												92.04	2,070,109,600
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80.05	128,424,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												96.02	484,903,000
8.	18 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												91.04	2,591,238,000
9.	19 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,089,766,200
10.	20 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												96.34	661,993,600
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												76.21	1,303,734,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												81	1,096,101,500
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri												60	384,251,500
														Total	53,601,083,000

Jakarta, 18 September 2024

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan	: Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid	Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89 %
		02 - Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78.5 %
2.	02 - Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	01 - Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.5 %
3.	03 - Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91.75 Indeks
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88 %
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81 %
		03 - Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.5 %
5.	05 - Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72 %
6.	06 - Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92 %
		02 - Indeks pelayanan publikdi bidang pengawasan OT dan SK	4.9 Indeks
7.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	01 - Indeks RB Direktorat PengawasanObat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.09 Indeks
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.2
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Kesehatan secara Akuntabel	Suplemen Kesehatan	

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12,382,354,000 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,137,110,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	11,245,244,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1,273,980,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	A - Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	465,250,000	465,250,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	F - Akselerasi penerapan CPOTB bagi UMKM melalui pemutakhiran database dan implementasi hasil mapping dan clustering	808,730,000	808,730,000

02 - Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	157,142,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	A - Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	314,285,000	157,142,500

2.	02 - Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	01 - Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	404,083,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	209,500,000	209,500,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Sertifikasi Ekspor Impor Produk OT dan SK	E - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi	106,120,000	106,120,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	B - Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	176,927,000	88,463,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
3.	03 - Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan												91.75	2,446,257,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	D - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	390,125,000	390,125,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	C - Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT	136,650,000	136,650,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	B - Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online	348,447,000	348,447,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	053 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi II	A - KIE oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1,137,110,000	1,137,110,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	C - Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi OT dan SK melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait	433,925,000	433,925,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	2,395,753,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	H - Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha OT dan SK dalam Menindaklanjuti Temuan Penandaan TMK	378,320,000	378,320,000
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam	B - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	365,000,000	365,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rangka Pengawasan OT dan SK			
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	A - Peningkatan Kepatuhan UMKM Dalam Memenuhi Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten	570,910,000	570,910,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	J - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	704,550,000	704,550,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	G - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	376,973,000	376,973,000

02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1,353,732,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	A - Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	314,285,000	157,142,500
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	F - Program Intensitas Pengawasan dan Penindakan Penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Hulu Hilir)	559,100,000	559,100,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	H - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor di Bidang Pengawasan OT dan SK	374,790,000	374,790,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	G - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	262,700,000	262,700,000

03 - Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	347,810,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	E - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	114,880,000	114,880,000
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Monitoring Efek Samping OT dan SK	A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	232,930,000	232,930,000

5.	05 - Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan												72	731,073,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	D - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	320,060,000	320,060,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	B - Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	176,927,000	88,463,500
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	I - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	322,550,000	322,550,000

6.	06 - Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	720,187,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	64,452,000	64,452,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Sertifikasi Ekspor Impor Produk OT dan SK	D - Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	59,840,000	59,840,000
3.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Sertifikasi Ekspor Impor Produk OT dan SK	C - Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	51,920,000	51,920,000
4.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Sertifikasi Ekspor Impor Produk OT dan SK	B - Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	102,875,000	102,875,000
5.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	D - Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang Obat Tradisional dalam Rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB	140,300,000	140,300,000
6.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	E - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi CPOTB	300,800,000	300,800,000

		02 - Indeks pelayanan publikdi bidang pengawasan OT dan SK									4.9	4.9	4.9	4.9	496,287,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	G - Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81,440,000	81,440,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Sertifikasi Ekspor Impor Produk OT dan SK	A - Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	228,112,000	228,112,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	K - Percepatan Maturitas IOT untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Melalui Implementasi CPOTB	186,735,000	186,735,000

7.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat	01 - Indeks RB Direktorat PengawasanObat Tradisional dan													92.09	1,102,139,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pengawasan OT dan SK yang optimal	Suplemen Kesehatan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	C - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	116,424,000	116,424,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	F - Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	985,715,000	985,715,000

		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												97.5	105,800,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	211,600,000	105,800,000

8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan												92.2	654,581,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	H - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	209,538,000	209,538,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	G - Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	144,000,000	144,000,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Rangka Pengawasan OT dan SK	F - Capacity Building Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	301,043,000	301,043,000

9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	156,800,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	211,600,000	105,800,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	D - Pemeliharaan Kendaraan dan APD Direktorat Pengawasan OT dan SK	51,000,000	51,000,000

10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36,728,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	E - Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	31,400,000	31,400,000
2.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	5,328,000	5,328,000

Total	12,382,354,000

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt.,M.Epid
Jabatan	: Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt.,M.Epid	Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisonal, suplemen kesehatan dan kosmetik	91.67 Persen
		02 - Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	97.11 Persen
2.	02 - Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	100 Persen
3.	03 - Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima	01 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93.75 Indeks
4.	04 - Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	01 - Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	85 Persen
		02 - Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87.5 Persen
5.	05 - Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	01 - Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	99.2 Nilai
		02 - Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.7 Indeks
6.	06 - Meningkatnya kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT,SK, dan Kos	01 - Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294 Jumlah
7.	07 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	89.2 Indeks
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	95 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.44 Indeks
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisonal, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.351.062.000 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.399.520.000
2.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	10.951.542.000

Jakarta, 23 Desember 2023

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt.,M.Epid

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anisyah, S.Si, Apt, MP
Jabatan	: Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Anisyah, S.Si, Apt, MP	Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	01 - Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93 Persen
2.	02 - Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	89.5 Nilai
3.	03 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	01 - Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	90 Persen
		02 - Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90 Persen
		03 - Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4.85 Nilai
4.	04 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83.5 Persen
		02 - Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	82 Persen
5.	05 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	06 - Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif	01 - Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	93.14 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55 Nilai
7.	07 - Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	91.74 Nilai
8.	08 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3 Nilai
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	01 - Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 11,421,844,000 (Sebelas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	524,820,000
2.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	10,897,024,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama
Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Anisyah, S.Si, Apt, MP

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	01 - Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	75	77	79	81	83	85	87	89	90	91	92	93	752,350,000
2.	02 - Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.5	280,736,000
3.	03 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	01 - Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	1,191,280,000
		02 - Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	542,300,000
		03 - Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0	4.85	4.85	4.85	4.85	1,823,378,000
4.	04 - Meningkatnya Efektivitas	01 - Persentase keputusan	75	75	76	76	77	78	79	80	81	82	83	83.5	421,390,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar													
		02 - Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	70	70	70	75	75	75	78	78	78	82	82	82	2,350,634,000
5.	05 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424,303,000
6.	06 - Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif	01 - Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.14	1,040,043,000
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.55	279,600,000
7.	07 - Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.74	1,512,200,000
8.	08 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34,920,000
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	01 - Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	75	75	75	80	82	85	88	90	92	96	98	100	768,710,000
														Total	11,421,844,000

Jakarta, 22 December 2023

Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Anisyah, S.Si, Apt, MP

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irwan, S.Si, Apt, M.K.M
Jabatan	: Direktur Pengawasan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Pengawasan Kosmetik	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Irwan, S.Si, Apt, M.K.M	Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	01 - Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81 Persentase
		02 - Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05 Persentase
2.	02 - Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	01 - Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98 Persentase
3.	03 - Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89 Persentase
		02 - Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85 Perseentase
		03 - Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92 Persentase
5.	05 - Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	01 - Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawsan kosmetik	86 Persentase
6.	06 - Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	01 - Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94 Persentase
		02 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65 Nilai
7.	07 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	93.19 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.33 Nilai
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	87.41 Nilai
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3 Nilai
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 10,485,788,000 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	874,700,000
2.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	9,611,088,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Kosmetik

Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	01 - Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1,576,037,000
		02 - Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	70.05	831,190,500
2.	02 - Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	01 - Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	87	87	87	90	90	90	95	95	95	98	98	98	244,900,000
3.	03 - Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	1,471,008,100
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1,892,223,500
		02 - Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	764,390,000
		03 - Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	549,755,000
5.	05 - Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai	01 - Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka	0	0	0	0	0	15	30	50	70	80	84	86	782,555,900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	peningkatan kualitas pengawsan kosmetik													
6.	06 - Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	01 - Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	973,203,000
		02 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	4.65	4.65	4.65	490,868,200
7.	07 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.19	540,839,600
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.33	20,730,000
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.41	112,585,000
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.75	2.75	2.75	3	3	3	228,734,200
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	75	75	75	75	75	80	83	86	89	92	95	100	6,768,000
														Total	10,485,788,000

Jakarta, 22 December 2023

Direktur Pengawasan Kosmetik

Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan	: Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm	Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6 Nilai
2.	02 - Pelayanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.25
3.	03 - Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	100 Persen
4.	04 - Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	01 - Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95 Persen
5.	05 - Penyelesaian kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang efektif	01 - Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	99 Persen
6.	06 - Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45
7.	07 - Terwujudnya Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	01 - Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51 nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.7
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,	01 - Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat	92.14 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan OTSKK di Dit.Standardisasi OTSKK	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3 Nilai
10.	10 - Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 6,960,035,000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	349,880,000
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,610,155,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama
Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.6	668,996,000
2.	02 - Pelayanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.25	31,767,200
3.	03 - Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	0	0	25	0	0	40	0	0	70	0	0	100	2,567,400,000
4.	04 - Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	01 - Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	0	0	82	0	0	82	0	0	82	0	0	95	649,880,000
5.	05 - Penyelesaian kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang efektif	01 - Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	0	0	80	0	0	85	0	0	90	0	0	99	691,537,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	06 - Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.45	31,767,200
7.	07 - Terwujudnya Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	01 - Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.51	157,395,000
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.7	16,155,000
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	01 - Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.14	204,000,000
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan OTSKK di Dit.Standardisasi OTSKK	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,500,000,000
10.	10 - Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	441,137,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	6,960,035,000

Jakarta, 22 December 2023

Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-14
Kementerian Negara/Lembaga : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Eselon 1 : 063.01 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Wilayah/Provinsi : 01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT/DKI JAKARTA
Satuan Kerja : 445161 - DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Tanggal Cetak : 28-02-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
07	**KESEHATAN**	**53,601,083,000.00**	**50,194,290,590.00**	93.64%							
01	**OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**	**53,601,083,000.00**	**50,194,290,590.00**	93.64%							
DR	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**53,601,083,000.00**	**50,194,290,590.00**	93.64%							
3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	**4,144,275,000.00**	**4,144,270,729.00**	100%							
BDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**4,144,275,000.00**	**4,144,270,729.00**	**100%**							
001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4,144,275,000.00	**4,144,270,729.00**	**100%**	**13,250.0000**	**Orang**	**13,250.0000**	**100%**	**0%**		
4119	**Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan**	**11,195,244,000.00**	**10,427,830,459.00**	93.15%							
BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**	**4,413,969,000.00**	**4,133,946,611.00**	**93.66%**							
001	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	4,413,969,000.00	**4,133,946,611.00**	**93.66%**	**8,900.0000**	**Layanan**	**9,785.0000**	**100%**	**6.34%**		
BIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	**6,781,275,000.00**	**6,293,883,848.00**	**92.81%**							
001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	6,781,275,000.00	**6,293,883,848.00**	**92.81%**	**3,000.0000**	**Keputusan**	**3,708.0000**	**100%**	**7.19%**		
4121	**Pengawasan Kosmetik**	**9,611,088,000.00**	**9,182,753,804.00**	95.54%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**	**4,931,984,000.00**	**4,692,819,009.00**	**95.15%**							
001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	4,931,984,000.00	**4,692,819,009.00**	**95.15%**	**15,971.0000**	**Dokumen**	**24,125.0000**	**100%**	**4.85%**		
BIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	**4,679,104,000.00**	**4,489,934,795.00**	**95.96%**							
001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	4,679,104,000.00	**4,489,934,795.00**	**95.96%**	**1,675.0000**	**Keputusan**	**1,911.0000**	**100%**	**4.04%**		
4128	**Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**	**10,897,024,000.00**	**9,971,129,693.00**	91.5%							
PCA	**Perizinan Produk**	**10,897,024,000.00**	**9,971,129,693.00**	**91.5%**							
001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	10,897,024,000.00	**9,971,129,693.00**	**91.5%**	**73,154.0000**	**Keputusan**	**132,024.0000**	**100%**	**8.5%**		
4129	**Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**	**6,801,910,000.00**	**6,496,456,505.00**	95.51%							
ABG	**Kebijakan Bidang Kesehatan**	**691,537,000.00**	**678,130,808.00**	**98.06%**							
001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	691,537,000.00	**678,130,808.00**	**98.06%**	**150.0000**	**Rekomendasi Kebijakan**	**180.0000**	**100%**	**1.94%**		
AFA		**4,158,312,000.00**	**3,966,266,457.00**	**95.38%**							
001		4,158,312,000.00	**3,966,266,457.00**	**95.38%**	**10.0000**		**10.0000**	**100%**	**4.62%**		
CAB	**Sarana Bidang Kesehatan**	**668,713,000.00**	**668,711,240.00**	**100%**							
001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	668,713,000.00	**668,711,240.00**	**100%**	**50.0000**	**Unit**	**62.0000**	**100%**	**0%**		
CAN	**Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**1,283,348,000.00**	**1,183,348,000.00**	**92.21%**							
001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,283,348,000.00	**1,183,348,000.00**	**92.21%**	**71.0000**	**Unit**	**84.0000**	**100%**	**7.79%**		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
6385	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos**	**10,951,542,000.00**	**9,971,849,400.00**	91.05%							
AEA		**12,850,000.00**	**12,850,000.00**	**100%**							
001		12,850,000.00	**12,850,000.00**	**100%**	**1.0000**		**1.0000**	**100%**	**0%**		
BDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**4,034,584,000.00**	**3,560,813,659.00**	**88.26%**							
001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	4,034,584,000.00	**3,560,813,659.00**	**88.26%**	**294.0000**	**Orang**	**311.0000**	**100%**	**11.74%**		
QDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**6,904,108,000.00**	**6,398,185,741.00**	**92.67%**							
001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	6,904,108,000.00	**6,398,185,741.00**	**92.67%**	**169.0000**	**Orang**	**169.0000**	**100%**	**7.33%**		

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				6,496,463,000	6,496,456,505	100%
1	4129.AFA.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	3,966,271,000	3,966,266,457	100%
2	4129.ABG.001 Kajian Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Obat Tradisional, Suplemen	150 Dokumen	180 Dokumen	120%	678,131,000	678,130,808	100%
3	4129.CAB.001 Sarana Bidang Kesehatan	24 Unit	24 Unit	100%	668,713,000	668,711,240	100%
4	4129.CAN.001 Sarana Bidang TIK	90 Unit	71 Unit	79%	1,183,348,000	1,183,348,000	100%
5	3165.BDC.001 Sarana Bidang Kesehatan	4 Titik	4 Titik	100%	379,880,000	379,880,000	100%

MATRIKS RKP 2024
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

Program/Kegiatan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	78,18%	96,52%
	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70,05	73,88%	105,47%
Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98	100,00%	102,04%
Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	87,82	100,94%
Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	90,05%	101,18%
	Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	85	85,96%	101,13%
	Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	97,72%	106,22%
Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86	100,00%	116,28%
Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94	94,16%	100,17%
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,65	4,78	102,80%
Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	93,19	91,58	98,27%
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,33	98,17	101,91%
SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	87,41	87,35	99,93%
Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	3,00	3	100,00%
Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100%	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN	TARGET	Target2	REALISASI	CAPAIAN
Menigkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana	Persentase sarana produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	89,1	100,11
	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78,5	80,15	102,10
Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh	98,5	100	101,52
Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen	Indeks kepuasan mayarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan obat tradisional dan	91,75	91,81	100,07
Meningkatnya efektifitas pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	Persentase keputusan hasil pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	93,87	106,67
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81	82,08	101,33
	Persentase laporan keamanan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti tepat	98,5	99,66	101,18
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan obat tradinasional dan suplemen kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	72	78,57	109,13
Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	92,17	100,18
	Indeks pelayanan publik dibidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	4,9	4,93	100,61
Terwujudnya tata kelola pemerintah dilingkup direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang optimal	Indeks RB direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	92,09	89,09	96,74
	Nilai pengelolaan kearsipan	97,5	98,46	100,98
Terwujudnya SDM direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang optimal	Indeks profesional ASN direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	92,2	87,72	95,14
Menguatnya pengelolaan data dan informasi obat dan makanan di direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	Indeks pengelolaan data dan informasi unit kerja direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang optimal	3	3,6	120,00
Terkelolanya keuangan direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan secara akuntabel	Tingkat efisien penggunaan anggaran direktorat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	100	100	100,00

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	98,30	105,70
	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	89,5	90,34	100,94
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	90	95,74	106,37
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90	95,35	105,95
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,85	4,92	101,44
	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kosmetik	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83,5	88,18	105,60
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	82	87,95	107,26
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90	90,07	100,08
	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	93,14	91,29	98,01
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,55	98,46	101,98
	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	91,74	88,16	96,10
	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	3	3,60	120,00
	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	100	100,00	100,00

BADAN POM

1500533 HALOBPOM

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
02142484208
deputi2@gmail.com
@deputi2badanpom